



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional serta rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali;
 - b. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks modal manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Bali adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJPD mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan RPJPD Provinsi Bali.
- (2) Arah Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang serta berpedoman dengan RTRW yang merupakan satu kesatuan sistem Pembangunan Daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 Desember 2024



BUPATI BADUNG,

W. ANOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



IDA BAGUS SURYA SUAMBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI:
(5,67/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5



BUPATI BADUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-8
1. Tujuan.....	I-8
2. Sasaran	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	I-9
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
1. Aspek Geografi.....	II-1
A. Wilayah Administrasi Kabupaten Badung	II-1
B. Tofografi dan Kemiringan Lereng.....	II-5
C. Geologi dan Jenis Tanah	II-8
D. Iklim	II-11
E. Karakteristik Ekoregion	II-17
F. Pola Penggunaan Lahan	II-27
G. Persentase Alih Fungsi Lahan.....	II-32
H. Hidrologi	II-32
I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-40
J. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	II-41
K. Indeks Resiko Bencana.....	II-48
L. Indeks Ketahanan Pangan	II-49
2. Aspek Demografi.....	II-50
A. Jumlah, Sebaran dan Komposisi Penduduk.....	II-50
B. Laju Pertumbuhan Penduduk	II-52
C. Rasio Ketergantungan Umur	II-52
D. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	II-53
E. Status Pekerjaan Penduduk	II-54

2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-56
1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-56
	A. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-56
	B. Indeks Gini/Gini Rasio.....	II-56
	C. Kemiskinan.....	II-59
	D. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-61
	E. Indeks Pembangunan Manusia	II-64
2.	Kesejahteraan Sosial dan Budaya	II-66
	A. Indeks Keluarga Sehat.....	II-66
	B. Indeks Perlindungan Anak	II-66
	C. Kesetaraan Gender	II-68
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-72
1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-73
	A. Distribusi PDRB Kabupaten Badung Berdasarkan Lapangan Usaha	II-73
	B. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung.....	II-75
2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-76
	A. Angka Partisipasi Sekolah	II-76
	B. Rata-rata Lama Sekolah	II-77
	C. Harapan Lama Sekolah	II-77
	D. Angka Literasi dan Numerisasi.....	II-78
	E. Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja	II-79
3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-81
	A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik.....	II-81
	B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	II-82
	C. Rasio Jaringan Irigasi.....	II-83
	D. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	II-85
	E. Indeks Kualitas Air.....	II-86
2.4	Aspek Pelayan Umum	II-89
1.	Indeks Pelayanan Publik.....	II-89
2.	Indeks Inovasi Daerah	II-90
3.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	II-92
4.	Daya Saing Iklim Investasi	II-93
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-96
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	II-97
1.	Proyeksi Penduduk	II-97
	A. Proyeksi Jumlah Penduduk	II-97
	B. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-98
	C. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	II-99
2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	II-100
	A. Proyeksi Kebutuhan Rumah.....	II-100
	B. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih.....	II-101
	C. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik.....	II-102
	D. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pengelolaan Sampah	II-103
	E. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan.....	II-104
	F. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan.....	II-105

2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-107
1.	Sistem Pusat Permukiman	II-107
2.	Pola Ruang Wilayah	II-108
3.	Kawasan Strategis Kabupaten	II-111
BAB 3	PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS	
3.1	Permasalahan Pembangunan	III-1
3.2	Isu-isu Strategis Pembangunan	III-8
BAB 4	VISI & MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025-2045	
4.1	Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045	IV-1
4.2	Misi Pembangunan Jangka Panjang	IV-12
BAB 5	ARAHAN KEBIJAKAN & SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	
5.1	Arah Kebijakan	V-1
5.2	Sasaran Pokok Pembangunan	V-5
5.3	Pentahapan Pembangunan	V-49
BAB 6	PENUTUP	

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung	II-1
Tabel 2.2	Curah Hujan Tahunan, 2015-2023.....	II-12
Tabel 2.3	Curah Hujan Bulanan Tahun 2023 (mm).....	II-12
Tabel 2.4	Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius) Tahun 2015-2023.....	II-13
Tabel 2.5	Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (Derajat Celcius)	II-14
Tabel 2.6	Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan 2015-2023 (%).....	II-16
Tabel 2.7	Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%).....	II-16
Tabel 2.8	Distribusi Ekoregion Pulau Bali di Wilayah Kabupaten Badung	II-21
Tabel 2.9	Distribusi Tipe Vegetasi Alami Pulau Bali di Wilayah Kabupaten Badung	II-24
Tabel 2.10	Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2018, 2020 dan 2022.....	II-27
Tabel 2.11	Mata Air dan Luas Area yang Dialiri di Kabupaten Badung	II-35
Tabel 2.12	Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Bali Tahun 2018-2022	II-40
Tabel 2.13	Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Badung.....	II-42
Tabel 2.14	Status Daya Dukung Lahan Permukiman di Masing-Masing Desa	II-43
Tabel 2.15	Status Daya Dukung Air Kabupaten Badung.....	II-46
Tabel 2.16	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali.....	II-48
Tabel 2.17	Defisit Air di Provinsi Bali.....	II-48
Tabel 2.18	Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	II-49
Tabel 2.19	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali.....	II-50
Tabel 2.20	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung	II-51
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Badung	II-52
Tabel 2.22	Rasio Ketergantungan Umur, Anak dan Usia Lanjut di Kabupaten Badung Tahun 2010, 2020 dan 2022.....	II-53
Tabel 2.23	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Badung Tahun 2018-2022.....	II-54
Tabel 2.24	Komposisi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Status Pekerjaan Tahun 2018-2022.....	II-55
Tabel 2.25	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2023	II-58
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2013-2023	II-60
Tabel 2.27	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023.....	II-61
Tabel 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2013-2023.....	II-63
Tabel 2.29	Nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2023.....	II-65
Tabel 2.30	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022 ..	II-66
Tabel 2.31	Pembobotan Klaster Indeks Perlindungan Anak	II-67
Tabel 2.32	Indeks Klaster I-V menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021	II-68
Tabel 2.33	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-69
Tabel 2.33	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-69

Tabel 2.34	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-70
Tabel 2.35	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	II-72
Tabel 2.36	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Badung Tahun 2018-2023.....	II-74
Tabel 2.37	Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Badung Tahun 2018-2023.....	II-75
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Badung tahun 2019-2023.....	II-77
Tabel 2.39	Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Badung 2021-2023.....	II-77
Tabel 2.40	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2021-2023.....	II-78
Tabel 2.41	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD SMP SMA di Provinsi Bali.....	II-79
Tabel 2.42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-80
Tabel 2.43	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2013-2023.....	II-81
Tabel 2.44	Proporsi Panjang Jalan Menurut Klasifikasi Kondisi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023 ..	II-81
Tabel 2.45	Presentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-82
Tabel 2.46	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-84
Tabel 2.47	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023 ...	II-85
Tabel 2.48	Nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Di Kabupaten Badung Tahun 2022	II-88
Tabel 2.49	Status Mutu Air Sungai Di Kabupaten Tahun 2022	II-88
Tabel 2.50	Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022-2022.....	II-89
Tabel 2.51	Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bali Per Kabupaten Tahun 2022.....	II-91
Tabel 2.52	Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Bali Tahun 2023.....	II-92
Tabel 2.53	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	II-95
Tabel 2.54	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus Tahun 1961-2020	II-97
Tabel 2.55	Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-97
Tabel 2.56	Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045... ..	II-98
Tabel 2.57	Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025-2045. ..	II-99
Tabel 2.58	Hasil Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-100
Tabel 2.59	Hasil Proyeksi Kebutuhan Lahan Perumahan di Kabupaten Badung.....	II-101
Tabel 2.60	Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-101
Tabel 2.61	Hasil Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-102
Tabel 2.62	Hasil Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	II-103
Tabel 2.63	Hasil Proyeksi Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	II-105
Tabel 2.64	Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Badung	II-105
Tabel 3.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Badung.....	III-1
Tabel 3.2	Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Badung	III-8
Tabel 4.1	Rincian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	IV-4
Tabel 4.2	Keselarasn Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Terhadap Provinsi Bali dan Nasional.....	IV-8
Tabel 4.3	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045	IV-10
Tabel 4.4	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	IV-11

Tabel 4.5	Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 Terhadap Misi RPJPD Provinsi Bali dan RPJPN	IV-20
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	V-2
Tabel 5.2	17 Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	V-5
Tabel 5.3	Penyelarasan Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 Terhadap Arah (Tujuan) Pembangunan Provinsi Bali.....	V-6
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung 2025-2045	V-8
Tabel 5.5	Keselarasan Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan, dan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung 2025-2045	V-13
Tabel 5.6	Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 terhadap RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045.....	V-18
Tabel 5.7	Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Badung.....	V-33
Tabel 5.8	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.....	V-40
Tabel 5.9	Penyelarasan <i>Game Changer</i> RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045	V-44
Tabel 5.10	Target Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	V-49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	I-5
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung	II-4
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Badung	II-6
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Badung	II-7
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Badung.....	II-9
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Badung.....	II-10
Gambar 2.6	Curah Hujan Tahunan, 2015-2023.....	II-12
Gambar 2.7	Curah Hujan Bulanan Tahun 2023.....	II-13
Gambar 2.8	Grafik Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius) Tahun 2015-2023	II-14
Gambar 2.9	Grafik Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (Derajat Celcius)	II-15
Gambar 2.10	Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan (%).....	II-16
Gambar 2.11	Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%).....	II-16
Gambar 2.12	Peta Ekoregion Pulau Bali di Kabupaten Badung.....	II-22
Gambar 2.13	Peta Vegetasi Alami Pulau Bali di Kabupaten Badung	II-26
Gambar 2.14	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2018.....	II-29
Gambar 2.15	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2020.....	II-30
Gambar 2.16	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2022.....	II-31
Gambar 2.17	Peta Sungai di Kabupaten Badung	II-36
Gambar 2.18	Peta Aquifer Air Tanah di Kabupaten Badung	II-39
Gambar 2.19	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur 2023.....	II-52
Gambar 2.20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2013-2023	II-56
Gambar 2.21	Grafik Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Provinsi Bali	II-58
Gambar 2.22	Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2013-2023.....	II-60
Gambar 2.23	Diagram Perbandingan Angka Kemiskinan di Kabupaten Badung dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023.....	II-61
Gambar 2.24	Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2013-2023.....	II-63
Gambar 2.25	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar, dan Provinsi Bali Tahun 2012-2023.....	II-65
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023.....	II-69
Gambar 2.27	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Badung Dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023.....	II-82
Gambar 2.28	Grafik Perbandingan Panjang Jalan Menurut Klasifikasi Kondisi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-71
Gambar 2.29	Grafik Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	II-83
Gambar 2.30	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sumber Bersih Perpipaan Di Kabupaten Badung .	II-86
Gambar 2.31	Grafik Perbandingan Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022-2023	II-90



Gambar 2.32 Grafik Perbandingan Indeks Inovasi Dearah Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022	II-91
Gambar 2.33 Grafik Perbandingan Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023	II-95
Gambar 2.34 Peta Struktur Ruang Kabupaten Badung	II-113
Gambar 2.35 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Badung.....	II-114
Gambar 2.36 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Badung.....	II-115

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

URAIAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan tahap penting dalam proses pembangunan karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengelola berbagai aktivitas pembangunan. Secara umum perencanaan memberikan arah pembangunan yang jelas dan terukur sehingga dapat mengelola alokasi sumber daya secara efektif dan efisien, menciptakan sinergitas antar pemangku kepentingan khususnya pada pemerintahan yang sifatnya berjenjang, sekaligus kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan. Tanpa perencanaan yang baik, pembangunan cenderung menjadi tidak terarah dan tidak efisien, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan dilaksanakan secara berjenjang baik sesuai dengan jenjang pemerintahan (pusat-daerah) maupun sesuai dengan jenjang periodisasi waktu (pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan). Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dalam sistem sistem perencanaan pembangunan provinsi serta nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah di samping telah diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Dalam dokumen ini memuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah



jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Penyusunan dokumen RPJPD merupakan kewajiban yang diamanatkan kepada pemerintah daerah karena ada sanksi yang dikenakan apabila tidak dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah turut disebutkan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan selama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan mengenai penyusunan RPJPD secara teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa dalam proses penyusunan RPJPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (ranwal) RPJPD yang disusun paling lambat 1 tahun sebelum RPJPD sebelumnya berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Kabupaten Badung memiliki RPJPD Tahun 2005-2025 yang akan segera berakhir implementasinya dalam waktu dekat. Berkaitan dengan akan berakhirnya pelaksanaan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025, maka Pemerintah Kabupaten Badung yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Badung berkewajiban menyiapkan dokumen RPJPD untuk periode berikutnya yaitu Tahun 2025-2045 di Tahun 2024 ini.

1.2. DASAR HUKUM

Kebijakan yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 459);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/367/SJ, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 5-110);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Badung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagaimana Amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung. RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung yang berkeadilan dengan menempatkan *Krama* Badung sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Secara khusus, dalam penyusunan perencanaan jangka panjang ini Pemerintah Kabupaten Badung mengedepankan terwujudnya kesejahteraan *Krama* Badung yang berkeadilan dengan mengutamakan 7 (tujuh) fokus pembangunan yaitu:

1. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
2. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
3. Peningkatan produktivitas daerah;
4. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
5. Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Fokus pembangunan di atas akan disertai dengan kinerja yang ingin dicapai dan sejumlah indikator makro yang bersifat progresif. Kinerja dan indikator tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan jangka panjang.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. Pendekatan holistik-tematik;
6. Pendekatan integratif; dan
7. Pendekatan spasial.

Sistem perencanaan pembangunan nasional menghasilkan dokumen perencanaan yang harus disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Masing-masing dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan antar dokumen itu sendiri serta terkait antar pemerintahan. Terkait konteks integrasi antar dokumen perencanaan

pembangunan ini, hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025- 2045 adalah:

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Badung periode sebelumnya (2005-2025) dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
4. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis.
5. Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2023-2043. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 sebagaimana dijelaskan di atas dengan dokumen lainnya terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1.

Keterkaitan Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.3.2. Keselarasan Dokumen RPJPD Kabupaten Badung terhadap Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru

Dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 di samping merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Badung mewujudkan Provinsi Bali sebagaimana yang dicita-citakan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023). Secara spesifik diamanatkan bahwa Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, dijadikan landasan penyusunan Visi Pembangunan Kepala Daerah Provinsi Bali dan Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Bali (termasuk Kabupaten Badung). Haluan Pembangunan Bali ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana atau sebutan lainnya, tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten se-Bali (termasuk Kabupaten Badung), dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, merupakan arah dan strategi untuk memuliakan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali; bersifat ideologis; kultural, religius, dan nasionalis. Kabupaten Badung merupakan bagian dari kesatuan wilayah Bali sehingga dalam penetapan visi dan misi pembangunan jangka panjang harus merujuk pada arah dan strategi dalam pemuliaan alam, manusia, dan kebudayaan Bali tersebut. Adapun pemuliaan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang harus dirujuk dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini adalah sebagai berikut:

1. Alam Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru

Alam diciptakan oleh *Hyang* Maha Kuasa sebagai tempat dan sumber kehidupan makhluk; Manusia, hewan, dan juga tumbuhan-tumbuhan. Manusia adalah Alam itu sendiri, Manusia harus harmonis dengan Alam, Alam ibarat orang tua, hidup harus menghormati Alam. Karena Alam selalu memberi kehidupan Manusia, tetapi Alam tidak pernah menuntut apa pun kepada Manusia. Oleh karena itu, Manusia wajib hukumnya menjaga Alam dengan berbagai upaya secara *Niskala-Sakala* yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Guna mewujudkan pelestarian alam secara sekala dan niskala tersebut, maka upaya yang dilaksanakan dalam konteks implementasi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kesucian dan kemuliaan Alam secara *Niskala* dengan terus melaksanakan secara aktif berbagai Upakara dan Upacara berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal, sebagai pelaksanaan *Sad Kerthi*.
- b) Menjaga semua kawasan dan tempat suci di seluruh wilayah Kabupaten Badung.
- c) Menjaga kelestarian dan keutuhan Upakara dan Upacara berpedoman pada *Catur Bandana Yadnya* atau 4 (empat) Pilar Pelaksanaan Upacara, yaitu: *Tantra* (kekuatan geometrik Alam semesta); *Yantra* (energi simbol Alam semesta); *Mudra* (tarian kosmik Alam semesta); dan *Mantra* (*sabdha* Alam semesta).

- d) Secara terus-menerus menanamkan kesadaran masyarakat secara individu dan kolektif untuk memperkuat komitmen dalam menjaga Alam secara *Niskala*.
- e) Menjaga keutuhan dan fungsi ekosistem, seperti ekosistem daratan, laut, dan pesisir dari berbagai bencana Alam dan dampak negatif pembangunan.
- f) Pemanfaatan Alam beserta isinya secara bijak dan terhormat untuk membangun guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, tanpa merusak dan mengeksploitasi Alam.

2. Manusia Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru

Secara historis dan sosiologis Manusia Bali masuk dalam kategori Manusia unggul. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul harus menjadi prioritas utama pembangunan Bali 100 Tahun ke depan. Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul memiliki jati diri, integritas, dan kompetensi, serta memiliki daya saing tinggi (*Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci*) dalam menghadapi dinamika persaingan nasional dan internasional. Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan kualitas SDM paling unggul dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Hal ini ditunjukkan oleh data IPM Kabupaten Badung yang selalu lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Sejalan dengan itu maka peningkatan dan pengembangan SDM Badung untuk selalu unggul akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang.

Dalam mewujudkan SDM Badung yang unggul tersebut, dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru diamanatkan upaya yang wajib untuk diambil Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan udara bersih untuk Badung di masa depan
- b) Menyediakan air bersih untuk Badung di masa depan
- c) Menciptakan kedaulatan pangan dengan pangan organik untuk Badung di masa depan
- d) Mewujudkan ketercukupan sandang dan papan untuk Badung di masa depan
- e) Membangun pendidikan masa depan
- f) Membangun kesehatan dan jaminan sosial untuk Badung di masa depan
- g) Menjaga ketertiban daerah untuk Badung di masa depan
- h) Mengoptimalkan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi masa depan
- i) Memajukan *Usadha* Bali
- j) Mengelola dan mengatur perkembangan penduduk Badung masa depan
- k) Meningkatkan SDM Badung yang memiliki jati diri, integritas, dan kompetensi
- l) Menciptakan tenaga kerja Badung masa depan yang kompeten, berintegritas, profesional, dan berdaya saing
- m) Mendorong kemandirian energi Badung di masa depan
- n) Melaksanakan Transformasi Perekonomian Bali : Ekonomi *Kerthi* Bali (Sektor Pertanian; Sektor Kelautan; Sektor Industri; Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan Sektor Pariwisata)
- o) Mengembangkan Industri manufaktur dan Industri Berbasis Budaya *Branding* Bali
- p) Mendorong kebanggaan dalam menggunakan produk lokal Badung
- q) Mengembangkan Pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat

- r) Menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar kawasan di Kabupaten Badung
- s) Mengembangkan infrastruktur dan transportasi berkualitas untuk Badung masa depan

3. Kebudayaan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru

Secara empiris, perjalanan panjang Kebudayaan Bali selama berabad-abad masih eksis dan kuat sampai masa kini. Eksistensi dan kekuatan Kebudayaan Bali dibuktikan ketika terus menerus mengalami berbagai gempuran secara internal dan eksternal, seperti munculnya industri pariwisata sejak tahun 1930-an, 93 tahun lalu (hampir satu abad); pengaruh budaya dan ideologi asing; derasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta faktor lainnya.

Kebijakan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang menjadi amanat dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru adalah sebagai berikut:

- a) Pemuliaan Desa Adat
- b) Pemuliaan Subak
- c) Pemuliaan Manuskrip Kearifan Lokal Bali
- d) Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (*Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci*)
- e) Penguatan dan Pemajuan Tradisi, Seni-Budaya, dan Kearifan Lokal Bali
- f) Pelindungan Hukum Karya Cipta Seni-Budaya Bali dengan Kekayaan Intelektual (KI)

Keseluruhan upaya pelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali tersebut akan terangkum dalam Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Badung yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan yang lebih operasional. Sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini dipastikan akan selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru serta menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan pemuliaan manusia, alam, dan budaya Bali di Kabupaten Badung.

1.4. MAKSUD & TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini adalah melaksanakan amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menciptakan pembangunan nasional dan daerah yang sinergis, terarah, dan berkelanjutan.


1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini adalah untuk menyediakan rencana pembangunan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebagai arah pembangunan jangka panjang yang terukur, menetapkan prioritas pembangunan, efisiensi alokasi sumber daya daerah, sinergitas antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan, serta kesinambungan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

- **Bab 1 Pendahuluan**
Memuat setidaknya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.
- **Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah**
Bab ini memuat mengenai kondisi wilayah Kabupaten Badung yang akan dilihat berdasarkan:
 1. Aspek Geografi dan Demografi
 - a. Geografi
Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
 - b. Demografi
Menjelaskan karakteristik demografi daerah.
 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan Ekonomi
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
 - b. Kesejahteraan Sosial Budaya
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
 3. Aspek Daya Saing
 - a. Daya Saing Ekonomi Daerah
Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
 - b. Daya Saing SDM
Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.
 - c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
 - d. Daya Saing Iklim Investasi
Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.
 4. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.
 5. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2045
Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2045 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

- 
6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana ini memuat:
 - a. Analisis Proyeksi Penduduk
 - b. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana
 7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045;
Memuat mengenai penjelasan terkait pusat-pusat pertumbuhan wilayah sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Badung dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

- **Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis**

Bab ini memuat mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Badung yang dapat mempengaruhi perkembangannya di masa yang akan datang. Permasalahan dan Isu Strategis dalam Bab ini disesuaikan dengan isu strategis yang termuat dalam Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Badung.

- **Bab 4 Visi dan Misi Daerah;**

Bab ini memuat mengenai kondisi yang diharapkan dapat terwujud di Kabupaten Badung hingga 20 tahun mendatang yang ditetapkan dalam wujud visi pembangunan jangka panjang daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam misi-misi pembangunan daerah.

- **Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah;**

Bab ini memuat mengenai:

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2044

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif.

- **Bab 6 Penutup**

Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Badung.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

A. Wilayah Administrasi Kabupaten Badung

Kabupaten Badung terletak pada belahan bagian tengah Pulau Bali membujur dari tengah ke selatan pada posisi 8° 14'20"- 8° 50'48" LS dan 115° 05' 00" - 115° 26' 16" BT. Secara administrasi Kabupaten Badung, terbagi menjadi 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan, yang terdiri atas Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang. Kabupaten Badung yang memiliki luas wilayah 39.842,48 Ha atau 7,43 persen dari luas Pulau Bali dan merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Luas wilayah Kabupaten Badung adalah 39.842,48 Ha. Ibukota Kabupaten Badung adalah Kawasan Perkotaan Mangupura, meliputi Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sempidi, Kelurahan Sading, Desa Mengwi, Desa Gulingan, Desa Mengwitani dan Desa Kekeran. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Badung yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
- Sebelah Barat : Samudra Hindia dan Wilayah Kabupaten Tabanan

Untuk luasan masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten Badung
1	Kecamatan Abiansemal		6.616,88	16,61%
		Desa Abiansemal	452,04	
		Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	272,85	
		Desa Angantaka	225,04	
		Desa Ayunan	206,15	
		Desa Blahkiuh	463,59	
		Desa Bongkasa	412,27	
		Desa Bongkasa Pertiwi	243,31	
		Desa Darmasaba	594,01	
		Desa Jagapati	172,99	
		Desa Mambal	340,46	
		Desa Mekar Bhuwana	299,59	
		Desa Punggul	236,71	
		Desa Sangeh	483,77	
		Desa Sedang	367,87	
		Desa Selat	184,50	

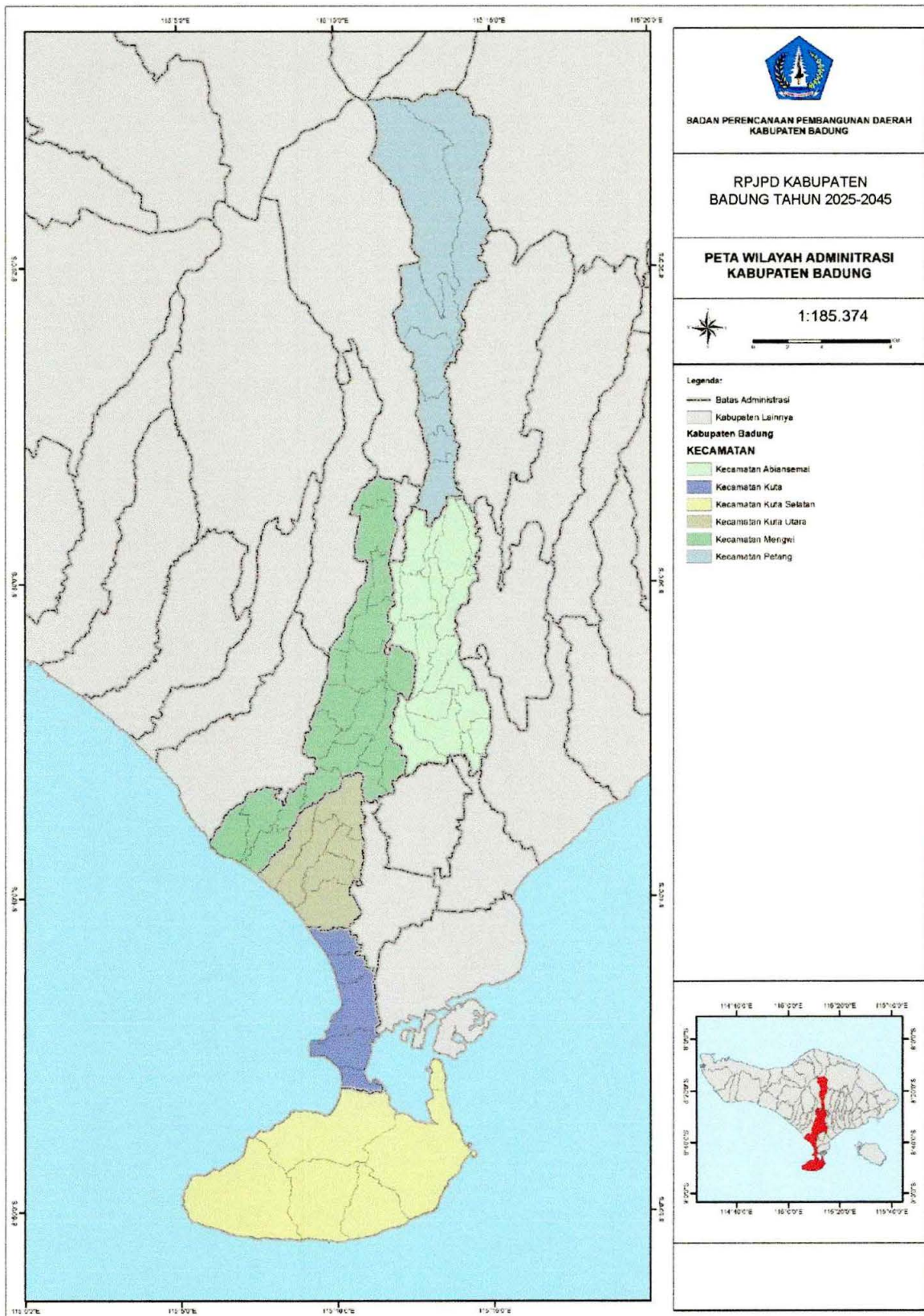
No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten Badung
		Desa Sibang Gede	587,47	
		Desa Sibang Kaja	360,23	
		Desa Taman	714,04	
2	Kecamatan Kuta		2.223,44	5,58%
		Kelurahan Kedonganan	226,03	
		Kelurahan Kuta	785,46	
		Kelurahan Legian	304,35	
		Kelurahan Seminyak	346,88	
		Kelurahan Tuban	560,73	
3	Kecamatan Kuta Selatan		10.111,96	25,38%
		Desa Kutuh	997,62	
		Desa Pecatu	2.569,67	
		Desa Ungasan	1.582,48	
		Kelurahan Benoa	2.563,80	
		Kelurahan Jimbaran	2.268,13	
		Kelurahan Tanjung Benoa	130,25	
4	Kecamatan Kuta Utara		3.493,01	8,77%
		Desa Canggu	565,26	
		Desa Dalung	682,24	
		Desa Tibebeneng	661,45	
		Kelurahan Kerobokan	442,79	
		Kelurahan Kerobokan Kaja	357,99	
		Kelurahan Kerobokan Kelod	783,28	
5	Kecamatan Mengwi		8.163,49	20,49%
		Desa Baha	552,25	
		Desa Buduk	326,03	
		Desa Cemagi	484,70	
		Desa Gulingan	527,91	
		Desa Kekeran	403,68	
		Desa Kuwum	343,85	
		Desa Mengwi	216,83	
		Desa Mengwitani	458,51	
		Desa Munggu	542,03	
		Desa Pendarungan	409,98	
		Desa Pererenan	386,17	
		Desa Sembung	632,82	
		Desa Sobangan	340,86	
		Desa Tumbakbayuh	267,16	
		Desa Werdi Bhuwana	344,61	
		Kelurahan Abianbase	410,06	
		Kelurahan Kapal	549,50	
		Kelurahan Lukluk	407,99	
		Kelurahan Sading	296,09	
		Kelurahan Sempidi	262,46	
6	Kecamatan Petang		9.233,70	23,18%
		Desa Belok Sidan	2.683,25	
		Desa Carangsari	606,54	
		Desa Getasan	266,39	
		Desa Pangsan	442,13	
		Desa Pelaga	3.386,68	
		Desa Petang	759,81	
		Desa Sulangai	1.088,92	

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten Badung
Kabupaten Badung			39.842,48	

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Badung

Kecamatan Kuta Selatan merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi paling tinggi yaitu 10.111,96 Ha atau 25,38% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Kecamatan Kuta Selatan dikenal karena pantai-pantai indah yang menjadi tujuan wisata populer, seperti Pantai Kuta, Pantai Dreamland, dan Pantai Pandawa. Selain itu, Kecamatan Kuta Selatan juga memiliki beberapa bukit dan perbukitan kecil yang menambah keindahan pemandangan alamnya. Sedangkan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil yaitu 22,23 Km² atau 5,58% dari total luas wilayah Kabupaten Badung.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung

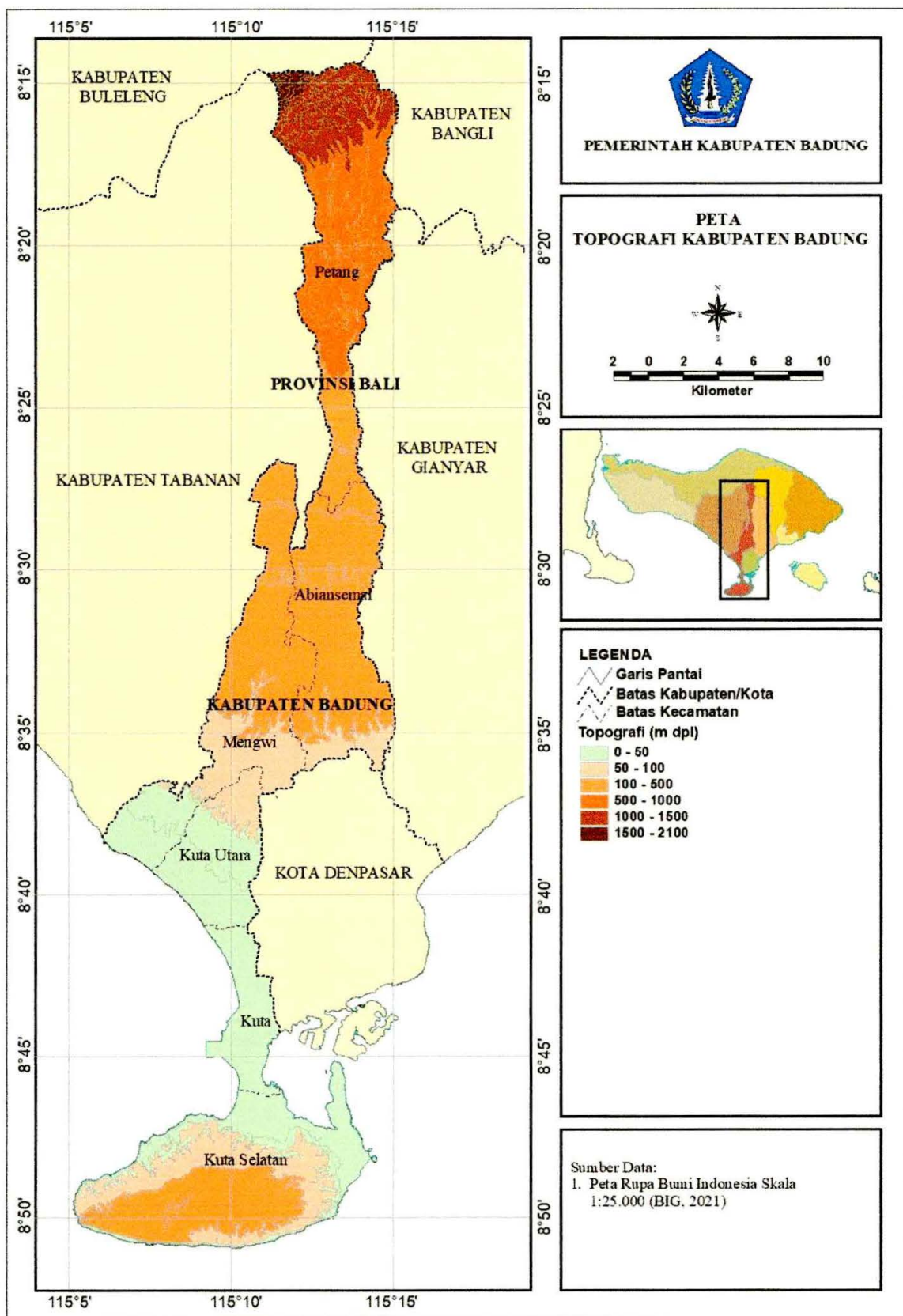


B. Topografi dan Kemiringan Lereng

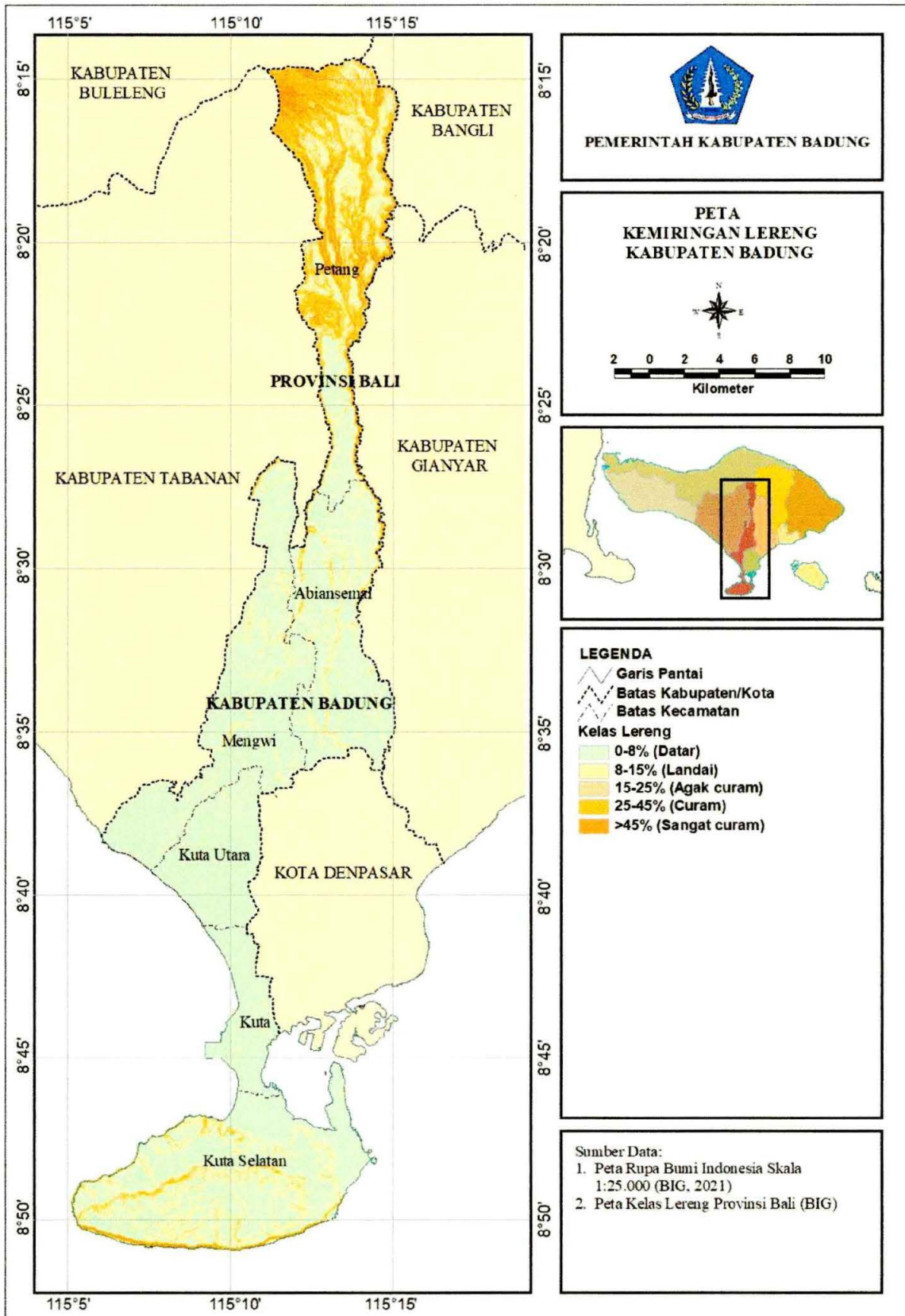
Wilayah Kabupaten Badung terletak pada ketinggian 0-2.075 mdpl (meter dari permukaan laut) dengan topografi yang beragam dimana dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu wilayah dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Wilayah Kecamatan Kuta Selatan berada pada ketinggian 0 – 215 mdpl, lebih banyak daerah perbukitan. Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, dan Abiansemal termasuk daerah dataran rendah. Kecamatan Kuta terletak pada ketinggian 0 – 27 mdpl, Kuta Utara pada ketinggian 0 – 65 mdpl, Mengwi pada ketinggian 0 – 350 mdpl, dan Abiansemal pada ketinggian 75 - 350 mdpl. Sedangkan Kecamatan Petang tergolong daerah dataran tinggi, berada pada ketinggian 275 – 2075 mdpl.

Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Badung berkisar antara datar sampai agak terjal. Wilayah yang merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 – 2% terdapat di wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Wilayah Kecamatan Mengwi dan Abiansemal lebih banyak lahan datar dan landai dengan kemiringan 0 – 2% dan 2 – 15%. Sedangkan wilayah Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Petang lebih banyak lahan dengan kemiringan lereng 15 – 40% yang merupakan daerah relatif terjal.

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Badung



Gambar 2.3.
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Badung



C. Geologi dan Jenis Tanah

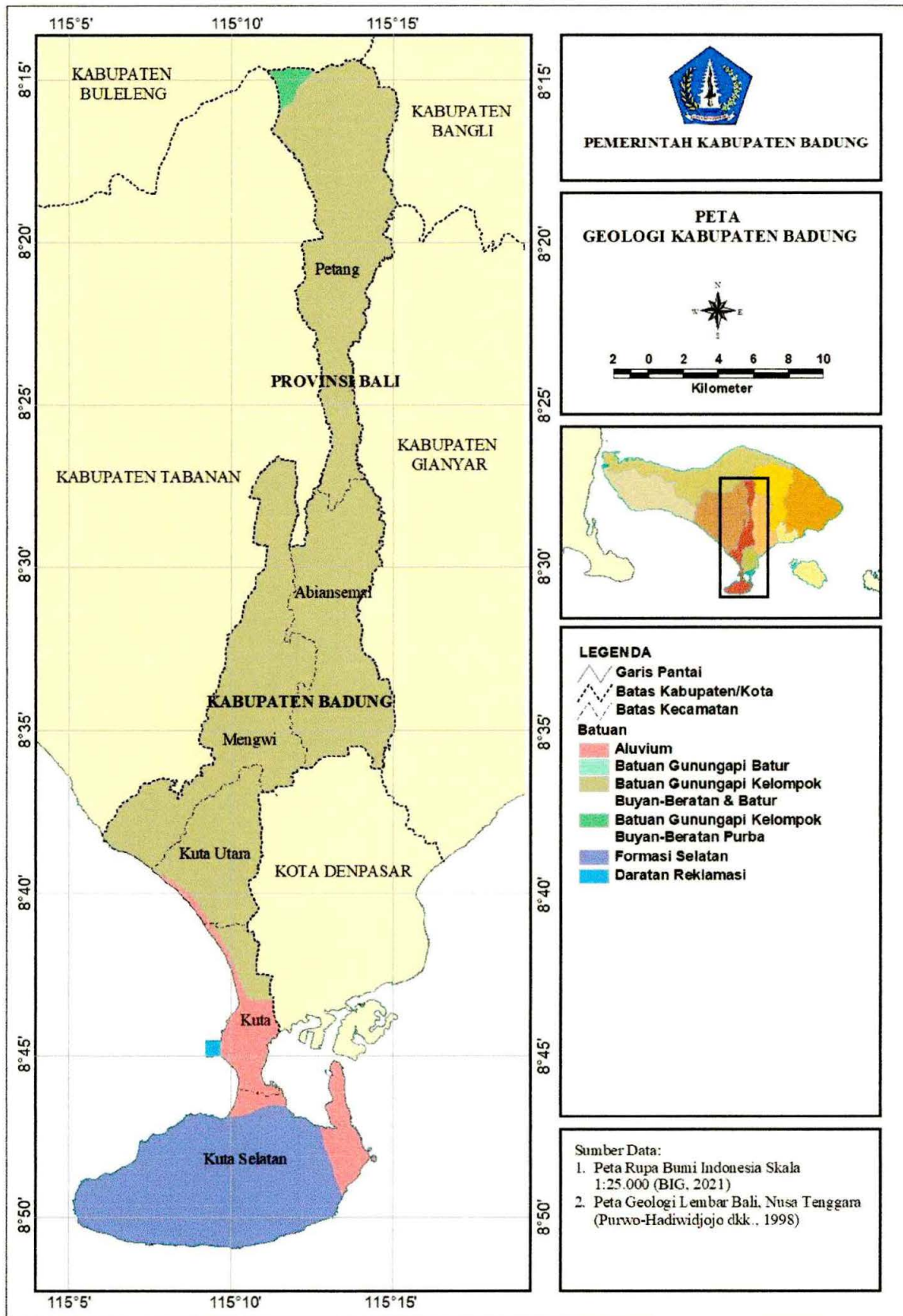
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk., 1998), struktur geologi regional Pulau Bali pada umumnya dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama Miosin Bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan oleh batu gamping yang kemudian membentuk Formasi Selatan. Sebaran formasi geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- a. Batuan Gunungapi Kelompok Buyan-Beratan dan Batur, terbentuk pada kala Kwarter, terdiri atas breksi gunung api dan lava, setempat tuf. Batuan ini sebarannya sangat luas di Kabupaten Badung, meliputi Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, dan Petang.
- b. Endapan Aluvium, berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung, sebagai endapan sungai dan pantai. Batuan ini terdapat di Nusa Dua, Tanjung Benoa, Jimbaran, Kedonganan, Tuban, dan Kuta.
- c. Formasi Selatan, terbentuk pada kala Miosin, terdiri atas batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah bukit Kecamatan Kuta Selatan.

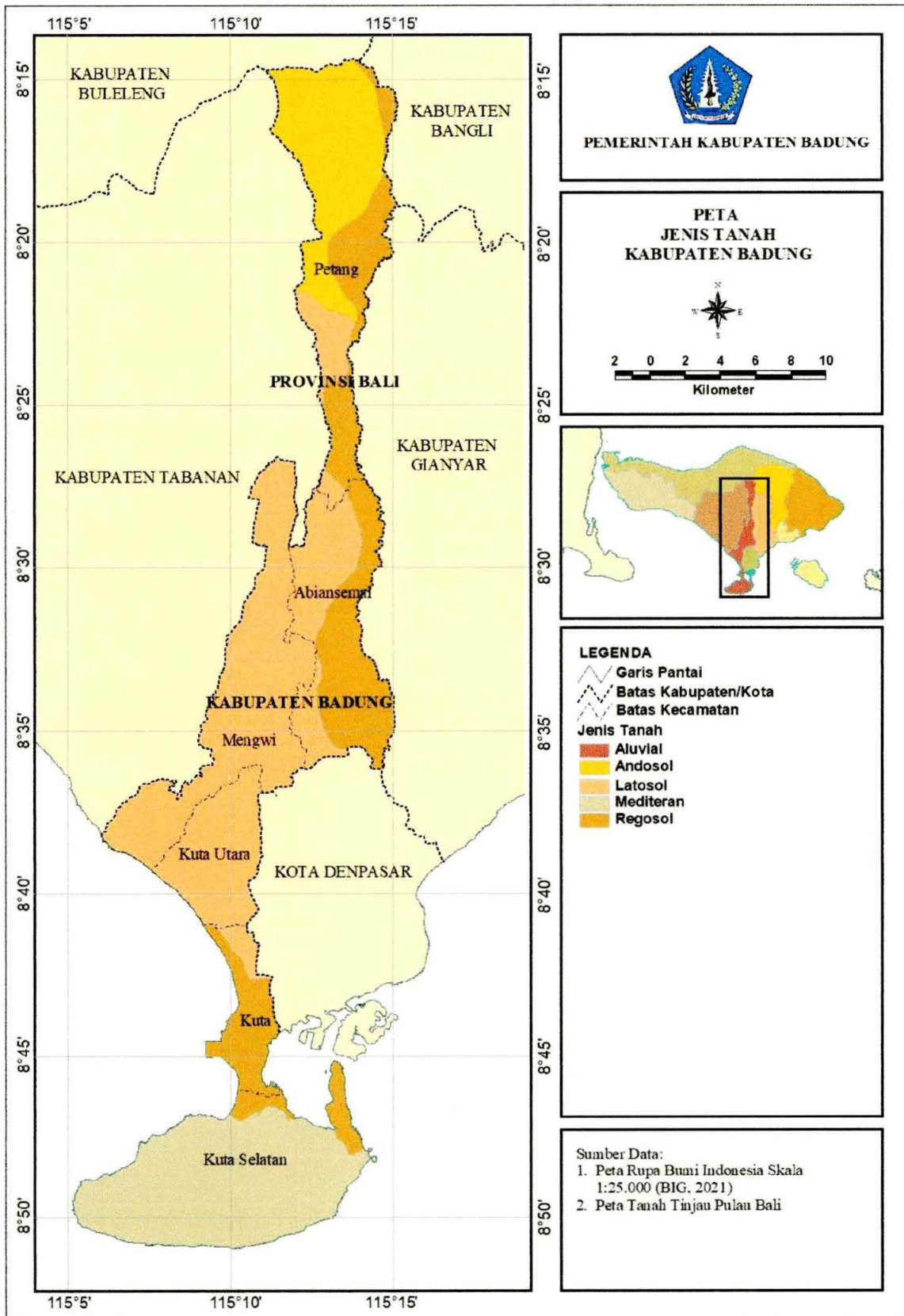
Ada empat jenis tanah utama yang tersebar di wilayah Kabupaten Badung menurut Peta Tanah Tinjau Bali (1970). Keempat jenis tanah tersebut, yaitu:

- a. Regosol, terdiri atas Regosol Coklat Kelabu, Regosol Kelabu, Regosol Coklat dan Regosol Berhumus. Jenis tanah ini berbahan induk endapan laut, abu vulkan dan intermedier, serta dengan fisiografi beting pantai dan dengan bentukan melandai. Tersebar di Kuta, Tuban, Kedongan, daerah dekat pantai Seminyak dan Legian, daerah dataran rendah Jimbaran, Tanjung Benoa, Nusa Dua, dan daerah bagian timur Kecamatan Abiansemal dan Petang.
- b. Latosol, terdiri atas Latosol Coklat Kekuningan, Latosol Coklat, Latosol Coklat Kemerahan dan Litosol. Jenis tanah ini berbahan induk abu dan tufa vulkan, dengan fisiografi lungur vulkan kerucut dan lungur vulkan serta bentukan melandai sampai bergelombang. Jenis tanah ini lebih banyak terdapat di Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang bagian barat.
- c. Mediteran, terdiri atas Mediteran Coklat dan Mediteran Coklat Merah. Jenis tanah ini berbahan induk batu kapur karang dan batu gamping dengan fisiografi pantai berkarang dan bukit angkatan. Tersebar di daerah perbukitan Kecamatan Kuta Selatan.
- d. Andosol, berbahan induk abu dan tufa vulkan, terdapat di Kecamatan Petang.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Badung



Gambar 2.5.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Badung



D. Iklim

1) Tipe dan Kondisi Iklim

Wilayah Kabupaten Badung termasuk ke dalam daerah monsun yang ditandai dengan pergantian arah angin sekitar enam bulan sekali. Pada musim Barat (Oktober - Maret), cuaca dipengaruhi oleh angin Barat, baik yang melalui Laut Jawa (disebut Monsun Pasifik), maupun yang melalui Samudra Hindia. Dua samudera ini mempengaruhi karakteristik curah hujan, dengan pengaruh angin monsun Barat Samudra Hindia dominan di sebelah Selatan, dan Monsun Pasifik di sebelah Utara. Monsun barat umumnya menimbulkan banyak hujan yang terjadi sekitar bulan Januari, monsun timur umumnya menyebabkan kondisi kurang hujan (kemarau) yang terjadi sekitar bulan Agustus (Sofian et al., 2008).

Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Badung mempunyai sebaran tipe iklim C, D, E dan F. Tipe iklim C adalah perbandingan antara rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah berkisar 33,3 – 60,0%, terdapat di Kecamatan Mengwi bagian utara, seluruh Kecamatan Abiansemal, dan Kecamatan Petang. Wilayah dengan tipe iklim D yaitu perbandingan antara rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah berkisar 60,0 – 100% terdapat di Kecamatan Mengwi dekat pantai dan Kuta Utara. Wilayah dengan tipe iklim E yaitu perbandingan antara rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah berkisar 100 -167% terdapat di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta. Sedangkan tipe iklim F yaitu perbandingan antara rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah berkisar 167 – 300% terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

2) Curah Hujan

Pengaruh tingginya suhu permukaan laut (SPL) di Samudera Hindia mendorong intensifnya evaporasi dan pembentukan awan pada musim angin Barat sehingga mendorong terjadinya curah hujan yang tinggi pada bulan November sampai Maret. Sebaliknya pada musim angin Timur, SPL di Samudera Hindia menurun dan mencapai suhu terendah pada bulan Agustus, menyebabkan terjadinya musim kering dengan curah hujan yang sangat rendah.

Curah hujan tahunan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2015-2022 berkisar 997 – 2.993 mm. Curah hujan relatif tinggi (di atas 2.000 mm) terjadi pada tahun 2016, 2017, 2021 dan 2022. Sedangkan curah hujan terendah selama periode tersebut terjadi pada tahun 2019.

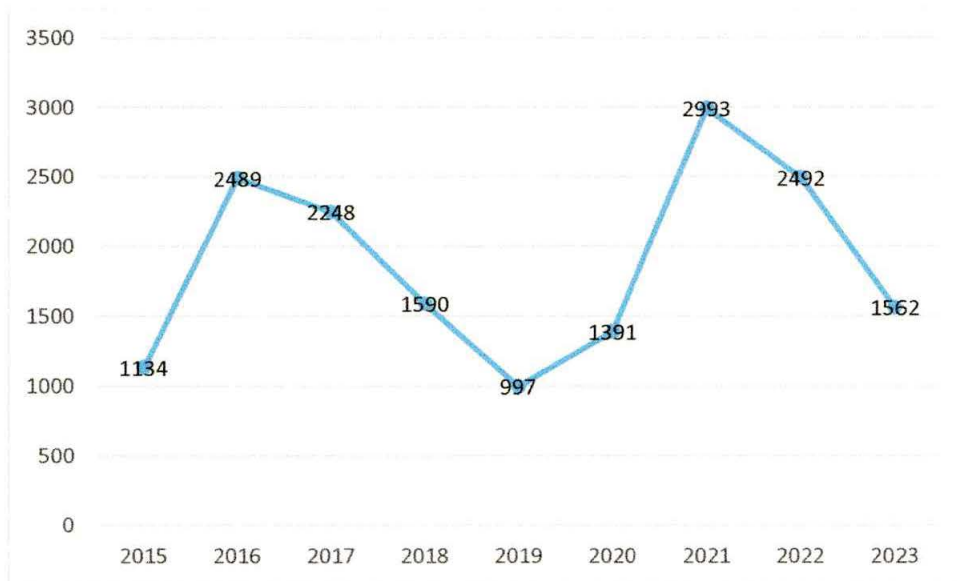
Curah hujan bulanan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2022 berkisar 5 – 584 mm, tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Juli. Bulan basah (curah hujan >100 mm) pada tahun 2023 relatif panjang, yaitu bulan Januari – Juni dan Oktober-Desember.

Tabel 2.2.
Curah Hujan Tahunan, 2015-2023

No.	Tahun	Curah Hujan (mm)
1	2015	1.134
2	2016	2.489
3	2017	2.248
4	2018	1.590
5	2019	997
6	2020	1.391
7	2021	2.993
8	2022	2.492
9	2023	1.562

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2024

Gambar 2.6.
Curah Hujan Tahunan, 2015-2023



Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2024

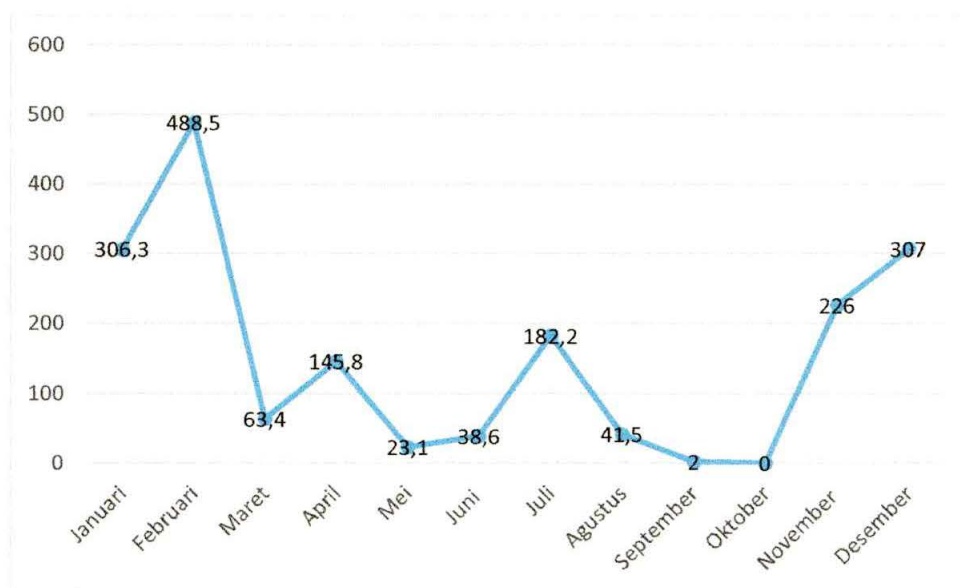
Tabel 2.3.
Curah Hujan Bulanan Tahun 2023 (mm)

Bulan	Curah Hujan (mm)
Januari	306.3
Februari	488.5
Maret	63.4
April	145.8
Mei	23.1
Juni	38.6
Juli	182.2

Bulan	Curah Hujan (mm)
Agustus	41,5
September	2
Oktober	0
November	226
Desember	307

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2024

Gambar 2.7.
Curah Hujan Bulanan Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2024

3) Suhu Udara

Suhu udara rata-rata tahunan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2015-2023 berkisar 27,2 – 28,0 oC. Suhu udara rata-rata tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2016 sedangkan suhu rendah terjadi pada tahun 2015, 2017 sampai 2019. Sementara suhu udara rata-rata bulanan dalam tiga tahun terakhir berkisar 27,6 – 27,7 oC. Suhu udara rata-rata bulanan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2022 berkisar 27,1 oC 28,1 oC. Suhu udara meningkat dari Januari sampai puncaknya di bulan April, kemudian menurun hingga suhu rata-rata terendah pada bulan Juli. Selanjutnya suhu meningkat kembali hingga mencapai 28,1 oC pada bulan Desember.

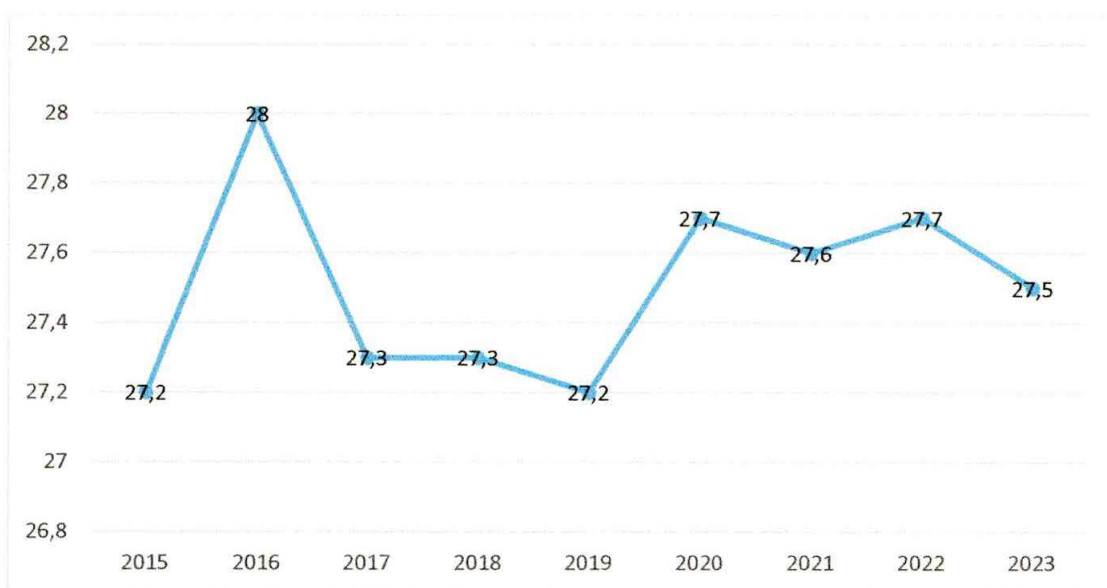
Tabel 2.4.
Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius) Tahun 2015-2023

Tahun	Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius)
2015	27,2

Tahun	Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius)
2016	28,0
2017	27,3
2018	27,3
2019	27,2
2020	27,7
2021	27,6
2022	27,7
2023	27,5

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

Gambar 2.8.
Grafik Suhu Rata-Rata Tahunan (Derajat Celcius) Tahun 2015-2023



Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

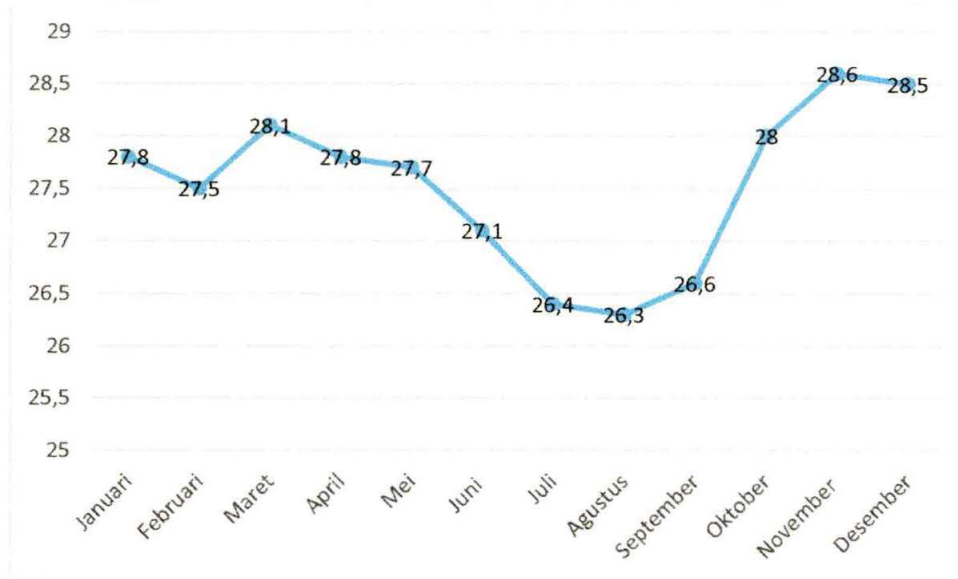
Tabel 2.5.
Suhu Rata-rata Bulanan Tahun 2023 (Derajat Celcius)

Bulan	Suhu Rata-Rata Bulanan (Derajat Celcius)
Januari	27.8
Februari	27.5
Maret	28.1
April	27.8
Mei	27.7
Juni	27.1
Juli	26.4
Agustus	26.3
September	26.6
Oktober	28

Bulan	Suhu Rata-Rata Bulanan (Derajat Celcius)
November	28.6
Desember	28.5

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

Gambar 2.9.
Grafik Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (Derajat Celcius)



Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

4) Kelembaban Udara

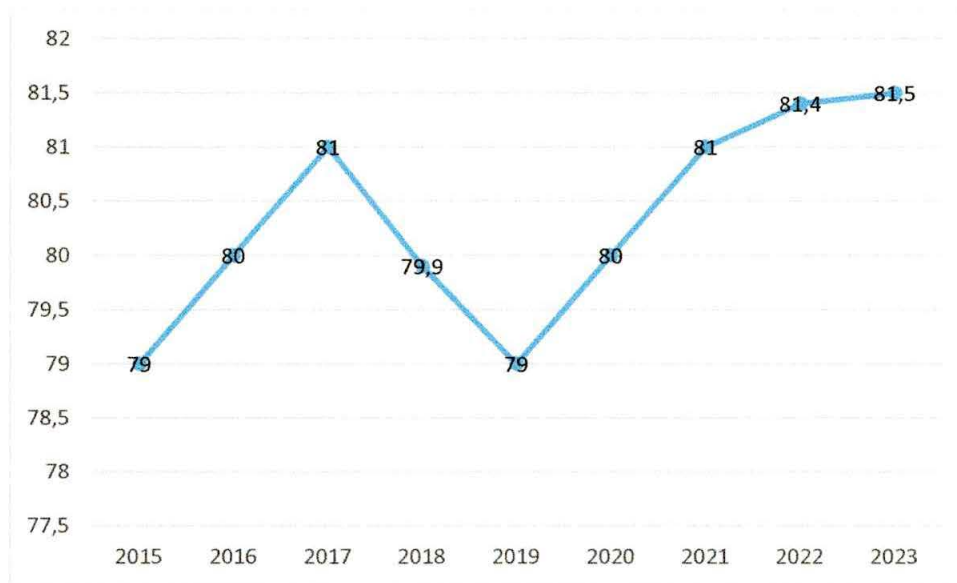
Kelembaban udara rata-rata tahunan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2015-2023 berkisar 79,0 – 81,4%. Kelembaban udara rata-rata tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2023 sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Kelembaban udara rata-rata bulanan pada stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2023 berkisar 78 – 84%. Kelembaban udara terendah pada bulan Juli dan tertinggi bulan Oktober.

Tabel 2.6.
Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan 2015-2023(%)

Tahun	Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan (%)
2015	79
2016	80
2017	81
2018	79,9
2019	79
2020	80
2021	81
2022	81,4
2023	81,5

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

Gambar 2.10.
Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan (%)



Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

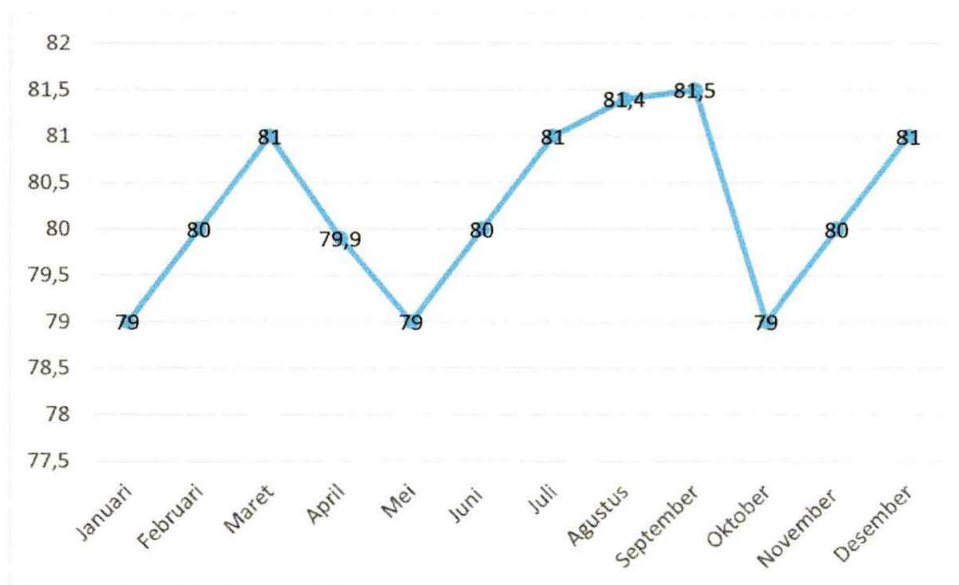
Tabel 2.7.
Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)

Bulan	Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)
Januari	79
Februari	80
Maret	81
April	79,9
Mei	79
Juni	80
Juli	81
Agustus	81,4

Bulan	Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)
September	81,5
Oktober	79
November	80
Desember	81

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

Gambar 2.11.
Kelembaban Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 (%)



Sumber: Provinsi Bali dalam Angka

E. Karakteristik Ekoregion

1) Karakteristik Benteng Alam

Bentuk lahan (landform) Ekoregion Pulau Bali di dalam gugusan Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepmen LHK Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia terdiri atas 8 (delapan) satuan ekoregion wilayah Provinsi Bali, meliputi:

- (1) Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok.
- (2) Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok
- (3) Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok
- (4) Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Bali-Lombok
- (5) Ekoregion Dataran Pantai Bali-Lombok
- (6) Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok
- (7) Ekoregion Dataran Organik/Koral Bali-Lombok
- (8) Danau Pegunungan

Wilayah Kabupaten Badung terdiri atas 5 (lima) satuan ekoregion dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok

Satuan Ekoregion ini melingkupi sekitar 15,94% wilayah Kabupaten Badung, tersebar di Kecamatan Petang. Ekoregion ini terbentuk oleh kekuatan tektonik yang menghasilkan struktur-struktur geologis seperti lipatan, patahan, kubah, dan formasi lainnya. Struktur geologis tersebut terdiri dari batuan intrusif dan batuan sedimen yang telah mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Morfologi wilayah ini berupa pegunungan dengan elevasi tinggi, lebih dari 300 meter di atas permukaan laut.

Jenis tanah yang dominan di wilayah ini adalah Tanah Andosol dan Tanah Latosol. Tanah Andosol terbentuk dari abu vulkanik yang kaya akan unsur hara, sehingga sangat subur. Sementara itu, Tanah Latosol terbentuk dari bahan vulkanik yang juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Selain itu, di beberapa tempat seperti di lereng atas dan sepanjang aliran sungai, dapat ditemukan Tanah Regosol Kelabu yang berasal dari material letusan gunung berapi, yang juga memiliki kesuburan tinggi.

Karakteristik tanah dan morfologi wilayah ini menyebabkan pegunungan vulkanik di ekoregion ini memiliki tipe penutupan dan penggunaan lahan yang beragam. Di sini, terdapat hutan, semak belukar, padang rumput, ladang, dan sebagian kecil area permukiman. Keanekaragaman penggunaan lahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat setempat terhadap kondisi alam dan kesuburan tanah yang mendukung berbagai jenis vegetasi dan aktivitas pertanian.

Ancaman yang ada di ekoregion ini antara lain adalah letusan vulkanik berupa jatuhnya pyroklastik seperti abu, pasir, krikil dan batu pijar, juga aliran awan panas, serta aliran lahar maupun banjir bandang (*flushflood*). Berdasarkan karakter wilayahnya, ekoregion ini mempunyai jasa ekosistem sebagai habitat flora fauna, penyedia air permukaan dan air tanah, dan pemicu sirkulasi udara.

2. Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok

Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok melingkupi sekitar 39,72% wilayah Kabupaten Badung dengan sebaran di Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara. Wilayah ini terdiri atas perbukitan yang terbentuk dari aktivitas vulkanik, meskipun tidak setinggi pegunungan. Tanahnya subur dan kaya akan mineral sebagai hasil dekomposisi bahan vulkanik.

Perbukitan Vulkanik Bali-Lombok tersusun oleh batuan beku ekstrusif dan material pyroklastik sebagai hasil dari proses vulkanik yang membentuk morfologi perbukitan dan menempati elevasi sedang (< 300 m). Tanah yang dijumpai pada ekoregion ini lebih banyak oleh Tanah Latosol dengan solum dalam yang berasal dari tuff vulkan tua yang memiliki tingkat kesuburan sedang sampai tinggi. Di beberapa tempat dapat dijumpai Tanah Regosol dengan tekstur kasar dan Tanah Mediteran dengan tekstur agak berat, kedua tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan sedang. Karakteristik yang demikian menyebabkan perbukitan vulkanik

ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan lahan beragam, seperti hutan, semak belukar, padang rumput, ladang dan permukiman.

Perbukitan vulkanik ini berada di bawah kondisi iklim tropika semi--arid dengan suhu panas tropikal hingga sejuk. Kondisi iklim yang demikian sumber daya air permukaan, air tanah, dan mata air cukup baik di musim penghujan, namun terbatas di musim kemarau. Sumber daya mineral umumnya berupa galian C (pasir dan batu), mempunyai keanekaragaman hayati relatif rendah hingga sedang. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini umumnya bertani atau berladang dan berternak, sedangkan tingkat pendidikan mereka agak tertinggal, baik disebabkan oleh karena minimnya aksesibilitas atau masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

Ancaman yang ada di ekoregion ini antara lain adalah aliran lahar dan banjir bandang (*flushflood*). Berdasarkan karakter wilayahnya, ekoregion ini mempunyai jasa lingkungan sebagai penyedia air permukaan dan air tanah, dan lahan pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan.

3. Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok

Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok yang melingkupi sekitar 15,89% wilayah Kabupaten Badung dengan sebaran di Kecamatan Mengwi, Kuta Utara, dan Kuta. Ekoregion ini merupakan dataran fluvial yang terbentuk dari aktivitas sungai dengan sebaran Tanah di wilayah ini merupakan sedimentasi sungai yang menciptakan kesuburan untuk pertanian.

Daerah ini tersusun oleh material aluvium yang merupakan hasil proses pengendapan aliran air permukaan (sungai) yang membawa sedimen dari daerah hulu. Dataran fluvial menempati areal elevasi rendah, berupa dataran aluvial atau dataran antar perbukitan. Tanah yang terbentuk di dataran ini lebih banyak Tanah Aluvial Hidromorf (*Endoaquepts*) yang kaya akan unsur hara akibat proses endapan aluvium sungai tetapi memiliki kendala drainase buruk kecuali untuk sawah dan mempunyai kelas kemampuan lahan yang tinggi. Selain itu, di beberapa tempat juga dapat dijumpai Tanah Grumusol (*Haplusterts*) yang cukup subur. Sifat khas tanah Grumusol adalah melumpur pada saat musim hujan dan merekah--rekah pada musim kemarau, sehingga sulit untuk diolah. Karakteristik yang demikian menyebabkan dataran fluvial ini mempunyai beragam penutupan/penggunaan lahan, seperti sawah, ladang, permukiman, dan padang rumput.

Dataran fluvial di Bali – Nusa Tenggara berada di bawah kondisi iklim tropika semi-arid dengan suhu panas tropikal, sehingga sumber daya air permukaan dan air tanah cukup beragam. Beberapa sungai besar mengalir sepanjang tahun (perennial) dan sebagian sungai yang lebih kecil hanya mengalir pada musim penghujan (inter-mitten). Sumber daya mineral umumnya tidak ada, sedangkan keanekaragaman hayati relatif rendah. Masyarakat yang tinggal di wilayah dataran fluvial umumnya bertani atau berladang dan berternak, tetapi sebagian agak tertinggal pendidikannya, disebabkan karena minimnya aksesibilitas atau masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

Ancaman yang ada di ekoregion ini adalah banjir di musim penghujan, kekeringan dan kebakaran di musim kemarau, tsunami di dataran fluvial bagian selatan, serta kemiskinan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan karakteristik tersebut, ekoregion ini mempunyai jasa ekosistem sebagai wilayah pertanian dan peternakan yang dapat mendukung ketahanan pangan.

4. Ekoregion Dataran Pantai Bali-Lombok

Ekoregion Dataran Pantai Bali-Lombok melingkupi sekitar 6,32% wilayah Kabupaten Badung dengan sebaran di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Dataran pantai tersusun oleh aluvium marin sebagai hasil proses pengendapan sedimen oleh arus dan gelombang laut di sepanjang marin, termasuk di daerah muara sungai (*estuarin*). Dataran ini menempati areal dengan elevasi rendah di sepanjang pantai.

Tanah yang mendominasi pada ekoregion ini umumnya tanah--tanah hidromorfik (*Endoaquepts, Endoaquents*) yang sebagian dipengaruhi oleh air laut dan sebagian lagi oleh air payau yang berpotensi membentuk lapisan berkadar pirit tinggi, yang berpotensi menimbulkan masalah tanah sulfat masam. Di sebagian tempat masih dapat dijumpai tanah Regosol (*Ustipsamments*) yang berkembang dari proses aluvium marin berupa endapan kasar/pasir. Umumnya mempunyai kesuburan sedang, begitu pula dengan kelas kemampuan lahannya. Karakteristik yang demikian menyebabkan dataran marin ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan lahan agak beragam, seperti hutan mangrove (bakau), padang rumput, ladang dan permukiman.

Dataran Marin di Bali – Nusa Tenggara berada di bawah kondisi iklim tropika semi-arid dengan suhu panas tropikal marin. Dengan kondisi iklim yang demikian sumber daya air permukaan dan air tanah cukup baik di musim penghujan namun agak terbatas di musim kemarau. Sumber daya mineral umumnya tidak ada dan mempunyai keanekaragaman hayati yang rendah. Masyarakat yang tinggal di wilayah dataran marin ini umumnya nelayan, berladang, dan berternak. Sebagian dari mereka pendidikannya agak tertinggal, disebabkan karena minimnya aksesibilitas atau masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

Ancaman yang ada di ekoregion ini antara lain kerusakan hutan mangrove, banjir di musim hujan, dan pertumbuhan permukiman yang dapat merusak ekosistem. Berdasarkan karakter wilayahnya, ekoregion ini mempunyai jasa ekosistem berupa lahan pertanian dan perikanan darat (tambak) sehingga dapat untuk mendukung ketahanan pangan.

5. Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok

Bukit Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan merupakan Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok yang melingkupi sekitar 22,13% wilayah Kabupaten Badung. Perbukitan karst/solusional tersusun oleh batu kapur atau batu gamping (*limestone*) yang sebelumnya terbentuk dari dasar laut dangkal, kemudian terangkat ke permukaan berkat adanya tenaga tektonik. Karena sifat batuan yang mudah larut oleh air hujan, maka di Bali – Nusa Tenggara yang mempunyai

iklim tropika semi-arid dengan suhu panas tropikal masih mampu membentuk perbukitan yang mempunyai bentuk unik sebagai hasil proses pelarutan yang dinamakan perbukitan solusional/karst. Perbukitan ini diselingi oleh dataran atau cekungan antar bukit dan menempati elevasi sedang (< 300 m).

Tanah yang umumnya dijumpai lebih banyak oleh Tanah *Terarosa* yang berasal dari bahan induk batu kapur yang relatif miskin hara, tanah lain yang juga dijumpai adalah Tanah Litosol yang memiliki solum dangkal akibat proses pelapukan yang sangat lambat serta miskin unsur hara dengan tingkat kemasaman yang rendah, sehingga tanah-tanah yang dijumpai pada ekoregion ini berada pada kelas kemampuan lahan yang rendah. Karakteristik yang demikian menyebabkan perbukitan karst ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan yang terbatas, seperti semak belukar, ladang dan permukiman.

Sumber daya air sangat terbatas di permukaan meskipun pada musim penghujan namun cukup melimpah di bawah tanah (sungai bawah tanah), dengan kualitas bervariasi dari sedang hingga rendah disebabkan oleh kandungan karbonat yang tinggi serta adanya bakteri *colli*.

Sumber daya mineral umumnya berupa batu galian batugamping (golongan C) sedangkan keanekaragaman hayati terbatas pada flora fauna yang adaptif terhadap pada tanah basa (*jati, mahoni, sengon*). Masyarakat yang tinggal di wilayah ini umumnya bertani atau berladang dan berternak, sedangkan tingkat pendidikan mereka umumnya tertinggal, baik disebabkan karena minimnya aksesibilitas atau masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

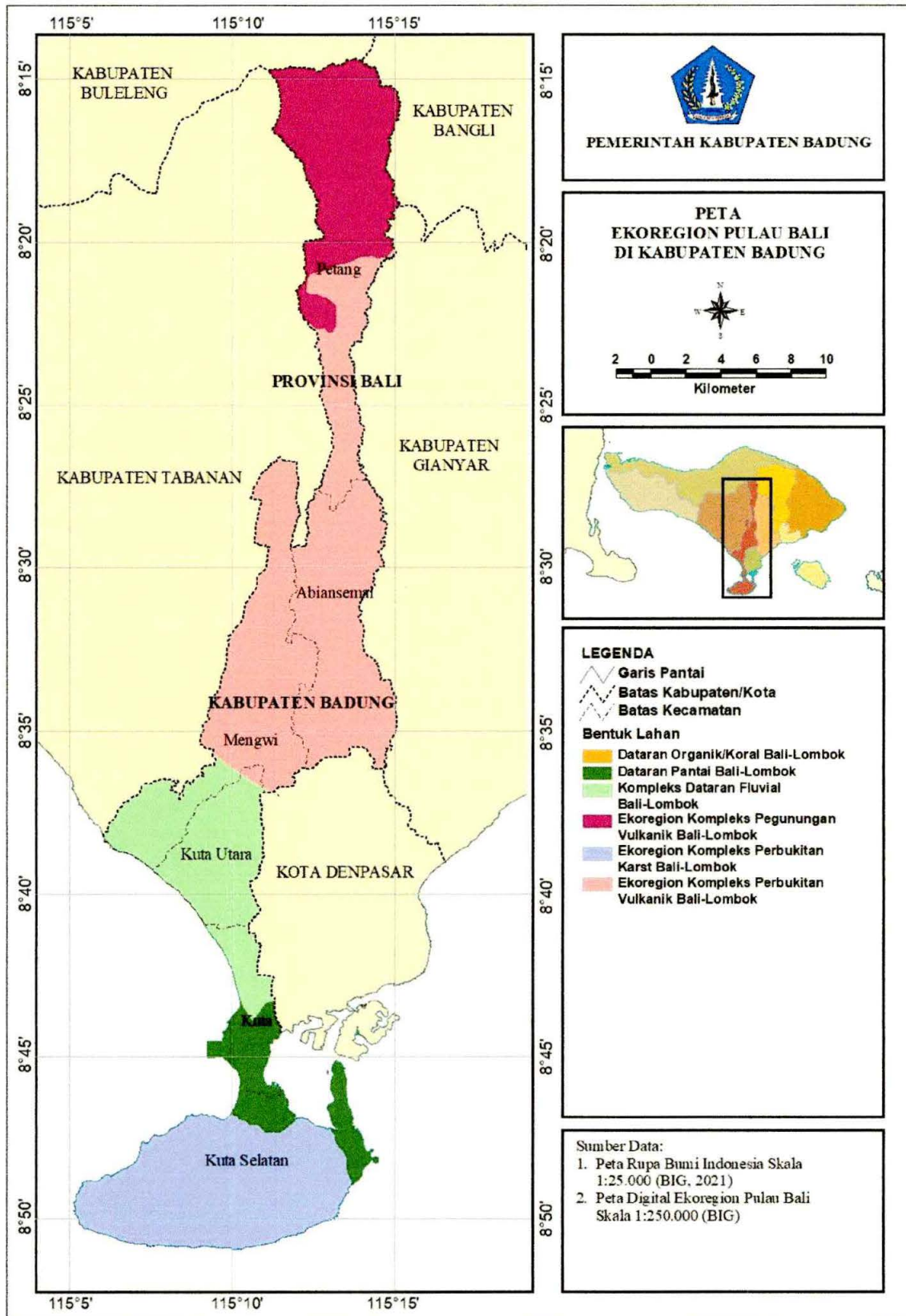
Ancaman yang ada di ekoregion ini antara lain adalah kekeringan karena terbatasnya air permukaan, kekritisian lahan karena tipisnya solum tanah, atau subsiden/runtuhnya permukaan tanah dimana di bawahnya terdapat gua kapur. Berdasarkan karakter wilayahnya, ekoregion ini mempunyai jasa ekosistem berupa penyerapan CO₂ di udara (carbon sink), sehingga dapat membantu menurunkan pemanasan global secara alam.

Tabel 2.8.
Distribusi Ekoregion Pulau Bali di Wilayah Kabupaten Badung

No	Nama Wilayah Ekoregion	Luas (Ha)	Sebaran
1	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok	6.347,86	Kecamatan Petang
2	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanin Bali-Lombok	15.842,12	Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara
3	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali-Lombok	6.330,04	Kecamatan Mengwi, Kuta, Kuta Uatara
4	Ekoregion Dataran Pantai Bali Lombok	2.516,78	Kecamatan Kuta, Kuta selatan
5	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali-Lombok	8.815,68	Kecamatan Kuta Selatan
	Jumlah	39.834,49	

Sumber: Peta Ekoregion Bali Nusa Tenggara Skala 1.:250.000 (Badan Informasi Geospasial) dengan Penyesuaian Garis Pantai

Gambar 2.12.
Peta Ekoregion Pulau Bali di Kabupaten Badung



2) Karakteristik Vegetasi Alam

Vegetasi adalah keseluruhan tutupan tumbuhan pada suatu kawasan yang terdiri atas mosaik komunitas tumbuhan dalam suatu lanskap. Komunitas tumbuhan adalah kumpulan populasi berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah dan kelompok tersebut terjadi secara berulang-ulang. Kelompok tersebut dapat dideskripsikan dengan baik dengan mencatat identitas dan bentuk pertumbuhan spesies yang paling melimpah, spesies yang berdimensi besar, atau spesies paling unik dalam komunitasnya (Mueller-Dombois and Fosberg, 1998).

Berbagai tipe vegetasi terdapat di Bali, mulai dari tipe vegetasi yang selalu basah hingga kering musiman, terbentang dari daerah pantai yang terendam hingga puncak gunung. Sebaran tipe vegetasi sepanjang musim hujan bertepatan dengan kisaran tipe curah hujan B menurut Schmidt dan Ferguson. Tipe vegetasi kering musiman tersebar di seluruh rentang tipe curah hujan Schmidt dan Ferguson C-E dan terbatas pada wilayah dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.000 mdpl. Hutan monsun terdapat pada ketinggian 0-800 m (Monk et al., 1997).

Karakteristik vegetasi alami Pulau Bali di wilayah Kabupaten Badung menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1272/MENLHK/SETJEN/ PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000, meliputi:

(1) Vegetasi Hutan Pegunungan Bawah

Hutan pegunungan bawah adalah salah satu formasi hutan tropika basah yang terbentuk di wilayah pegunungan. Salah satu cirinya, hutan ini kerap diselubungi awan, biasanya pada ketinggian atap tajuk (kanopi)nya. Pepohonan dan tanah di hutan ini acapkali tertutupi oleh lumut, yang tumbuh berlimpah-limpah. Pohon-pohon banyak digelayuti lumut, epifit, termasuk berbagai jenis anggrek. Tipe vegetasi ini terdapat di Kecamatan Petang, di atas ketinggian 1000 m dpl. Pada zona ini lebih banyak oleh beberapa famili tumbuhan diantaranya *Anacardiaceae*, *Burseraceae*, *Capparaceae*, *Combretaceae*, *Dilleniaceae*, *Dipterocarpaceae*, dan *Myristicaceae*.

(2) Vegetasi Hutan Pamah (non dipterokarpa)

Vegetasi hutan pamah merupakan vegetasi dataran rendah yang cukup tinggi sebarannya, khususnya di bagian tengah Kabupaten Badung. Terletak pada ketinggian antara 0-1000 m di atas permukaan laut. Jenis dominan dari tegakan non dipterokarpa antara lain *Aglaiia sp.*, *Madhuca sp.*, *Diospyros sp.* dan *Dillenia sp.*

(3) Vegetasi Hutan Pamah Monsun Malar Hijau

Dalam wilayah monsun, hutan dapat mencakup hutan gugur musiman dan hutan hijau sepanjang tahun, dimana tumbuhan tidak menggugurkan daunnya bahkan selama periode kekeringan parah. Struktur hutan monsun yang selalu hijau secara umum mirip dengan hutan hujan yang selalu hijau, tetapi perawakannya

lebih pendek dan stratifikasinya tidak terlalu rumit. Tipe vegetasi ini tersebar di Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, dan Kuta.

(4) Vegetasi Mangrove Monsun

Hutan mangrove bersama komunitas nipah (*Nypa fruticans*) dan komunitas herba *Acrostichum aureum* sering disebut sebagai hutan rawa pasang surut dan rawa asin. Kawasan hutan mangrove mencakup wilayah kecil yang ditemukan di Teluk Benoa Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Komposisi spesies dan struktur hutan mangrove bervariasi sesuai dengan kondisi habitat, mulai dari komunitas kerdil dan jarang yang terdiri atas satu spesies (*Rhizophora stylosa*) yang tumbuh di terumbu karang (Budiman *et al.*, 1986) hingga hutan campuran yang tinggi dan lebat yang tumbuh di lumpur dalam. Pasokan air tawar, yang mempengaruhi salinitas, sifat substrat, dan pola pergerakan pasang surut terkait dengan frekuensi penggenangan, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan zona vegetasi. Pada lumpur yang lebih padat dan keras, spesies palem *Nypa fruticans* biasanya dominan. Pada substrat terbuka dan kering, spesies famili sedge juga dapat ditemukan. *Fimbristylis argentea*, *Fimbristylis politrichoides* (seringkali sangat melimpah), dan *Cyperus javanicus* (Kern, 1974).

(5) Vegetasi Litoral

Vegetasi litoral umumnya berkembang di daerah pantai berpasir atau berbatu dengan air asin dangkal, tidak terpengaruh oleh sungai besar. Tipe vegetasi ini bersama dengan tipe vegetasi mangrove termasuk dalam vegetasi yang dipengaruhi oleh air asin. Tipe vegetasi ini terdapat di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan.

(6) Vegetasi Hutan Batugamping Pamah Monsun Mengangas Pada Bentang Alam Karst

Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst adalah jenis vegetasi yang tumbuh pada daerah karst dengan kondisi iklim monsun dan curah hujan yang meranggas. Vegetasi ini biasanya tumbuh pada daerah yang memiliki batuan kapur dan terdapat pada dataran rendah hingga ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Sebaran tipe vegetasi ini terdapat di Bukit Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan.

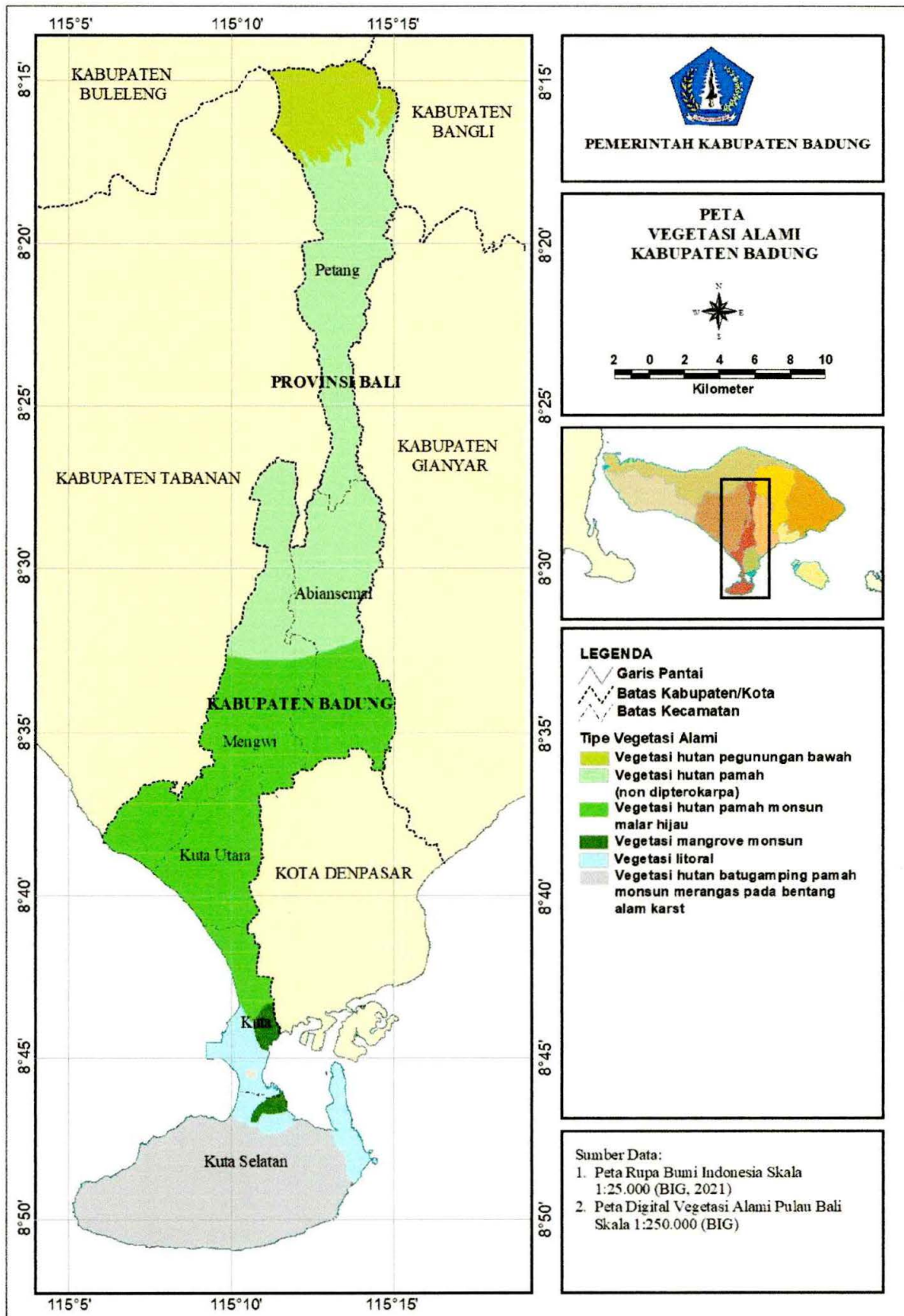
Tabel 2.9.
Distribusi Tipe Vegetasi Alami Pulau Bali di Wilayah Kabupaten Badung

No	Tipe Vegetasi	Luas (Ha)	Sebaran
1	Vegetasi hutan pegunungan bawah	2.813,06	Kecamatan Petang
2	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarma)	12.905,67	Kecamatan Petang, Mengwi, Abiansemal
3	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	12.783,30	Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara
4	Vegetasi mangrove monsun	447,67	Kecamatan Kuta, Kuta Selatan

No	Tipe Vegetasi	Luas (Ha)	Sebaran
5	Vegetasi litoral	2.675,25	Kecamatan Kuta, Kuta Selatan
6	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst	8.821,62	Kecamatan Kuta Selatan
Jumlah		40.428,58	

Sumber : Peta Ekoregion Bali Nusa Tenggara Skala 1:250.000 (Badan Informasi Geospasial) dengan Penyesuaian Garis Pantai

Gambar 2.13.
Peta Vegetasi Alami Pulau Bali di Kabupaten Badung



F. Pola Penggunaan Lahan

Berdasarkan data digital tutupan lahan skala 1:250.000 dari BIG, terdapat tiga jenis tutupan lahan yang mendominasi wilayah Kabupaten Badung, yaitu Pertanian Lahan Kering Campuran, Permukiman, dan Sawah. Pertanian Lahan Kering Campuran terutama mendominasi wilayah Kecamatan Petang dan Kuta Selatan. Sawah mendominasi wilayah Kecamatan Mengwi dan Abiansemal. Sedangkan Permukiman mendominasi wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Utara.

Tutupan lahan Pertanian Lahan Kering Campuran pada tahun 2022 mencapai 30,85%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020. Tutupan lahan Sawah sebesar 28,95%, menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 30,29%. Sedangkan Permukiman sebesar 30,18%, meningkat dari 29,92% di tahun 2020.

Tutupan lahan hutan relatif kecil, terdiri atas Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Tanaman, dan Hutan Mangrove Sekunder. Tutupan lahan lainnya semuanya dengan porsi kurang dari 1%, meliputi Belukar, Tanah Terbuka, Savana/Padang Rumput, Tubuh Air, Belukar Rawa, Pertanian Lahan Kering, Tambak, dan Bandara/Pelabuhan.

Proporsi tutupan lahan bervegetasi pada tahun 2022 (meliputi Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Tanaman, Belukar, Hutan Mangrove Sekunder, Belukar Rawa, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campuran, dan Sawah) sebesar 68,62% dari luas total daratan (tidak termasuk tubuh air). Proporsi lahan bervegetasi cenderung menurun dari 70,32% pada tahun 2018 dan 68,89% pada tahun 2020. Sedangkan proporsi lahan terbangun (permukiman dan bandara/Pelabuhan) terhadap total luas wilayah pada tahun 2022 sebesar 30,88%, meningkat dari 28,95% di tahun 2018 dan 30,54% di tahun 2020.

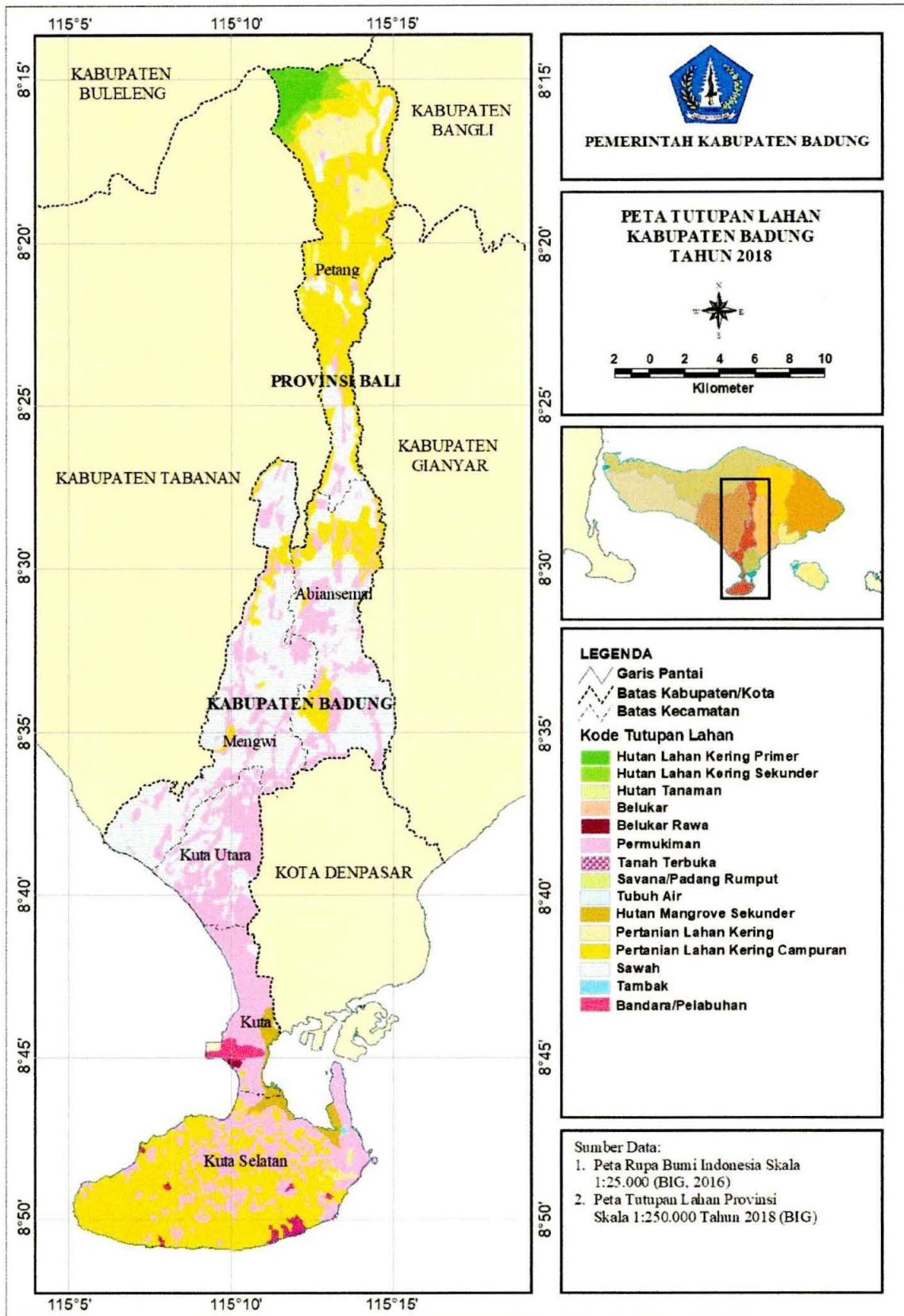
Tabel 2.10.
Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2018, 2020, dan 2022

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)			Persentase (%)		
		2018	2020	2022	2018	2020	2022
1	Hutan Lahan Kering Primer	637,35	637,35	637,35	1,60	1,60	1,60
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	429,47	419,53	358,90	1,08	1,05	0,90
3	Hutan Tanaman	13,61	13,61	23,75	0,03	0,03	0,06
4	Belukar	6,42	217,41	304,90	0,02	0,55	0,77
5	Pemukiman	11.277,77	11.915,27	12.027,82	28,33	29,92	30,18
6	Tanah Terbuka	270,19	207,35	181,21	0,68	0,52	0,45
7	Savana/Padang Rumput	93,51	4,13	130,72	0,23	0,01	0,33
8	Tubuh Air	16,66	57,10	57,10	0,04	0,14	0,14
9	Hutan Mangrove Sekunder	530,69	597,87	589,59	1,33	1,50	1,48
10	Belukar Rawa	26,53	-	-	0,07	-	-
11	Pertanian Lahan Kering	1.892,76	1.427,49	1.444,72	4,76	3,58	3,62

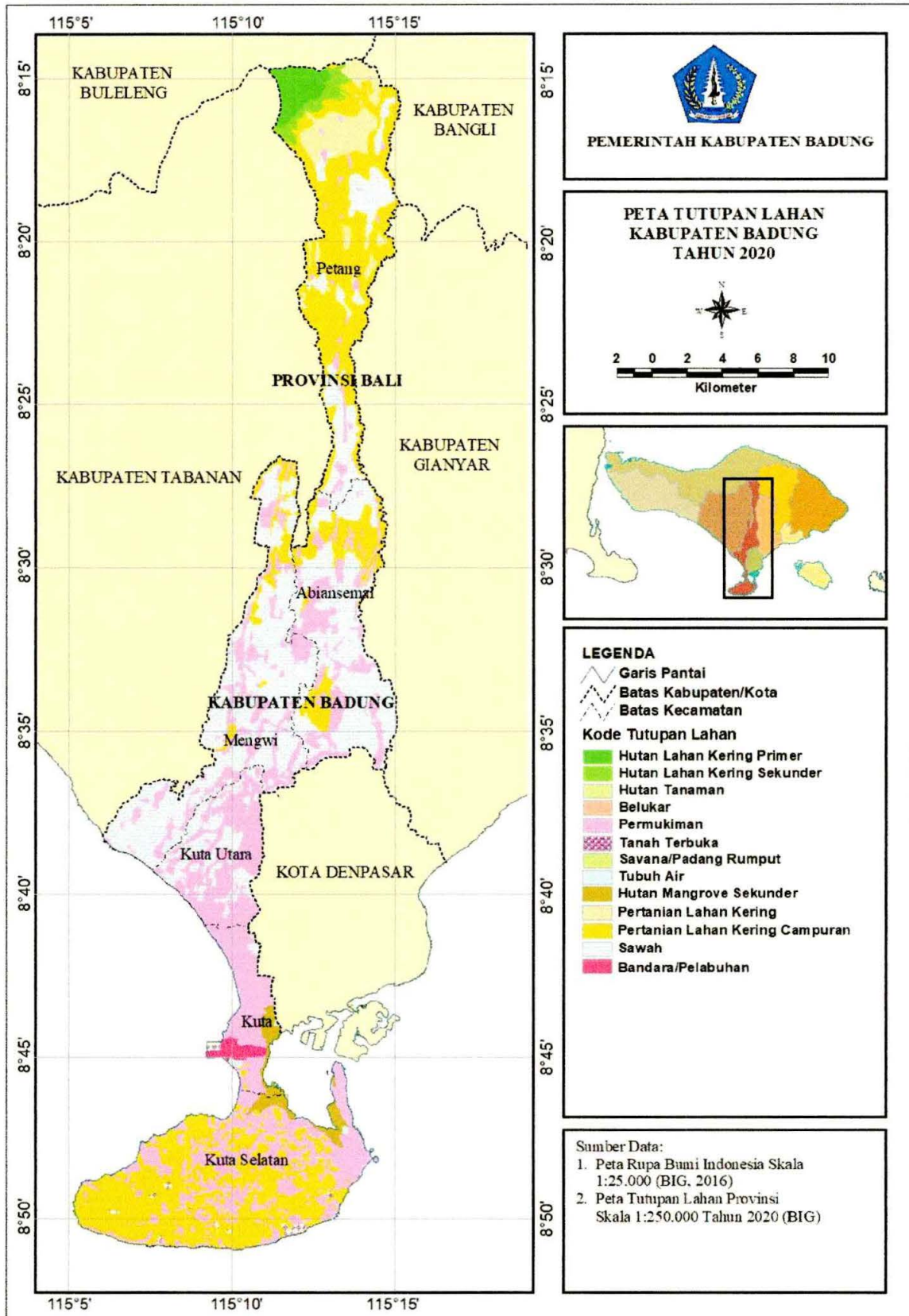
No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)			Persentase (%)		
		2018	2020	2022	2018	2020	2022
12	Pertanian Lahan Kering Campuran	12.498,13	12.015,45	12.282,69	31,40	30,17	30,82
13	Sawah	11.849,22	12.064,58	11.536,28	29,77	30,29	28,95
14	Tambak	15,80	-	-	0,04	-	-
15	Bandara/Pelabuhan	243,75	248,87	280,70	0,61	0,62	0,70
	Jumlah	39.801,85	39.825,99	39.855,73	100	100	100

Sumber: Peta Digital Tutupan Lahan Provinsi Bali Skala 1:250.000 Tahun 2018, 2020 dan 2022

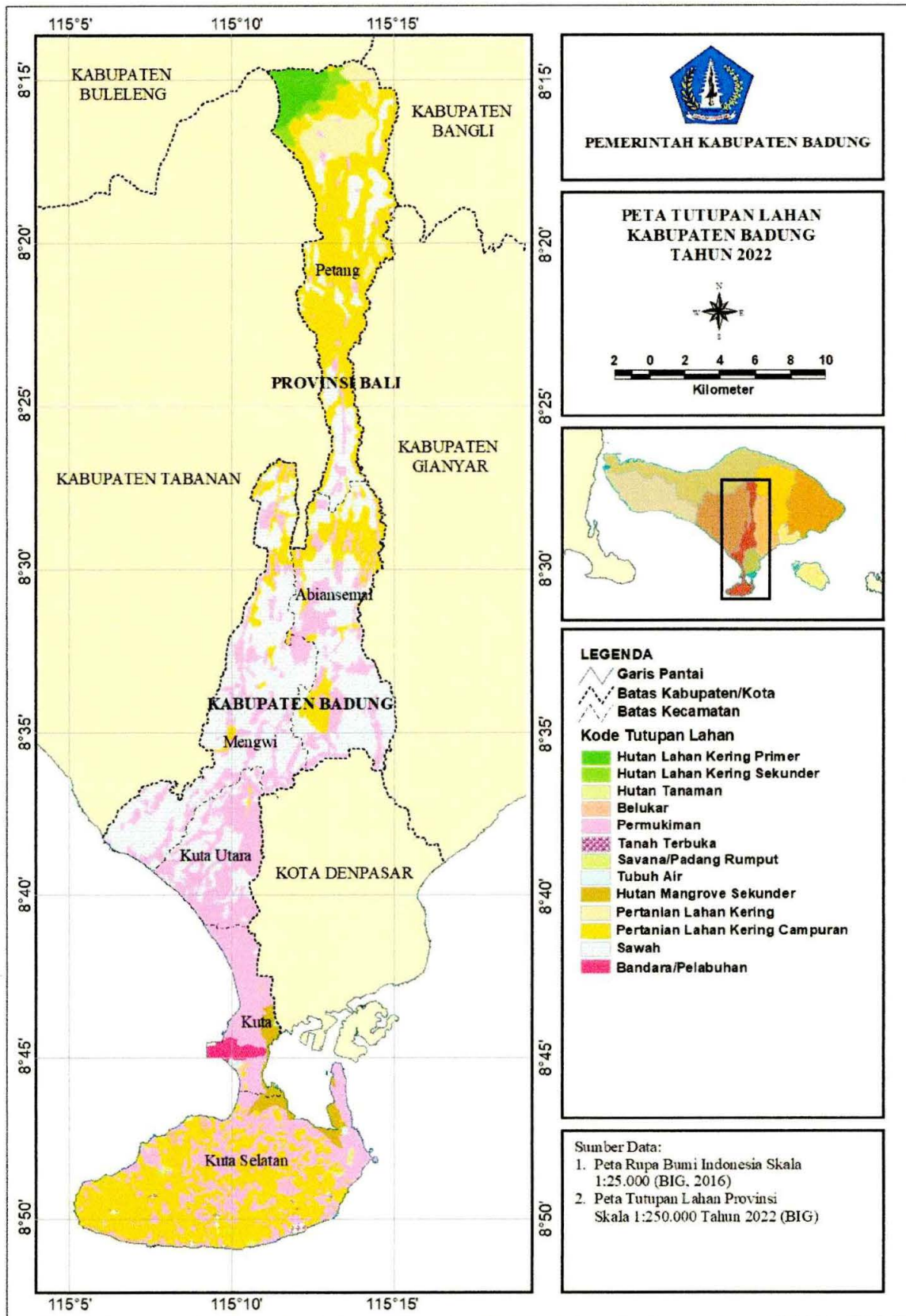
Gambar 2.14.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2018



Gambar 2.15.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2020



Gambar 2.16.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2022



G. Persentase Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan proses suatu area atau lahan yang sebelumnya digunakan untuk satu tujuan tertentu, kemudian diubah atau dialihkan untuk tujuan yang berbeda. Proses ini sering kali terjadi sebagai hasil dari perkembangan perkotaan, pertumbuhan ekonomi atau perubahan kebutuhan masyarakat. Pada banyak kasus, alih fungsi lahan terjadi ketika lahan pertanian atau lahan kosong atau hutan diubah menjadi lahan komersial, perumahan ataupun industri.

Alih fungsi lahan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah Bali pada umumnya dan juga di Kabupaten Badung pada khususnya. Isu alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian telah mencuat sejak beberapa dekade terakhir seiring dengan pesatnya pertumbuhan pariwisata. Alih fungsi lahan terutama terkait dengan peningkatan penyusutan lahan pertanian dengan laju yang semakin meningkat.

Pertanian sawah di Bali tidak hanya penting untuk menopang ketahanan pangan tetapi jauh daripada itu, pertanian sawah di Bali merupakan akar atau basis dari kebudayaan daerah dan kearifan lokal yang dilandasi oleh agama Hindu. Oleh karena itu, penyusutan lahan pertanian secara sistematis sangat mengancam kesetarian budaya dan kearifan lokal Bali yang adiluhung. Luas alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Badung relatif tinggi. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 2.10, selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 976,42 Ha dimana lahan pertanian yang mengalami alih fungsi paling luas adalah Pertanian Lahan Kering (23,67%).

H. Hidrologi

1) Sungai

Di wilayah Kabupaten Badung mengalir dua sungai besar yang merupakan sungai lintas kabupaten/kota, yaitu Tukad Yeh Penet dan Tukad Ayung. Selain itu, juga terdapat sejumlah sungai parenial yang bermuara di Kecamatan Mengwi, Kuta Utara, dan Kuta. Sedangkan sungai di Kecamatan Kuta Selatan semuanya sungai intermiten. Sungai-sungai parenial di Kabupaten Badung sebagai berikut:

1. Tukad Yeh Penet.

Tukad Yeh Penet bermuara di perbatasan Kabupaten Badung dan Tabanan. Alirannya meliputi wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal, dan Petang. Tukad Yeh Penet mempunyai sejumlah anak dan anak-anak sungai, sebagai berikut:


- a) Tukad Ulaman, mengalir di Desa Kekeeran, Mengwitani, dan Mengwi. Sungai ini mempunyai satu anak sungai order 3 yaitu:
 - Tukad Ukian, mengalir di Desa Mengwitani, Mengwi, dan Werdi Bhuana.
- b) Tukad Jejek, mengalir di Desa Kekeeran, Mengwitani, dan Mengwi.
- c) Tukad Sauh, mengalir di Desa Kekeeran, Mengwitani, dan Kapal.
- d) Tukad Tangeb, mengalir di Desa Kapal.
- e) Tukad Dangkang, mengalir di Desa Gulingan, Baha, Sobangan, Ayunan, Sembung, dan Kuwun. Tukad Dangkang mempunyai dua anak sungai order 3 yaitu:

- Tukad Bengawan, mengalir di Desa Gulingan, Baha, dan Sobangan.
- Tukad Sayan, mengalir di Desa Baha, Sobangan, dan Sembung. Tukad Sayan memiliki anak sungai sebagai order 4, yaitu:
 - Tukad Bangka, mengalir di Desa Sobangan, Werdi Bhuana, dan Sembung.
- f) Tukad Cepung, mengalir di Desa Pangsan dan Petang. Tukad Cepung mempunyai satu anak sungai order 3 yaitu:
 - Tukad Sanga, mengalir di Desa Petang dan Sulangai.
- g) Telabah Carangsari, mengalir di Desa Carangsari.

2. Tukad Ayung.

Tukad Ayung bermuara di Kabupaten Badung. Alirannya paling hilir di Kabupaten Badung berada di perbatasan Desa Darmasaba dan Sibang Gede. Kearah hulu alirannya meliputi Desa Sibang Kaja, Mambal, Abiansemal, Bongkasa, Bongkasa Pertiwi, Carangsari, Getasan, Pangsan, Petang, dan Beloksidan. Tukad Ayung mempunyai sejumlah anak dan anak-anak sungai, sebagai berikut:

- a) Tukad Anggabaya, mengalir di Desa Sibang Gede. Tukad Anggabaya mempunyai satu anak sungai sebagai order 4 yaitu:
 - Tukad Kauh, mengalir di Desa Sibang Gede, Sibang Kaja, Mekar Bhuana, dan Mambal.
- b) Tukad Titis, mengalir di Desa Jagapati, Angantaka, dan Sedang.
- c) Tukad Batangbuah, mengalir di Desa Sibang dan Sibang Kaja.
- d) Tukad Bangiang, mengalir di Desa Darmasaba, Sibang Kaja, Penarungan, dan Abiansemal.
- e) Tukad Gerubukan, mengalir di Desa Sibang Kaja dan Mambal
- f) Tukad Jempeng, mengalir di Desa Abiansemal, Bongkasa, Taman dan Bongkasa Pertiwi. Tukad Jempeng mempunyai dua anak sungai order 3 yaitu:
 - Tukad Medid, mengalir di Desa Abiansemal, Punggul, dan Taman Tukad Medid mempunyai 3 anak sungai sebagai order 4, yaitu:
 - Tukad Tegalanting, mengalir di Desa Blahkiuh, Punggul, dan Selat. Tukad Tegalanting mempunyai satu anak sungai sebagai order 5 yaitu:
 - Tukad Adeng, mengalir di Desa Blahkiuh, Sangeh, Selat, dan Carangsari.
 - Tukad Mumul, mengalir di Desa Punggul, Selat, Taman, dan Carangsari.
 - Pangkung Tabah, mengalir di Desa Taman, Selat, dan Carangsari. Pangkung Tabah mempunyai satu anak sungai sebagai order 5 yaitu:
 - Pangkung Jempeng, mengalir di Desa Taman, Carangsari, Getasan, dan Pangsan.
- g) Tukad Buangga, mengalir di Desa Pangsan dan Petang.

- 
- h) Tukad Bangkung, mengalir di Desa Petang, Sulangai, Pelaga, dan Beloksidan. Tukad Bangkung mempunyai empat anak sungai sebagai order 3, yaitu:
- Tukad Ngongkong, mengalir di Desa Petang, Sulangai, dan Pelaga. Tukad Ngongkong mempunyai empat anak sungai sebagai order 4, yaitu:
 - Tukad Kilap, mengalir di Desa Sulangai dan Pelaga Tukad Kilap mempunyai dua anak sungai sebagai order 5, yaitu:
 - Tukad Cengkedek, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Duk, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Kayung, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Sanuah, mengalir di Desa Pelaga.
 - Pangkung Pelaga, mengalir di Desa Pelaga.
 - Pangkung Penataran, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Jempanang, mengalir di Desa Pelaga.
 - Tukad Bon, mengalir di Desa Beloksidan.
- i) Tukad Mengani, mengalir di Desa Beloksidan. Tukad Mengani mempunyai satu anak sungai sebagai order 3, yaitu:
- Tukad Bade, mengalir di Desa Beloksidan.
3. Tukad Surungan, bermuara dan mengalir di perbatasan Desa Cemagi dan Munggu.
4. Pangkung Tebin, bermuara dan mengalir di Desa Munggu.
5. Tukad Baosan, bermuara di perbatasan Desa Munggu dan Pererenan dan aliran hulunya di Desa Tumbakbayuh.
6. Tukad Pangi, bermuara di Desa Pererenan dan alirannya meliputi Desa Tumbakbayuh, Buduk, dan Abianbase. Tukad Pangi mempunyai satu anak sunyai sebagai order 2 yaitu:
- a) Tukad Miyah, mengalir di Desa Pererenan, Cunggu, Tumbakbayuh, dan Buduk.
7. Tukad Cunggu, bermuara di perbatasan Desa Cunggu dan Tibubeneng, dan alirannya meliputi Dalung, Buduk, dan Abianbase.
8. Tukad Yeh Poh, bermuara di perbatasan Desa Tibubeneng dan Kerobokan Kelod, dan alirannya meliputi Desa Kerobokan, Kerobokan Kaja, dan Dakung. Tukad Yeh Poh mempunyai satu anak sunyai sebagai order 2 yaitu:
- a) Tukad Umalas, mengalir di Desa Kerobokan Kelod, Kerobokan, Kerobokan Kaja, Dalung, Abianbase, Kapal, dan Lukluk.
- b) Tukad Semat, mengalir di Desa Tibubeneng dan Dalung.
9. Tukad Mati, bermuara di Teluk Bena, Desa Tuban dan alirannya meliputi Desa Kuta, Legian, dan Seminyak.

10. Tukad Badung, bermuara di Kabupaten Badung. Alirannya di Kabupaten Badung berada di Desa Sading. Anak sungai Badung di Kabupaten Badung yaitu:
- Tukad Langan, mengalir di Desa Sempidi, Sading, dan Lukluk.
 - Tukad Tegan, mengalir di Desa Lukluk, Darmasaba, dan Penarungan.
11. Tukad Buluh, sebagai anak sungai Tukad Singapadu, mengalir di Desa Angantaka dan Sedang. Tukad Buluh mempunyai satu anak sungai sebagai orber 3, yaitu:
- Tukad Batangbuah, mengalir di Desa Sedang dan Mekar Bhuana.

2) Mata Air

Berdasarkan JICA (2006), di Provinsi Bali terdapat 1.273 buah mata air dan menurut Dinas PU Provinsi Bali (2011) mata air yang telah terinventarisasi potensi airnya sebanyak 570 buah. Mata air yang telah terinventarisasi potensi airnya di Kabupaten Badung berjumlah 21 buah dengan debit air total 501,90 liter/detik atau 15,83 juta m³ pertahun.

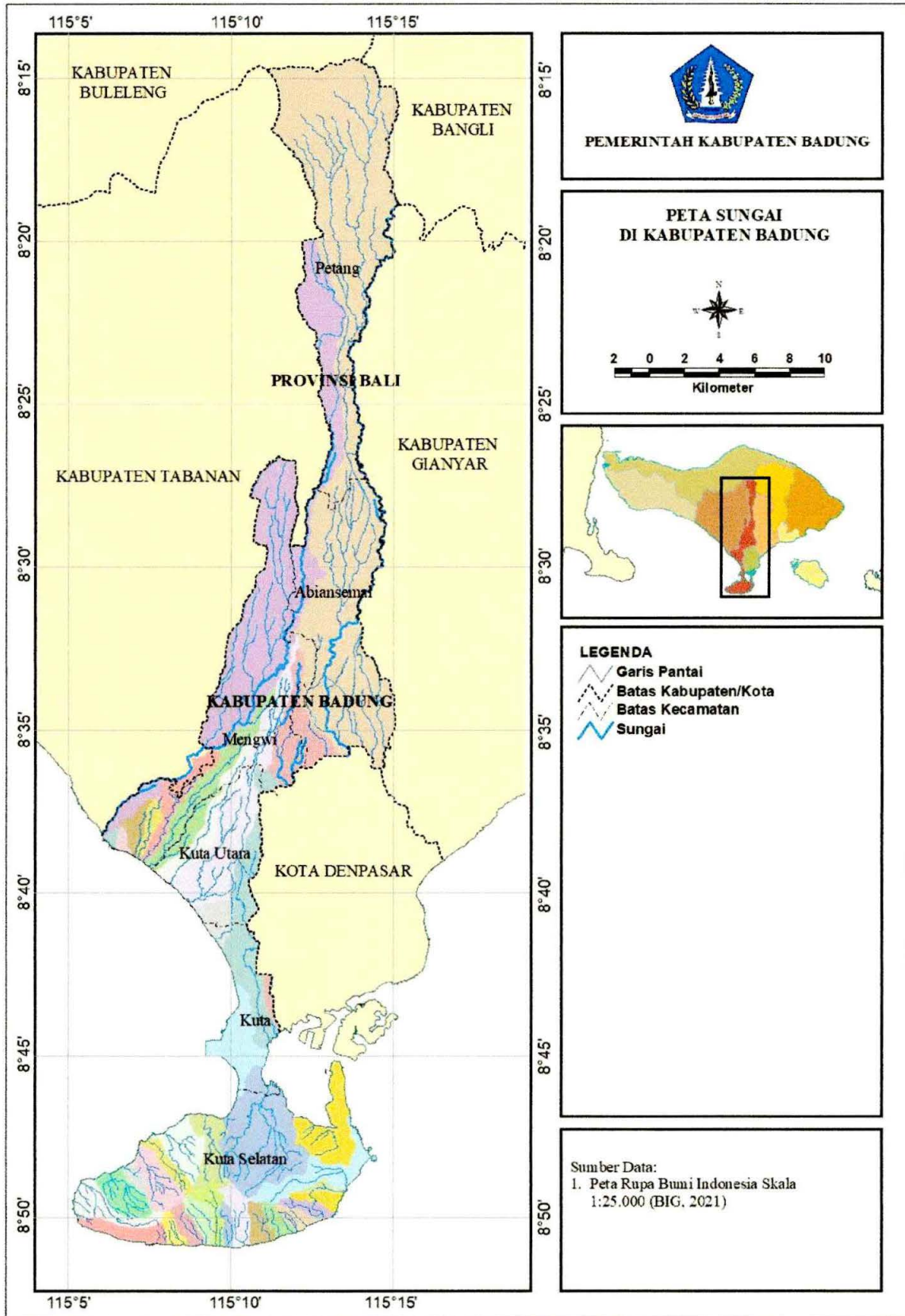
Sumber daya air yang bersumber dari mata air dimanfaatkan sebagai air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk pengairan atau irigasi pertanian (sawah). Pemanfaatan air mata air untuk irigasi pertanian di Kabupaten Badung.

Tabel 2.11.
Mata Air dan Luas Area yang Dialiri di Kabupaten Badung

No	Nama Mata Air	Luas Area yang Dialiri (Ha)
1	MA Penataran I dan II	109,00
2	MA Sulangai	-
3	MA Belong	37,32
4	MA Dungus	15,21
5	MA Mumbul	-
6	MA Sangeh	17,14
7	MA Blahkiuh	13,81
8	MA Uma Poh	22,02
9	MA Apuan	67,83
10	MA Taman I	86,62
11	MA Taman II	52,16
12	MA Pacung I	97,93
13	MA Pacung II	10,80
14	MA Sudamala	-
15	MA Gangga	126,66
16	MA Dukun	47,37
17	MA Sagu	15,87
18	MA Bukti	88,76
19	MA Batan Badung	90,97
20	MA Guming	37,38
21	MA Panggul	17,83

Sumber: Dinas PU Provinsi Bali (2011)

Gambar 2.17.
Peta Sungai di Kabupaten Badung



3) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Aliran air tanah dimulai pada daerah resapan air tanah atau sering juga disebut sebagai daerah imbuhan air tanah (*recharge zone*). Daerah ini adalah wilayah air yang berada di permukaan tanah baik air hujan ataupun air permukaan mengalami proses penyusupan (infiltrasi) secara gravitasi melalui lubang pori tanah/batuan atau celah/rekahan pada tanah/batuan. Proses penyusupan ini akan berakumulasi pada satu titik, air tersebut menemui suatu lapisan atau struktur batuan yang bersifat kedap air (*impermeabel*). Titik akumulasi ini akan membentuk suatu zona jenuh air (*saturated zone*) yang seringkali disebut sebagai daerah luhan air tanah (*discharge zone*). Perbedaan kondisi fisik secara alami akan mengakibatkan air dalam zonasi ini akan bergerak/mengalir baik secara gravitasi, perbedaan tekanan, kontrol struktur batuan dan parameter lainnya. Kondisi inilah yang disebut sebagai aliran air tanah. Daerah aliran air tanah ini selanjutnya disebut sebagai daerah aliran (*flow zone*).

Dalam perjalanannya aliran air tanah ini seringkali melewati suatu lapisan akuifer yang di atasnya memiliki lapisan penutup yang bersifat kedap air (*impermeable*) hal ini mengakibatkan perubahan tekanan antara air tanah yang berada di bawah lapisan penutup dan air tanah yang berada di atasnya. Perubahan tekanan inilah yang didefinisikan sebagai air tanah tertekan (*confined aquifer*) dan air tanah bebas (*unconfined aquifer*). Dalam kehidupan sehari-hari pola pemanfaatan air tanah bebas sering dalam bentuk penggunaan sumur gali oleh penduduk, sedangkan air tanah tertekan dalam sumur bor yang sebelumnya telah menembus lapisan penutupnya.

Air tanah bebas (*water table*) memiliki karakter berfluktuasi terhadap iklim sekitar, mudah tercemar dan cenderung memiliki kesamaan karakter kimia dengan air hujan. Kemudahannya untuk didapatkan membuat kecenderungan disebut sebagai air tanah dangkal. Sedangkan air tanah tertekan/air tanah terhalang seringkali disebut sebagai air sumur artesis (*artesian well*). Pola pergerakannya yang menghasilkan gradient potensial, mengakibatkan adanya istilah artesis positif; kejadian potensial air tanah ini berada di atas permukaan tanah sehingga air tanah akan mengalir vertikal secara alami menuju kesetimbangan garis potensial khayal ini. Artesis nol; kejadian garis potensial khayal ini sama dengan permukaan tanah sehingga muka air tanah akan sama dengan muka tanah. Terakhir artesis negatif; kejadian garis potensial khayal ini di bawah permukaan tanah sehingga muka air tanah akan berada di bawah permukaan tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi *dkk.*, 1986), terdapatnya air tanah dan produktivitas akuifer (akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis) di wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut:

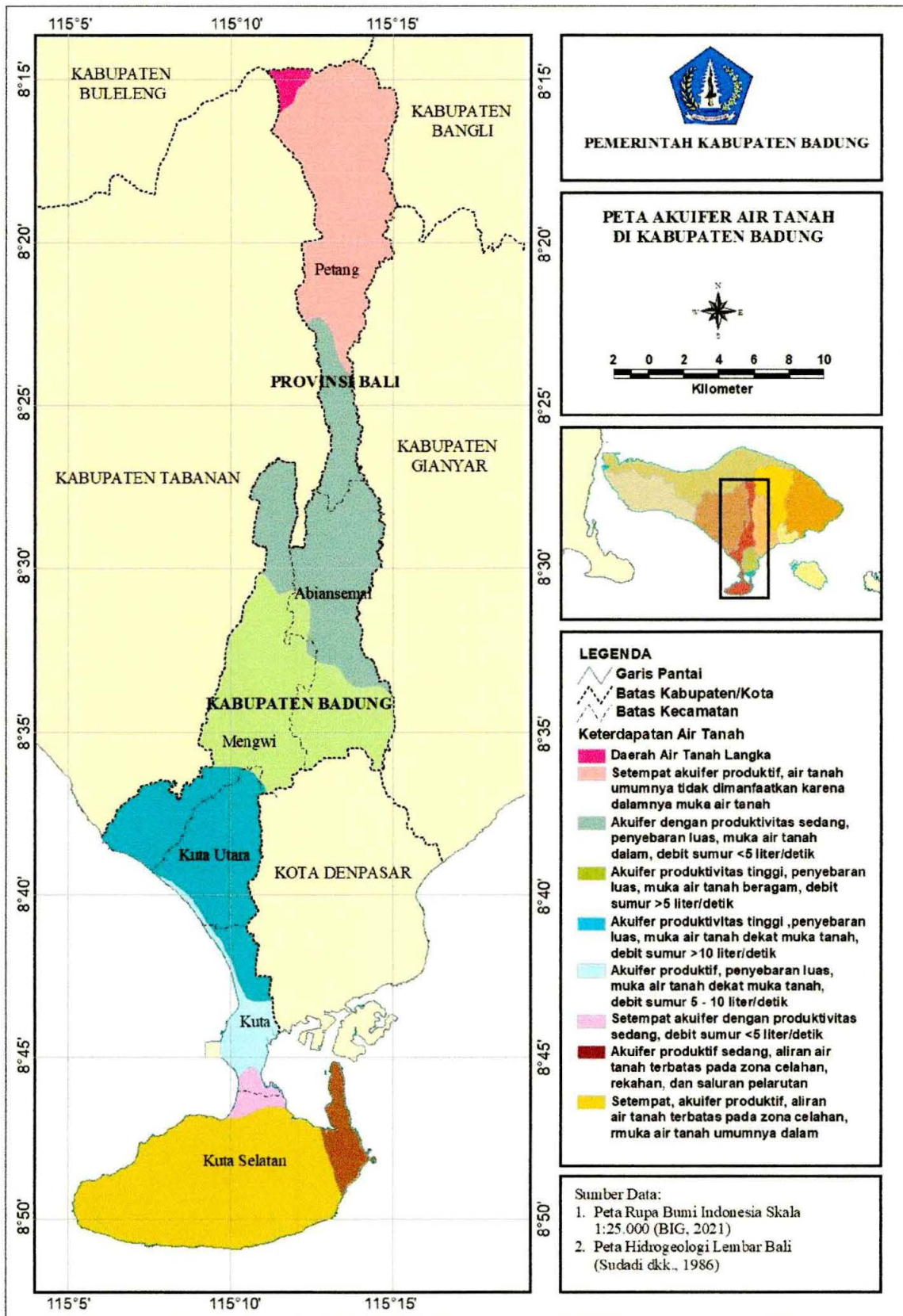
- Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya >10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi.

- Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5 liter/detik. Terdapat di Kecamatan Mengwi dan Abiansemal.
- Akuifer produktivitas sedang, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di Kecamatan Mengwi, Abiansemal, dan Petang.
- Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Terdapat di Kecamatan Patang.
- Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di Kelurahan Kuta, Tuban, dan daerah pantai Legian, Seminyak, Kerobokan Kelod, Tibubeneng, dan Canggu.
- Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di Kelurahan Tuban dan Jimbaran.
- Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya <5 liter/detik.
- Terdapat di daerah dataran rendah Kelurahan Benoa dan Tanjung Benoa.
- Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Kuta Selatan.

Menurut Badan Geologi (2008), potensi air tanah di wilayah Kabupaten Badung tersebar dalam dua Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Denpasar-Tabanan dan CAT Nusa Dua. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Secara umum air tanah akan mengalir sangat perlahan melalui suatu celah yang sangat kecil dan atau melalui butiran antar batuan.

Cekungan Air Tanah Denpasar-Tabanan merupakan CAT lintas kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem, dengan potensi air terbesar di Bali. Di wilayah Kabupaten Badung, CAT Denpasar-Tabanan tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Kuta Selatan. Sedangkan CAT Nusa Dua tersebar di kawasan Bukit, Kecamatan Kuta Selatan. Luas CAT Denpasar- Tabanan adalah 2.080 km² dengan potensi air tanah bebas 894 juta m³/tahun dan air tanah tertekan 8 juta m³/tahun. Sementara itu, luas CAT Nusa Dua adalah 99 km², dengan potensi air tanah bebas 38 juta m³/tahun dan tidak terdapat potensi air tanah tertekan.

Gambar 2.18.
Peta Aquifer Air Tanah di Kabupaten Badung



I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH bertujuan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri atas 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO₃-N), dan TSS. (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter NO₂, dan SO₂. (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) diukur berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter tutupan hutan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan/lahan, dan dengan menambahkan faktor koreksi berupa dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut. (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) diukur dengan parameter TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Secara keseluruhan, IKLH Kabupaten Badung mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Berdasarkan data perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Badung dari tahun 2018 hingga 2023, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, IKLH Kabupaten Badung mencapai angka 69,18, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 70,08 dan terus naik pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya di 70,85. Namun, setelah itu, terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan nilai 68,37, dan tren menurun berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan nilai masing-masing 67,12 dan 69,06.

Jika dilihat dari indikator-indikatornya, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama dari 49,33 di tahun 2018 menjadi 53,33 pada tahun 2022, namun mengalami sedikit penurunan pada 2023 dengan angka 52,86. Indeks Kualitas Udara, yang semula sangat tinggi di angka 99,16 pada 2018, menunjukkan fluktuasi dengan mencapai puncak pada 2020 di 94,07, tetapi turun menjadi 91,28 pada 2023. Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan penurunan yang lebih tajam, dari 61,63 pada 2018 hingga terendah di 29,46 pada 2021, namun mulai pulih pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 55,79 pada 2023.

Tabel 2.12.

Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Bali Tahun 2018 – 2022

IKLH dan Indikatornya	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH Provinsi Bali	66,62	63,09	71,99	70,70	70,89	71,38
Indeks Kualitas Air	48,50	65,33	64,33	54,29	53,50	55,17
Indeks Kualitas Udara	88,97	89,85	88,34	89,28	89,19	88,99

IKLH dan Indikatornya	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air Laut		52,65	69,75	85,14	88,49	86,05
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,56	41,34	40,59	42,11	43,36	45,22
IKLH Kabupaten Badung	69,18	70,08	70,85	68,37	67,12	69,06
Indeks Kualitas Air	49,33	50,00	49,33	63,33	53,33	52,86
Indeks Kualitas Udara	99,16	102,74	92,79	94,07	91,69	91,28
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,63	61,53	70,52	29,46	45,36	55,79

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

J. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

1) Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan untuk permukiman merupakan kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk serta dapat bertempat tinggal secara layak. Analisis daya dukung lahan sangat penting dalam perencanaan pembangunan atau perencanaan tata ruang karena dapat memperkirakan apakah ketersediaan lahan di wilayah tersebut mampu menampung kebutuhan lahan untuk permukiman hingga tahun perencanaan. Analisis daya dukung lahan untuk permukiman menggunakan konsep ketersediaan – kebutuhan lahan.

Ketersediaan lahan untuk permukiman di Kabupaten Badung mencakup total luas sebesar 28.135,16 hektar. Lahan ini terdiri dari lahan permukiman yang sudah ada serta lahan yang berpotensi untuk dikembangkan di masa depan. Berdasarkan asumsi bahwa setiap penduduk memerlukan ruang seluas 100 meter persegi (0,01 hektar) untuk melakukan berbagai aktivitasnya, dan dengan asumsi bahwa setiap rumah dihuni oleh 5 jiwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007, lahan seluas ini memiliki kapasitas untuk menampung hingga 2.813.516 jiwa.

Jumlah penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 503.592 jiwa. Proyeksi pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk akan meningkat menjadi 839.482 jiwa. Dengan ketersediaan lahan saat ini, terdapat surplus lahan yang signifikan. Pada tahun 2023, surplus lahan dapat menampung tambahan 2.307.901 jiwa, sementara pada tahun 2045, surplus lahan tetap cukup untuk menampung tambahan 1.971.991 jiwa. Surplus lahan ini diperuntukkan khusus untuk permukiman dan tidak termasuk lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian atau penggunaan lainnya. Status daya dukung lahan untuk permukiman di semua kecamatan pada tahun 2023 sampai 2045 masih surplus. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2023, terdapat satu desa/kelurahan yang mengalami defisit lahan, yaitu Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta. Hal tersebut menunjukkan bahwa surplus tersebut tidak merata di seluruh wilayah kabupaten. Defisit di Kelurahan Tuban mengindikasikan adanya kesenjangan dalam distribusi lahan permukiman. Dengan demikian, meskipun daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Badung dapat disebut surplus, kesenjangan distribusi lahan antar wilayah tetap memerlukan perhatian khusus.

Tabel 2.13.
Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Badung

No.	Variabel	Eksisting (Tahun 2023)	Estimasi (Tahun 2045)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketersediaan lahan permukiman (a)	28.135,16 ha	28.135,16 ha
2	Jumlah penduduk (b)	503.592 orang	839.482 orang
	Daya tampung penduduk (a x 100)	2.813.516 orang	2.813.516 orang
3	Asumsi ruang untuk aktivitas	100 m ² /orang	100 m ² /orang
4	Asumsi penghuni per rumah	5 orang/rumah	5 orang/rumah
Surplus lahan (b-a)		2.307.901 orang	1.971.991 orang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Badung

Tabel 2.14.

Status Daya Dukung Lahan Permukiman di Masing-Masing Desa di Kabupaten Badung

No	Kecamatan/Desa dan Kelurahan	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)		Selisih Daya Tampung Penduduk (Jiwa)		Status Daya Dukung Lahan Permukiman	
				2023	2043	2023	2043	2023	2043
A	Kecamatan Abiansemal	4896,83	489.683	97.710	162.881	391.973	326.801	Surplus	Surplus
1	Abiansemal	265,42	26.542	8.018	13.366	18.524	13.176	Surplus	Surplus
2	Angantaka	216,4	21.640	4.140	6.901	17.500	14.739	Surplus	Surplus
3	Ayunan	164,73	16.473	2.516	4.194	13.957	12.279	Surplus	Surplus
4	Blahkiuh	415,96	41.596	6.320	10.535	35.276	31.060	Surplus	Surplus
5	Bongkasa	268,27	26.827	6.276	10.462	20.551	16.365	Surplus	Surplus
6	Bongkasa Pertiwi	201,12	20.112	2.633	4.389	17.479	15.723	Surplus	Surplus
7	Darmasaba	416,61	41.661	10.675	17.795	30.986	23.866	Surplus	Surplus
8	Dauh Yeh Cani	213,44	21.344	6.328	10.549	15.016	10.795	Surplus	Surplus
9	Jagapati	158,82	15.882	4.029	6.716	11.853	9.166	Surplus	Surplus
10	Mambal	223,1	22.310	5.353	8.923	16.957	13.387	Surplus	Surplus
11	Mekar Bhuwana	145,27	14.527	5.193	8.657	9.334	5.870	Surplus	Surplus
12	Punggul	180,51	18.051	3.305	5.509	14.746	12.541	Surplus	Surplus
13	Sangeh	257,65	25.765	4.776	7.962	20.989	17.804	Surplus	Surplus
14	Sedang	346,62	34.662	4.404	7.341	30.258	27.320	Surplus	Surplus
15	Selat	121,1	12.110	2.458	4.097	9.652	8.013	Surplus	Surplus
16	Sibang Gede	514,07	51.407	7.441	12.404	43.966	39.003	Surplus	Surplus
17	Sibang Kaja	296,89	29.689	6.836	11.396	22.853	18.293	Surplus	Surplus
18	Taman	490,84	49.084	7.009	11.684	42.075	37.400	Surplus	Surplus
B	Kecamatan Kuta	953,86	95.386	50.678	84.480	44.708	10.907	Surplus	Surplus
1	Kedonganan	121,56	12.156	7.364	12.276	4.792	-120	Surplus	Defisit
2	Kuta	322,47	32.247	17.643	29.411	14.604	2.836	Surplus	Surplus
3	Legian	129,1	12.910	5.372	8.955	7.538	3.955	Surplus	Surplus
4	Seminyak	290,76	29.076	3.870	6.451	25.206	22.624	Surplus	Surplus
5	Tuban	89,99	8.999	16.429	27.387	-7.430	-18.388	Defisit	Defisit
C	Kecamatan Kuta Selatan	6391,1	639109,53	115.020	191.737	524.090	447.372	Surplus	Surplus
1	Benoa	1184,01	118.401	32.759	54.609	85.642	63.792	Surplus	Surplus
2	Jimbaran	1428,1	142.810	49.119	81.881	93.691	60.929	Surplus	Surplus
3	Kutuh	693,03	69.303	5.257	8.763	64.046	60.540	Surplus	Surplus
4	Pecatu	1843,74	184.374	8.235	13.728	176.139	170.646	Surplus	Surplus
5	Tanjung Benoa	96,19	9.619	5.815	9.694	3.804	-75	Surplus	Defisit
6	Ungasan	1146,02	114.602	13.835	23.063	100.767	91.540	Surplus	Surplus
D	Kecamatan Kuta Utara	2660,17	266.017	80.174	133.649	185.843	132.368	Surplus	Surplus
1	Canggu	423,81	42.381	6.976	11.629	35.405	30.752	Surplus	Surplus
2	Dalung	511,48	51.148	23.109	38.522	28.039	12.626	Surplus	Surplus
3	Kerobokan	325,82	32.582	10.062	16.773	22.520	15.809	Surplus	Surplus
4	Kerobokan Kaja	343,3	34.330	17.408	29.019	16.922	5.311	Surplus	Surplus
5	Kerobokan Kelod	619,99	61.999	10.768	17.950	51.231	44.049	Surplus	Surplus
6	Tibubeneng	435,77	43.577	11.851	19.755	31.726	23.821	Surplus	Surplus
E	Kecamatan Mengwi	6233,23	623.323	127.389	212.356	495.934	410.967	Surplus	Surplus
1	Abianbase	268,01	26.801	7.022	11.706	19.779	15.096	Surplus	Surplus
2	Baha	507,96	50.796	3.950	6.585	46.846	44.211	Surplus	Surplus
3	Buduk	262,64	26.264	8.553	14.258	17.711	12.006	Surplus	Surplus
4	Cemagi	415,78	41.578	5.271	8.787	36.307	32.791	Surplus	Surplus
5	Gulingan	443,79	44.379	8.450	14.086	35.929	30.292	Surplus	Surplus
6	Kapal	457,65	45.765	11.639	19.402	34.126	26.363	Surplus	Surplus
7	Kekeran	373,77	37.377	3.837	6.396	33.540	30.981	Surplus	Surplus
8	Kuwum	148,73	14.873	3.134	5.224	11.739	9.649	Surplus	Surplus
9	Lukluk	372,25	37.225	8.025	13.378	29.200	23.847	Surplus	Surplus
10	Mengwi	184,22	18.422	8.087	13.481	10.335	4.941	Surplus	Surplus
11	Mengwitani	260,03	26.003	7.941	13.238	18.062	12.766	Surplus	Surplus
12	Munggu	510,6	51.060	7.255	12.094	43.805	38.966	Surplus	Surplus
13	Penarungan	388,62	38.862	7.126	11.879	31.736	26.983	Surplus	Surplus
14	Pererenan	292,14	29.214	3.268	5.448	25.946	23.767	Surplus	Surplus
15	Sading	211,25	21.125	8.293	13.824	12.832	7.301	Surplus	Surplus
16	Sembung	352,15	35.215	5.895	9.827	29.320	25.388	Surplus	Surplus
17	Sempidi	218,64	21.864	6.916	11.529	14.948	10.335	Surplus	Surplus
18	Sobangan	220,92	22.092	3.942	6.571	18.150	15.521	Surplus	Surplus
19	Tumbakbayuh	157,92	15.792	3.423	5.706	12.369	10.086	Surplus	Surplus
20	Werdi Bhuwana	186,17	18.617	5.362	8.938	13.255	9.678	Surplus	Surplus
F	Kecamatan Petang	6999,96	699.996	32.621	54.379	667.375	645.618	Surplus	Surplus
1	Belok Sidan	2162,95	216.295	5.587	9.313	210.708	206.982	Surplus	Surplus
2	Carangsari	529,77	52.977	6.011	10.020	46.966	42.956	Surplus	Surplus
3	Getasan	200,26	20.026	2.180	3.634	17.846	16.392	Surplus	Surplus
4	Pangsan	349,48	34.948	2.920	4.868	32.028	30.081	Surplus	Surplus
5	Pelaga	2205,2	220.520	6.649	11.084	213.871	209.436	Surplus	Surplus
6	Petang	703,65	70.365	4.435	7.393	65.930	62.972	Surplus	Surplus
7	Sulangai	848,66	84.866	4.839	8.067	80.027	76.799	Surplus	Surplus
	TOTAL	28135,16	2.813.516	505.615	841.525	2.311.947	1.976.077	Surplus	Surplus

Sumber : KLHS RPIPD Kabupaten Badung


2) Daya Dukung Air

Daya dukung air ditentukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air ditentukan dengan metode koefisien limpasan berdasarkan penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sedangkan kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Berdasarkan metode tersebut dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di wilayah tersebut dalam keadaan surplus atau defisit. Daya dukung air surplus apabila nilai ketersediaan lebih besar daripada nilai kebutuhan dan daya dukung air defisit apabila ketersediaan air lebih kecil dibandingkan kebutuhan air.

Daya dukung air suatu wilayah adalah “perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air” di wilayah yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penentuan daya dukung air adalah metode koefisien limpasan yang berdasarkan atas data penggunaan lahan, dan data curah hujan tahunan. Sementara kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak penduduk akan air yang ditentukan oleh besarnya populasi manusia di suatu wilayah. Merujuk Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang telah memberikan suatu angka konstanta tentang tingkat konsumsi air yang berasal dari tingkat konsumsi air kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan buah yang disetarakan dengan kebutuhan air dan juga dari pemanfaatan air virtual untuk menghasilkan satu satuan produk.

Ketersediaan (*supply*) air, dalam hubungannya dengan daya dukung air merupakan besaran cadangan air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-harinya (kebutuhan domestik) dan kebutuhan manusia akan air untuk menghasilkan satu satuan produk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Ketersediaan air bersumber dari air permukaan dan air bawah tanah yang pada prinsipnya semua berasal dari air hujan. Tingkat ketersediaan air pada suatu wilayah, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu; curah hujan, koefisien limpasan tertimbang, dan luas wilayah. Sedangkan kebutuhan (*demand*) air, dalam hubungannya dengan daya dukung air merupakan suatu gambaran besarnya kebutuhan air untuk keperluan hidup manusia sehari-harinya (kebutuhan domestik) dan kebutuhan manusia akan air untuk menghasilkan satu satuan produk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil analisis data koefisien limpasan, luas wilayah, dan curah hujan diketahui ketersediaan air di Kabupaten Badung sebanyak 126.316.503,59 m³/tahun. Proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 503.592 jiwa dan tahun 2043 sebanyak 839.482 jiwa maka kebutuhan air di Kabupaten Badung pada tahun 2023 sebesar 22.057.330 m³/tahun dan tahun 2043 sebesar 36.769.317 m³/tahun. Dengan demikian status daya dukung air pada tahun 2023 adalah surplus. Status daya dukung air sampai tahun 2043 masih surplus. Jika dirinci menurut kecamatan, status daya dukung air di semua kecamatan sampai tahun 2043 masih surplus. Namun jika dirinci menurut desa/kelurahan, terdapat dua desa yang telah defisit daya dukung air pada tahun 2023 yaitu Desa Blahkiuh dan Desa Mekar Bhuwana di Kecamatan Abiansemal. Sedangkan pada tahun 2043 terdapat 15 desa yang defisit daya dukung air, tersebar di Kecamatan Abiansemal 8 desa, Kuta Utara 2 desa, dan Kecamatan Mengwi 5 desa.



Meskipun Kabupaten Badung secara keseluruhan memiliki surplus daya dukung air hingga tahun 2043, ketidakmerataan distribusi air di antara desa-desa menunjukkan adanya desa-desa yang mengalami defisit air, seperti Desa Blahkiuh dan Desa Mekar Bhuwana pada tahun 2023, serta 15 desa lainnya pada tahun 2043. Akumulasi surplus air dari desa-desa yang memiliki kelebihan air dapat mengakomodasi desa-desa yang mengalami defisit, dengan menyediakan infrastruktur dan sistem distribusi yang memadai. Selain itu, manajemen sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk perencanaan dan regulasi yang efektif, sangat penting untuk memastikan penggunaan air yang efisien dan adil. Dengan investasi dan perencanaan yang tepat, surplus air dari desa-desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang mengalami kekurangan, sehingga dapat menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial di seluruh Kabupaten Badung.

Tabel 2.15.
Status Daya Dukung Air Kabupaten Badung

No	Kecamatan/Desa dan Kelurahan	Ketersediaan Air	Penduduk (Jiwa)		Kebutuhan Air (M3/Tahun)		Status Daya Dukung Air	
			2023	2023	2023	2023	2023	2023
A	Kecamatan Abiansemal	8.160.877	97.710	162.881	4.279.698	7.134.208	Surplus	Surplus
1	Abiansemal	389.876	8.018	13.366	351.188	585.427	Surplus	Defisit
2	Angantaka	313.519	4.140	6.901	181.332	462.033	Surplus	Defisit
3	Ayunan	317.879	2.516	4.194	110.201	302.278	Surplus	Surplus
4	Blahkiuh	241.975	6.320	10.535	276.816	183.703	Defisit	Surplus
5	Bongkasa	611.006	6.276	10.462	274.889	461.449	Surplus	Surplus
6	Bongkasa Pertiwi	394.063	2.633	4.389	115.325	458.237	Surplus	Defisit
7	Darmasaba	492.594	10.675	17.795	467.565	192.246	Surplus	Surplus
8	Dauh Yeh Cani	611.970	6.328	10.549	277.166	779.426	Surplus	Defisit
9	Jagapati	233.296	4.029	6.716	176.470	294.174	Surplus	Defisit
10	Mambal	327.719	5.353	8.923	234.461	390.844	Surplus	Defisit
11	Mekar Bhuwana	213.390	5.193	8.657	227.453	379.162	Defisit	Defisit
12	Punggu	265.152	3.305	5.509	144.759	241.312	Surplus	Surplus
13	Sangeh	633.667	4.776	7.962	209.189	348.715	Surplus	Surplus
14	Sedang	509.151	4.404	7.341	192.895	321.554	Surplus	Surplus
15	Selat	177.891	2.458	4.097	107.660	179.469	Surplus	Defisit
16	Sibang Gede	755.122	7.441	12.404	325.916	543.298	Surplus	Surplus
17	Sibang Kaja	951.609	6.836	11.396	299.417	499.124	Surplus	Surplus
18	Taman	720.997	7.009	11.684	306.994	511.756	Surplus	Surplus
B	Kecamatan Kuta	12.744.497	50.678	84.480	2.219.696	3.700.209	Surplus	Surplus
1	Kedonganan	1.083.108	7.364	12.276	322.543	537.676	Surplus	Surplus
2	Kuta	4.661.543	17.643	29.411	772.763	1.288.188	Surplus	Surplus
3	Legian	1.277.999	5.372	8.955	235.294	392.232	Surplus	Surplus
4	Seminyak	2.457.446	3.870	6.451	169.506	282.565	Surplus	Surplus
5	uban	3.264.401	16.429	27.387	719.590	1.199.549	Surplus	Surplus
C	Kecamatan Kuta Selatan	60.291.364	115.020	191.737	5.037.876	8.398.082	Surplus	Surplus
1	Benoa	15.527.104	32.759	54.609	1.434.844	2.391.869	Surplus	Surplus
2	Jimbaran	16.891.201	49.119	81.881	2.151.412	3.586.380	Surplus	Surplus
3	Kutuh	4.033.830	5.257	8.763	230.257	383.835	Surplus	Surplus
4	Pecatu	16.234.832	8.235	13.728	360.693	601.271	Surplus	Surplus
5	Tanjung Benoa	431.866	5.815	9.694	254.697	424.577	Surplus	Surplus
6	Ungasan	7.172.531	13.835	23.063	605.973	1.010.150	Surplus	Surplus
D	Kecamatan Kuta Utara	13.583.238	80.174	133.649	3.511.621	5.853.833	Surplus	Surplus
1	Canggu	2.480.497	6.976	11.629	305.549	509.346	Surplus	Surplus
2	Dalung	2.556.257	23.109	38.522	1.012.174	1.687.283	Surplus	Surplus
3	Kerobokan	478.603	10.062	16.773	440.716	734.668	Surplus	Defisit
4	Kerobokan Kaja	1.064.012	17.408	29.019	762.470	1.271.029	Surplus	Defisit
5	Kerobokan Kelod	4.306.691	10.768	17.950	471.638	786.216	Surplus	Surplus
6	Tibubeneng	2.697.178	11.851	19.755	519.074	865.290	Surplus	Surplus
E	Kecamatan Mengwi	15.416.091	127.389	212.356	5.579.638	9.301.193	Surplus	Surplus
1	Abianbase	798.989	7.022	11.706	307.564	512.705	Surplus	Surplus
2	Baha	746.146	3.950	6.585	173.010	288.406	Surplus	Surplus
3	Buduk	385.797	8.553	14.258	374.621	624.490	Surplus	Defisit
4	Cemagi	1.800.364	5.271	8.787	230.870	384.857	Surplus	Surplus
5	Gulingan	1.085.323	8.450	14.086	370.110	616.969	Surplus	Surplus
6	Kapal	672.255	11.639	19.402	509.788	849.811	Surplus	Defisit
7	Kekeran	549.033	3.837	6.396	168.061	280.155	Surplus	Surplus
8	KuwuM	446.135	3.134	5.224	137.269	228.826	Surplus	Surplus
9	Lukluk	546.796	8.025	13.378	351.495	585.938	Surplus	Defisit
10	Mengwi	785.228	8.087	13.481	354.211	590.465	Surplus	Surplus
11	Mengwitani	1.259.859	7.941	13.238	347.816	579.805	Surplus	Surplus
12	Munggu	1.217.707	7.255	12.094	317.769	529.717	Surplus	Surplus
13	Penarungan	570.848	7.126	11.879	312.119	520.298	Surplus	Surplus
14	Pererenan	703.023	3.268	5.448	143.138	238.610	Surplus	Surplus
15	Sading	310.310	8.293	13.824	363.233	605.506	Surplus	Defisit
16	Sambung	1.051.044	5.895	9.827	258.201	430.418	Surplus	Surplus
17	Sempidi	654.874	6.916	11.529	302.921	504.966	Surplus	Surplus
18	Sobangan	1.045.097	3.942	6.571	172.660	287.822	Surplus	Surplus
19	Tumbakbayuh	231.968	3.423	5.706	149.927	249.927	Surplus	Defisit
20	Werdhi Bhuwana	555.294	5.362	8.938	234.856	391.502	Surplus	Surplus
F	Kecamatan Petang	23.951.251	32.621	54.379	1.428.800	2.381.793	Surplus	Surplus
1	Belok Sidan	8.059.373	5.587	9.313	244.711	407.930	Surplus	Surplus
2	Carangsari	1.580.932	6.011	10.020	263.282	438.888	Surplus	Surplus
3	Getasan	597.943	2.180	3.634	95.484	159.171	Surplus	Surplus
4	Pangsari	1.042.382	2.920	4.868	127.896	213.201	Surplus	Surplus
5	Pelaga	10.390.425	6.649	11.084	291.226	485.471	Surplus	Surplus
6	Petang	1.033.596	4.435	7.393	194.253	323.818	Surplus	Surplus
7	Sulangai	1.246.601	4.839	8.067	211.948	353.315	Surplus	Surplus
	TOTAL	134.147.319	505.615	841.525	22.059.353	36.771.360	Surplus	Surplus

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Badung

3) Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Kabupaten Badung

Daya dukung dan daya tampung air nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023. Daya dukung dan daya tampung air nasional ditentukan berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat ekoregion, yang meliputi jumlah populasi, potensi dan ketersediaan sumber daya alam, serta bentuk pemanfaatan sumber daya alam untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun. Daya dukung dan daya tampung air nasional ditetapkan berdasarkan: Penghitungan ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun; Ketersediaan air dapat berasal dari air permukaan dan air tanah tidak tertekan atau air tanah bebas; dan Kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air yang mempengaruhi ketersediaan air, periode 1996 sampai dengan 2020.

1. Ketersediaan Air

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, jumlah ketersediaan air di Provinsi Bali adalah 2.078.807.392,80 m³/tahun. Ketersediaan air menurut kabupaten/kota berkisar 34.779.742,42 – 491.070.463,68 m³/tahun. Ketersediaan air di Kabupaten Badung sebanyak 126.316.503,59 m³/tahun atau 6,08% dari total ketersediaan air di Bali.

2. Kebutuhan Air

Jumlah kebutuhan air di Provinsi Bali yaitu 4.061.324.302,72 m³/tahun, terdiri atas kebutuhan air domestik sebanyak 373.035.456,00 m³/tahun (9,19%) dan kebutuhan lahan untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan sebanyak 3.688.288.846,72 m³/tahun (90,81%). Kebutuhan air menurut kabupaten/kota berkisar 103.142.016,67 – 834.623.841,58 m³/tahun.

Kebutuhan air di Kabupaten Badung adalah 382.229.377,95 m³/tahun atau 9,41% dari total kebutuhan air di Bali. Kebutuhan air untuk domestik sebanyak 47.361.368,60 m³/tahun atau 12,70% dari total kebutuhan air domestik di Bali. Sedangkan kebutuhan air untuk untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan sebanyak 334.868.008,35 m³/tahun atau 9,08% dari total kebutuhan air untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan di Bali.

3. Indikasi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan jumlah ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah kebutuhan air, indikasi status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Badung sebagian besar wilayahnya telah "Terlampau" yaitu mencapai 93,10% dari total luas wilayah sedangkan wilayah yang "Belum Terlampau" sebesar 6,90%. Jumlah defisit air di Kabupaten Badung mencapai (-)255.912.874,36 m³/tahun atau 202,60% dari sediaan air sebanyak 126.316.503,59 m³/tahun.

Tabel 2.16.

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Sediaan Air (M3/Tahun)	Kebutuhan Air M3/Tahun)			Status	Terlampai	Belum Terlampai
			Domestik	Lahan	Jumlah			
1	Jembrana	324.464.970,07	27.396.230,40	405.193.489,70	432.589.720,10	Terlampai	49.194,72	35.841,97
2	Tabanan	391.015.984,65	39.881.203,20	794.742.638,38	834.623.841,58	Terlampai	72.916,14	11.845,07
3	Badung	126.316.503,59	47.361.369,60	334.868.008,35	382.229.377,95	Terlampai	37.715,98	2.797,44
4	Gianyar	124.233.000,84	44.525.203,20	427.216.531,65	471.741.734,85	Terlampai	36.628,03	5,34
5	Klungkung	142.389.489,81	17.880.566,40	211.093.343,57	228.973.909,97	Terlampai	24.824,61	6.397,42
6	Bangli	165.502.462,10	22.351.852,80	314.739.002,03	337.090.854,83	Terlampai	44.504,46	8.292,81
7	Karangasen	279.034.775,64	42.544.828,80	482.221.332,80	524.766.161,60	Terlampai	69.120,74	14.649,47
8	Buleleng	491.070.463,68	68.427.331,20	677.739.353,97	746.166.685,17	Terlampai	86.403,83	45.674,55
9	Denpasar	34.779.742,42	62.666.870,40	40.475.146,27	103.142.016,67	Terlampai	11.650,43	713,36
	Bali	2.078.807.392,80	373.035.456,00	3.688.288.846,72	4.061.324.302,72	Terlampai	432.958,95	126.217,43

Sumber : Peta Digital Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Provinsi Bali Skala 1:250.000 (KLHK,2023)

Tabel 2.17.

Defisit Air di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Sediaan Air (M3/Tahun)	Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Defisit Air	
				Jumlah (M3/Tahun)	Persentase (%)
.1	Jembrana	324.464.970,07	432.589.720,10	-108.124.750,03	-33,32
.2	Tabanan	391.015.984,65	834.623.841,58	-443.607.856,92	-113,45
3	Badung	126.316.503,59	382.229.377,95	-255.912.874,36	-202,6
.4	Gianyar	124.233.000,84	471.741.734,85	-347.508.734,01	-279,72
.5	Klungkung	142.389.489,81	228.973.909,97	-86.584.420,17	-60,81
.6	Bangli	165.502.462,10	337.090.854,83	-171.588.392,72	-103,68
.7	Karangasen	279.034.775,64	524.766.161,60	-245.731.385,96	-88,06
.8	Buleleng	491.070.463,68	746.166.685,17	-255.096.221,49	-51,95
.9	Denpasar	34.779.742,42	103.142.016,67	-68.362.274,25	-196,56
.	Bali	2.078.807.392,80	4.061.324.302,72	-1.982.516.909,92	-95,37

K. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Badung sebagai bagian dari Pulau Bali rentan akan adanya bencana alam, karena kedudukan Pulau Bali pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Dilihat dari potensi bencana yang ada, beberapa bencana yang berpotensi menimpa Kabupaten Badung antara lain: Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, Kawasan Rawan Bencana Tsunami, Kawasan Rawan Bencana Abrasi Pantai, dan Kawasan Rawan Bencana Intrusi Air Laut.

Terkait dengan potensi bencana tersebut, BNPB mengeluarkan indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur risiko bencana di tiap-tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indikator ini adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB di Kabupaten Badung pada tahun 2023 menurut data dari BNPB (melalui situs Inarisk) adalah 102,92, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan IRB 103,29. Pada tahun 2015 yang merupakan tahun awal IRB, IRB di Kabupaten Badung adalah 179,20. IRB Kabupaten Badung pada tahun 2023 merupakan yang terendah ketiga setelah Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Hal ini memberikan makna

bahwa risiko bencana di Kabupaten Badung pada tahun 2023 merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Bali. Risiko Bencana ini bukan hanya dilihat pada faktor alam semata namun juga bagaimana kemampuan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung dalam memitigasi bencana. Sehingga dalam konteks penanggulangan bencana, Kabupaten Badung merupakan salah satu yang terbaik di Provinsi Bali.

Tabel 2.18.

Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab Jembrana	168,18	160,41	152,62	157,92	150,15
2	Kab Tabanan	160,22	153,27	153,27	143,87	136,90
3	Kab Buleleng	107,35	102,05	92,45	92,64	91,49
4	Kab Gianyar	136,09	129,79	129,79	130,56	129,03
5	Kab Klungkung	145,92	133,42	124,22	125,41	126,93
6	Kab Bangli	144,18	139,46	133,69	128,65	125,04
7	Kab Karangasem	137,94	137,94	123,15	129,11	121,24
8	Kab Badung	106,93	101,81	101,81	103,29	102,92
9	Kota Denpasar	107,98	106,70	106,70	104,39	98,18

Sumber: INARisk BNPB melalui situs <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> yang diakses tahun 2024

L. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro, meso, dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP berdasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan

3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan terdapat sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, berikut adalah indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP.

Berdasarkan data dari Buku Indeks Ketahanan Pangan 2023, indeks ketahanan pangan (IKP) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bali bervariasi. Kabupaten Denpasar memiliki nilai IKP tertinggi dengan 95,80, diikuti oleh Gianyar dengan 92,16. Kabupaten Badung berada di peringkat ketiga dengan nilai IKP 91,59. Kabupaten Badung, dengan nilai IKP 91,59, menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam aspek ketahanan pangan. Nilai ini menempatkan Badung di posisi ketiga setelah Denpasar dan Gianyar. Tingginya nilai IKP di Kabupaten Badung menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan dan keberhasilan berbagai program yang dijalankan untuk mendukung sektor pertanian. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.

Tabel 2.19.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023

NO	Kabupaten	Indeks Ketahanan Pangan
1	Tabanan	90,54
2	Denpasar	95,80
3	Badung	91,59
4	Gianyar	92,16
5	Jembrana	86,59
6	Klungkung	87,53
7	Buleleng	82,02
8	Karangasem	85,28
9	Bangli	77,35

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan 2023

2. Aspek Demografi

A. Jumlah, Sebaran, dan Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Badung berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 adalah 548.191 jiwa. Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dan terendah berada di Kecamatan Petang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, jumlah penduduk Kabupaten Badung diperkirakan terus meningkat selama tahun 2020-2022. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Badung meningkat menjadi 549,50 ribu jiwa dimana

Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan masih memiliki jumlah penduduk tertinggi.

Apabila dilihat berdasarkan kepadatan penduduknya, secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Badung adalah 1.310 Jiwa/Km². Kecamatan Kuta merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 3.377 Jiwa/Km² sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Petang yaitu hanya 270 Jiwa/Km². Badung Selatan (Kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan) memiliki kepadatan penduduk 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Badung Utara (Kecamatan Petang, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Abiansemal). Ini mengindikasikan pertumbuhan di kedua wilayah tersebut tidak seimbang dimana Badung Selatan mengalami konsentrasi pembangunan dan perkembangan yang lebih pekat dibandingkan Badung Utara. Untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka dibutuhkan pemerataan pembangunan sekaligus pengendalian yang ketat untuk menjaga agar kualitas lingkungan Kabupaten Badung dapat terjaga dan tidak mengalami penurunan kembali.

Tabel 2.20.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung 2020-2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah (ribuan jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kuta Selatan	101,13	131.139	1.297	131,40	1.299	131,40	1.299	118,10	1.167,80
2	Kuta	17,52	59.160	3.377	59,30	3.383	59,30	3.385	56,80	3.242,01
3	Kuta Utara	33,86	95.189	2.811	95,40	2.817	95,40	2.817	87,80	2.593,03
4	Mengwi	82,00	132.786	1.619	133,10	1.623	133,20	1.624	131,60	1.604,88
5	Abiansemal	69,01	98.904	1.433	99,10	1.436	99,10	1.436	98,90	1.433,13
6	Petang	115,00	31.013	270	31,10	270	31,10	270	32,80	285,22
	Jumlah	418,52	548.191	1.310	549,40	1.312	549,50	1.313	526,00	1.256,81

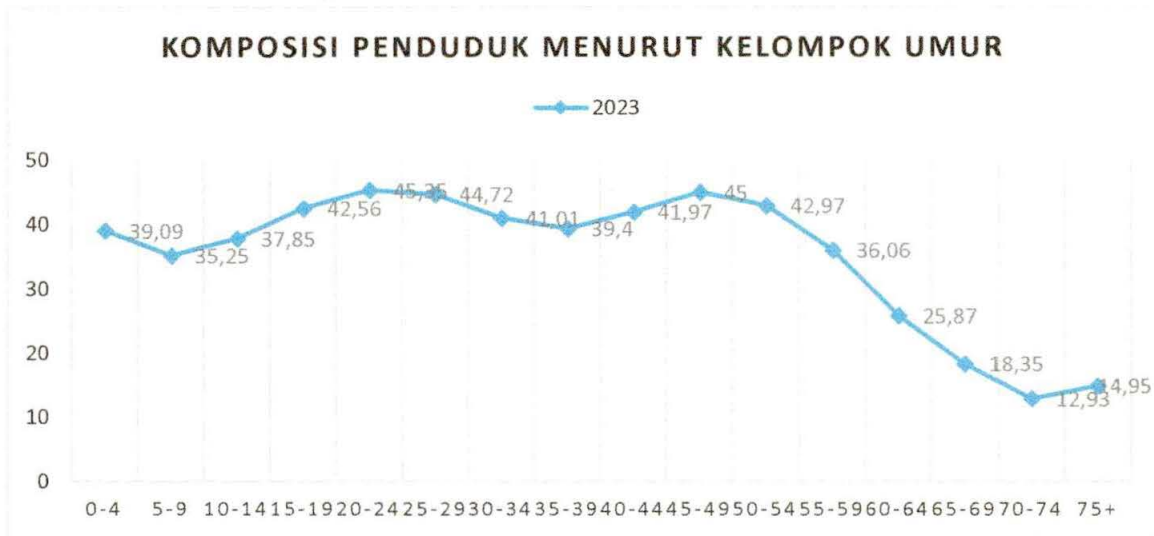
Sumber : BPS Kabupaten Badung

Jumlah penduduk Kabupaten Badung menurut jenis kelamin tahun 2022 terdiri atas laki-laki sebanyak 275.168 jiwa dan perempuan sebanyak 274.359 orang, atau dengan rasio kelamin 100,3, artinya terdapat 1003 penduduk laki-laki untuk setiap 1000 penduduk perempuan.

Komposisi penduduk Kabupaten Badung menurut kelompok umur pada tahun 2023 disajikan pada Gambar 2.19. Komposisi penduduk umur 20-24 tahun, umur 25-29 tahun, dan umur 45-49 tahun berada pada posisi puncak dengan jumlah 44,72 ribu hingga 45,35 ribu.



Gambar 2.19.
Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur 2023



Sumber : BPS Kabupaten Badung

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, dilakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk mengevaluasi perkiraan pertumbuhan populasi penduduk di Kabupaten Badung sebagai berikut. Selama periode sensus tahun 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung mencapai tingkat tertinggi sejak dimulainya sensus penduduk pada tahun 1961 yakni sebesar 4,62%. Dari hasil sensus tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung sebesar 2,2% per tahun.

Tabel 2.21.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Badung

Periode Sensus (Tahun)	1961-1971	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2020
Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus (%)	2,60	2,34	1,23	2,33	4,62	0,09
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (%)						2,20

Sumber : BPS Kabupaten Badung

C. Rasio Ketergantungan Umur

Rasio ketergantungan menggambarkan besarnya jumlah penduduk non-produktif yang ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif. Penduduk non-produktif adalah penduduk yang pada umumnya berada dalam tanggungan, dan yang termasuk dalam golongan ini adalah anak-anak (usia 0 – 14 tahun) dan penduduk usia lanjut (usia 65 tahun keatas).

Komposisi penduduk usia produktif (15-65 tahun) di Kabupaten Badung tahun 2022 sebesar 71,77%, sedangkan penduduk usia lanjut (65+tahun) sebesar 8,00% dan penduduk anak-anak 0-14 tahun sebesar 20,23%. Apabila keseluruhan penduduk usia non-produktif dibandingkan dengan penduduk usia produktif maka diperoleh rasio ketergantungan menurut umur (RKU). Jika penduduk usia anak-anak dan usia lanjut dipilah dan masing-masing dibandingkan dengan penduduk usia produktif maka diperoleh rasio ketergantungan anak (RKA) dan rasio ketergantungan usia lanjut (RKUL).

Di Kabupaten Badung, jika dilihat dari masing-masing kecamatan, rasio ketergantungan tertinggi ada di Kecamatan Mengwi dengan persentase sebesar 21,39% yang terdiri dari 6,5% rasio ketergantungan muda dan 14,87% rasio ketergantungan tua, Kemudian Kecamatan Abiansemal dengan persentase sebesar 20,77% yang terdiri dari 4,94% rasio ketergantungan muda dan 15,83% rasio ketergantungan tua. Kecamatan dengan rasio ketergantungan paling rendah ada di Kecamatan Kuta dengan persentase sebesar 12,08%. Namun secara keseluruhan, rasio ketergantungan di Kabupaten Badung sebesar 38,76%. Yang terdiri dari 26,79% rasio ketergantungan muda dan 11,97% rasio ketergantungan tua.

Tabel 2.22.

Rasio Ketergantungan Umur Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Kecamatan	Usia Produktif (15-64 Tahun)	Usia Muda (0-14 Tahun)		Usia Tua (>=65 Tahun)		JML PDDK	Total (%)
			Jiwa	Rasio Ketergantungan Muda (%)	Jiwa	Rasio Ketergantungan Tua (%)		
1	Kuta	41.261	11.821	3,12	3.699	8,96	56.781	12,08
2	Mengwi	93.053	24.731	6,52	13.833	14,87	131.617	21,39
3	Abiansemal	69.249	18.734	4,94	10.960	15,83	98.943	20,77
4	Petang	23.081	6.053	1,60	3.674	15,92	32.808	17,51
5	Kuta Selatan	86.789	24.235	6,39	7.047	8,12	118.071	14,51
6	Kuta Utara	65.659	16.002	4,22	6.148	9,36	87.809	13,58
Kabupaten Badung		379.092	101.576	26,79	45.361	11,97	526.029	38,76

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Badung Semester I Tahun 2023

D. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha utama, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Badung tertinggi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor. Dalam periode 2018-2022, lapangan usaha ini menyerap tenaga kerja berkisar 18,05 – 22,54% dengan rata-rata 22,50% pertahun. Dalam periode tersebut terjadi kecenderungan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor sampai tahun 2021 akan tetapi di tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 22,54%.

Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja tertinggi kedua dan ketiga yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan lapangan usaha Industri Pengolahan. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyerap tenaga kerja tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19) mencapai 23,70% dan pada saat pandemi di tahun 2020 menurun.

Seiring dengan membaiknya kondisi pariwisata di tahun 2022, penyerapan tenaga kerja pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat menjadi 19,98%. Sedangkan lapangan usaha Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja dalam periode 2018-2022 sebesar 10,40 – 16,78% dengan rata-rata 13,73% pertahun. Pada saat pandemi, penyerapan tenaga kerja lapangan usaha ini meningkat signifikan yaitu 16,33% di tahun 2020 dan 16,78% di tahun 2021. Meredanya pandemi pada tahun 2022, penyerapan tenaga kerja menurun menjadi 13,58%.

Sementara itu, tenaga kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan semakin menurun dari 11,69% pada tahun 2018 menjadi 6,41% pada tahun 2022. Selama periode tersebut, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyerap tenaga kerja rata-rata 9,06% pertahun.

Tabel 2.23.
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Badung Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Persentase (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,69	7,44	10,69	9,08	6,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0	0	0	0
3	Indutri Pengolahan	10,4	11,56	16,33	16,78	13,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0	0,22	0	0,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,26	0,33	0,19	0,12
6	Konstruksi	5,13	6,05	6,65	6,2	6,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	18,05	20,76	25	26,16	22,54
8	Transportasi dan Pergudangan	4,56	4,65	3,7	2,43	3,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,57	23,7	14,65	15,62	19,98
10	Informasi dan Komunikasi	0,19	0,37	0,92	0,72	0,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	3,62	2,7	2,37	3,07
12	Real Estate	0	0,63	0,32	0,25	0,18
13	Jasa Perusahaan	3,53	3,46	2,56	1,91	2,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,38	5,59	4,27	5,97	6,13
15	Jasa Pendidikan	5,69	3,6	4,78	5,18	4,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	1,63	1,13	1,57	2,64
17	Jasa Lainnya	5,97	6,68	5,75	5,56	7,67
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Badung

E. Status Pekerjaan Penduduk

Penduduk yang bekerja dapat dibedakan statusnya sebagai pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal adalah mereka yang dikategorikan berusaha dengan dibantu buruh atau buruh dibayar dan kategori buruh atau karyawan atau pegawai.

Sedangkan mereka yang memiliki pekerjaan di luar kategori tersebut digolongkan sebagai pekerja informal, meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Status pekerja formal di Kabupaten Badung dalam periode 2018-2022 berkisar 48,84 – 61,67%. Sedangkan pekerja informal berkisar 38,33 – 51,16%. Status pekerja formal penduduk mengalami penurunan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yaitu 48,84%, namun meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 61,37%.

Status pekerjaan terbanyak pekerja di Kabupaten Badung tahun 2018-2022 adalah Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu berkisar 45,32 – 57,93%. Diurutan ke-2 adalah berusaha sendiri yaitu berkisar 12,94 – 16,98%. Sedangkan diurutan ke-3 adalah Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu berkisar 10,80 – 14,27%.

Tabel 2.24.
Komposisi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Status Pekerjaan Tahun 2018-2022

No	Status Pekerjaan	Persentase (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Berusaha Sendiri	14,84	12,94	16,98	15,94	14,88
2	Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	12,4	10,8	14,27	14,18	11,75
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4,57	3,74	3,52	3,64	4,16
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	54,31	57,93	45,32	46,84	57,21
5	Pekerja bebas di pertanian	2,06	0,95	0,49	0,29	0,20
6	Pekerja bebas di non pertanian	3,51	4,16	4,48	4,09	2,93
7	Pekerja keluarga/tidak dibayar	8,32	9,49	14,94	15,02	8,86
	Pekerja formal	58,88	61,67	48,84	50,48	61,37
	Pekerja informal	41,12	38,33	51,16	49,52	38,63

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Badung

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa cepat sebuah negara atau wilayah mengalami pertumbuhan dalam produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau PDB per kapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi suatu negara sedang berkembang dengan baik, sementara laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menunjukkan adanya masalah ekonomi yang perlu diatasi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung dilihat dari tahun 2013-2019 stabil berada di angka 6% dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Keadaan ekonomi Kabupaten Badung baru mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2020, dimana

laju perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan hingga di angka -16,55%. Hal ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 sehingga mengganggu sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Badung. Kemudian pada tahun 2021 kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung meningkat menjadi -6,74%.

Setelah pandemi COVID-19 mereda pada tahun 2022 perekonomian di Kabupaten Badung kemudian melonjak yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung di tahun tersebut menjadi 9,97%, dimana angka ini jauh lebih tinggi dari sebelum terjadinya pandemi. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun berikutnya yaitu tahun 2023 yang dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung kembali meningkat menjadi 11,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari tahun 2013-2023 sebagai berikut.

Gambar 2.20.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2013-2023




Sumber: Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2023

B. Indeks Gini/Gini Rasio

Indeks Gini adalah ukuran ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Indeks ini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan di antara individu atau keluarga dalam suatu negara (atau wilayah) bersifat tidak merata. Indeks Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 berarti distribusi sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 berarti distribusi yang paling tidak merata (satu orang atau kelompok memiliki semua pendapatan). Indeks gini digunakan untuk mengetahui tingkat ketidaksetaraan pendapatan antar negara, wilayah maupun daerah yang satu dengan yang lainnya dari satu waktu ke waktu.

Indeks gini di Kabupaten Badung berada pada angka kisaran 0,3 yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan. Dimana pada tahun 2012 indeks gini di Kabupaten Badung berada pada angka 0,3258 yang kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 0,3468. Setelah itu indeks gini mengalami penurunan hingga pada



tahun tahun 2017 menjadi 0,3190. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 0,3392. Setelah itu indeks gini di Kabupaten Badung turun hingga 0,2800.

Apabila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Bali dengan rata-rata indeks gini di angka 0,3588 maka dapat kita lihat bahwa Kabupaten Badung jauh lebih baik dari Provinsi Bali. Apabila kita bandingkan juga dengan Kota Denpasar sebagai ibukota provinsi dimana rata-rata berada diangka 0,3826. Sehingga Kabupaten Badung berada di bawah Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.

Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2023

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	0,3706	0,3710	0,3863	0,3079	0,3627	0,3170	0,3272	0,2903	0,3531	0,3170	0,3260	0,3260
Kab. Tabanan	0,3473	0,3862	0,4026	0,3557	0,3444	0,3108	0,3249	0,3080	0,3239	0,3110	0,2990	0,3470
Kab. Badung	0,3258	0,3468	0,3404	0,3147	0,3151	0,3190	0,3392	0,3244	0,3167	0,3320	0,3160	0,2800
Kab. Gianyar	0,3362	0,3254	0,3774	0,3249	0,3049	0,2682	0,3050	0,2866	0,3171	0,3330	0,3070	0,3170
Kab. Klungkung	0,3473	0,3599	0,3543	0,3695	0,3601	0,3714	0,3915	0,3847	0,3575	0,3460	0,3510	0,3380
Kab. Bangli	0,3053	0,3073	0,3285	0,3838	0,3537	0,3005	0,3126	0,2744	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820
Kab. Karangasem	0,2877	0,3293	0,3371	0,3089	0,2930	0,3232	0,3393	0,3125	0,3268	0,3180	0,2970	0,3370
Kab. Buleleng	0,3330	0,3755	0,3931	0,3373	0,3360	0,3086	0,3446	0,2847	0,2851	0,2820	0,2810	0,3140
Kota Denpasar	0,4248	0,3638	0,3809	0,3589	0,3307	0,3414	0,3422	0,3473	0,3301	0,3750	0,3680	0,3420
Provinsi Bali	0,4310	0,4030	0,4150	0,3768	0,3663	0,3840	0,3774	0,3662	0,3690	0,3780	0,3630	0,3620

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.21.

Grafik Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2012-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

C. Kemiskinan

1. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menjadi permasalahan besar dalam pembangunan karena dampaknya yang luas dan serius terhadap individu, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan:

a) Keterbatasan Akses terhadap Kebutuhan Dasar:

- **Kesehatan:** Kemiskinan sering terkait dengan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan yang layak, menyebabkan peningkatan angka penyakit dan kematian yang bisa dicegah.
- **Pendidikan:** Individu yang hidup dalam kemiskinan sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, yang menghambat mobilitas sosial dan perkembangan individu serta generasi mendatang.
- **Akses Air Bersih dan Makanan:** Kemiskinan sering berdampak pada ketersediaan air bersih dan pangan yang cukup, menyebabkan masalah gizi dan kesehatan yang serius.

b) Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

- **Pertumbuhan Ekonomi yang Terhambat:** Kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengurangi produktivitas tenaga kerja, menyebabkan kurangnya modal manusia, dan membatasi konsumsi dan permintaan ekonomi.
- **Cikal Bakal Ketidakstabilan Sosial:** Tingginya tingkat kemiskinan dapat memicu ketidakstabilan sosial, konflik, dan ketimpangan yang dapat menghambat pembangunan jangka panjang.

c) Siklus Kemiskinan:

- **Transmisi Generasi:** Kemiskinan dapat menjadi siklus di mana kondisi ekonomi yang buruk diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

d) Ketidakmerataan Pembangunan:

- **Ketidaksetaraan:** Kemiskinan menyebabkan ketimpangan yang lebih besar antara kelompok-kelompok sosial dan geografis, memperparah kesenjangan dan ketidakmerataan dalam pembangunan.

e) Kerentanan Terhadap Bencana dan Krisis:

- **Kerentanan yang Lebih Besar:** Individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali lebih rentan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.

Angka Kemiskinan Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir. Sempat menurun selama periode Tahun 2013 hingga Tahun 2019 namun meningkat di Tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19 dan kembali meningkat di tahun 2022. Angka Kemiskinan terendah yang pernah dialami oleh Kabupaten Badung adalah 1,78% di tahun 2019 dan tertinggi adalah 2,62% di tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2013-2023

No	Tahun	Angka Kemiskinan Kabupaten Badung (%)
1	2013	2,46
2	2014	2,54
3	2015	2,33
4	2016	2,06
5	2017	2,06
6	2018	1,98
7	2019	1,78
8	2020	2,02
9	2021	2,62
10	2022	2,53
11	2023	2,30

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.22.
Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Badung pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,30%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali yaitu 4,25%. Bila disandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan di Kabupaten Badung merupakan yang paling rendah dari kabupaten lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27.
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023

No	Wilayah	Angka Kemiskinan Tahun 2022 (%)
1	Kab. Jembrana	4,96
2	Kab. Tabanan	4,70
3	Kab. Badung	2,30
4	Kab. Gianyar	4,47
5	Kab. Klungkung	5,61
6	Kab. Bangli	5,28
7	Kab. Karangasem	6,56
8	Kab. Buleleng	5,85
9	Kota Denpasar	2,68
10	Provinsi Bali	4,25

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023


Gambar 2.23.
Diagram Perbandingan Angka Kemiskinan di Kabupaten Badung dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber: Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2023

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki kemampuan, kesiapan, dan keinginan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau preferensinya, dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka diukur sebagai persentase dari angkatan kerja, yang terdiri atas orang-orang yang bekerja dan yang mencari pekerjaan.



Pengangguran terbuka dapat menjadi indikator penting dari kesehatan ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan perlambatan ekonomi atau masalah struktural dalam pasar tenaga kerja, sementara tingkat pengangguran yang rendah dapat menandakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah sering menggunakan berbagai kebijakan ekonomi dan program pelatihan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Persentase angka pengangguran terbuka di Kabupaten Badung pada tahun 2013-2019 berada dibawah 1% atau kisaran 0,4%-0,8%. Baru pada tahun 2020 persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Badung melonjak drastis menjadi 6,92%. Hal ini terjadi diakibatkan pandemi COVID-19, sehingga banyak pekerja tempat pariwisata maupun penunjang pariwisata yang kehilangan pekerjaan. Angka persentase ini bertahan hingga tahun 2022. Kemudian setelah pandemi COVID-19 yang mereda angka pengangguran terbuka di Kabupaten Badung langsung mengalami penurunan yang drastis menjadi 2,72%.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Bali yang berada pada kisaran 1,4%-5,63%. Dimana pada tahun 2013-2019, persentase pengangguran terbuka di Provinsi Bali berada diatas 1% berkisar dari 1,4%-1,57%. Sehingga persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Badung berada di bawah Provinsi Bali. Perubahan baru terjadi pada tahun 2020-2021, dimana Provinsi Bali berada di angka 5,63% di tahun 2020 dan sudah mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 4,8%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28.

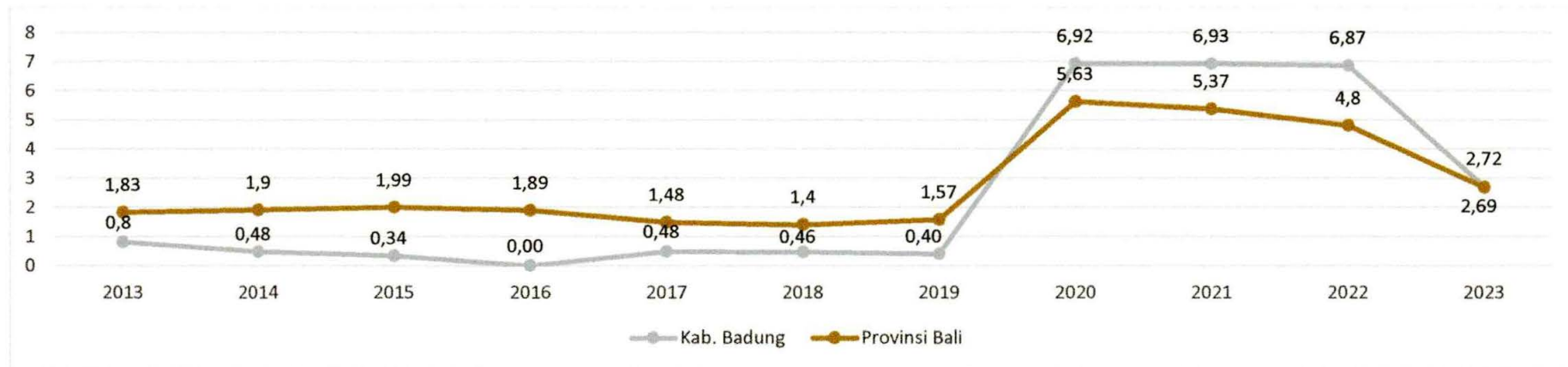
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2013-2023

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	3,46	2,95	1,59	-	0,67	1,41	1,44	4,52	4,11	3,94	2,52
Kab. Tabanan	0,8	2,25	1,73	-	1,79	1,45	1,29	4,21	3,94	3,83	2,64
Kab. Badung	0,8	0,48	0,34	-	0,48	0,46	0,40	6,92	6,93	6,87	2,72
Kab. Gianyar	2,23	1,43	1,93	-	1,02	1,61	1,46	7,53	6,90	6,78	2,96
Kab. Klungkung	2,08	1,94	1,39	-	0,94	1,47	1,57	5,42	5,35	1,96	1,29
Kab. Bangli	0,77	0,67	1,72	-	0,48	0,81	0,75	1,86	1,8	0,76	0,75
Kab. Karangasem	1,39	2,06	2,15	-	0,72	1,03	0,62	2,42	2,32	3,09	2,61
Kab. Buleleng	2,15	2,74	2,04	-	2,41	1,88	3,12	5,19	5,38	5,2	3,60
Kota Denpasar	2,72	2,32	3,54	-	2,63	1,87	2,29	7,62	7,02	5,08	2,85
Provinsi Bali	1,83	1,9	1,99	1,89	1,48	1,4	1,57	5,63	5,37	4,8	2,69

Sumber: BPS Provinsi Bali

Gambar 2.24.

Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pembangunan manusia suatu negara. IPM mencakup tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu:

1. Harapan Hidup yang Panjang dan Sehat, yang diukur dengan harapan hidup saat lahir.
2. Pendidikan, yang diukur dengan kombinasi rata-rata tahun sekolah yang diharapkan akan diselesaikan oleh anak-anak dan rata-rata tahun sekolah yang telah diselesaikan oleh orang dewasa.
3. Standar Hidup Layak, yang diukur dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dalam dolar berdasarkan Paritas Kekuatan Beli (PKB).

IPM menyediakan gambaran yang lebih komprehensif tentang pembangunan suatu negara daripada hanya menggunakan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita. Negara dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki standar hidup yang lebih tinggi, tingkat pendidikan yang lebih baik, dan harapan hidup yang lebih panjang.

Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2012 IPM di Kabupaten Badung berada pada angka 77,26 dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 83,08. Apabila dibandingkan dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang dimana pada tahun 2012 memiliki indeks pembangunan manusia berada di angka 80,45 dan terus meningkat menjadi 84,73 di tahun 2023. Hal ini menyebabkan Kabupaten Badung berada di peringkat kedua indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali. Kendati demikian nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Badung sudah berada di atas rata-rata nilai indeks pembangunan manusia Provinsi Bali yang berada pada angka 71,62 pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi 77,10 di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2012-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	67,94	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35	72,36	72,75	73,58	74,04
Kab. Tabanan	71,69	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16	76,17	76,45	76,75	77,43
Kab. Badung	77,26	77,63	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59	81,60	81,83	82,13	83,08
Kab. Gianyar	73,36	74,00	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14	77,36	77,70	78,39	79,24
Kab. Klungkung	67,64	68,08	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71	71,73	71,75	72,55	73,11
Kab. Bangli	64,53	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35	69,36	69,37	70,26	70,79
Kab. Karangasem	62,95	63,70	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34	67,35	67,36	68,28	68,91
Kab. Buleleng	68,29	68,83	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30	72,55	72,56	73,45	73,97
Kota Denpasar	80,45	81,32	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68	83,93	84,03	84,37	84,73
Provinsi Bali	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44	77,10

Sumber: BPS Provinsi Bali

Gambar 2.25.

Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar, dan Provinsi Bali Tahun 2012-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali

2. Kejahteraan Sosial dan Budaya

A. Indeks Keluarga Sehat

Indeks keluarga sehat adalah salah satu indikator pemerintah dalam mengukur kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan indeks keluarga sehat yaitu keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bati mendapat air susu (ASI) eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar dan penderita hipertensi melakukan pengebotan secara teratur. Secara keseluruhan, Kabupaten Badung menunjukkan indikator kesehatan keluarga yang cukup baik (0,61) terutama dalam hal persalinan di fasilitas kesehatan (99,83), imunisasi bayi (99,73), dan pemantauan pertumbuhan balita (97,11). Namun, ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih, seperti pengobatan teratur untuk penderita hipertensi (48,37) dan peningkatan partisipasi dalam program keluarga berencana (70,27). Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan sangat penting untuk mencapai indeks keluarga sehat yang lebih tinggi.

Tabel 2.30.

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten	Indeks Keluarga Sehat Inti	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
Badung	0.61	70.27	99.83	99.73	88.90	97.11	75.54	48.37
Bangli	0,34	61,99	95,09	97,54	89,14	94,56	17,30	22,44
Buleleng	0,30	50,52	97,09	98,32	87,73	91,58	32,46	35,18
Gianyar	0,31	66,44	97,96	99,46	86,54	96,61	23,29	34,82
Jembrana	0,43	60,95	97,21	99,48	93,49	97,68	29,66	40,91
Karangasem	0,33	44,40	97,12	97,91	90,36	94,94	41,43	22,12
Klungkung	0,58	67,72	99,74	99,80	89,42	98,71	65,08	53,58
Denpasar	0,36	35,21	94,86	98,34	86,17	91,40	31,80	26,52
Tabanan	0,47	78,49	99,93	99,77	89,25	97,90	69,58	50,82

Sumber: Sistem Informasi Kesehatan—Krama Bali Sehat, 2024

B. Indeks Perlindungan Anak

Sebagai salah satu kabupaten yang secara aktif sedang melaksanakan pengembangan kualitas SDM, Kabupaten Badung berkomitmen dalam usaha perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menjamin perlindungan anak dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas nasional. Sesuai dengan implementasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, upaya untuk menjamin perlindungan anak dilaksanakan melalui lima klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Dimana klaster-klaster tersebut memiliki bobotnya masing-masing yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31.
Pembobotan Klaster Indeks Perlindungan Anak

Klaster		Bobot Klaster
1	Hak Sipil dan Kebebasan	20%
2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	22%
3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%
4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%
5	Perlindungan Khusus	22%
Total Bobot		100%

Sumber: Buku Indeks Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Badung tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) dengan skor 50,74. Hal ini menunjukkan bahwa pada klaster ini masih perlu peningkatan pada indikator kepemilikan akta kelahiran bagi anak di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)/panti asuhan, peningkatan jumlah pusat ILA (Informasi Layak Anak), dan pembentukan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan.

2. Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) dengan skor 88,51. Pada klaster ini walaupun telah mendapatkan skor tinggi, akan tetapi masih bisa ditingkatkan pada standarisasi lembaga pengasuhan alternatif yang ada di Kabupaten Badung.

3. Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) dengan skor 90,88. Ini adalah skor yang tinggi, dan masih bisa dinaikan lagi dengan peningkatan penyediaan pojok laktasi dan memaksimalkan pemanfaatan pojok laktasi yang sudah tersedia, baik layanan public dan perkantoran.

4. Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) dengan skor 48,19. Dari 4 klaster diatas klister IV memperoleh skor yang paling rendah. Beberapa hal penyebabnya yaitu: a) Belum maksimalnya penyediaan program Rute Aman dan Zona Selamat Sekolah dengan, b) Belum semua jenjang pendidikan dilengkapi fasilitas lapangan olahraga dan ruang serbaguna, c) Belum semua Pusat Kreatifitas Anak (PKA) beroperasi secara legal dan tercatat di dinas terkait.



Tabel 2.32.
Indeks Klaster I-V menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengusaha Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Jembrana	52,58	80,02	85,61	31,20	68,48	64,21	62,94	69,53
2	Tabanan	49,99	80,86	85,64	39,75	67,66	65,24	64,48	73,85
3	Badung	50,74	88,51	90,88	48,19	74,34	71,01	69,96	78,49
4	Gianyar	53,05	84,23	94,18	36,52	71,02	68,29	67,44	76,89
5	Klungkung	48,90	81,08	87,69	31,92	69,23	64,38	62,93	70,97
6	Baangli	51,35	66,95	88,82	31,09	51,40	57,89	59,67	56,12
7	Karangasem	46,38	67,29	87,07	28,57	46,13	55,05	57,50	47,03
8	Buleleng	46,58	64,90	85,90	29,44	61,02	57,78	56,81	64,27
9	Kota Denpasar	49,99	90,03	88,25	45,17	72,55	69,78	68,89	80,73
10	Provinsi Bali	50,62	80,09	88,52	37,55	64,50	64,63	64,58	69,16

Sumber: Buku Indeks Perlindungan Anak, 2022

C. Kesetaraan Gender

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti Indeks Pembangunan Manusia yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Gender akan semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung pada Tahun 2023 berada pada angka 95,94 atau meningkat dari tahun 2022 dengan IPG 95,65. Peningkatan IPG Kabupaten Badung menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama periode 2022-2023 telah mengikutsertakan kesetaraan gender yang semakin baik. Meski meningkat, IPG Kabupaten Badung masih berada di bawah Kota Denpasar dimana berada pada peringkat kedua tepat di bawah Kota Denpasar yang memiliki nilai sebesar 96,88. IPG kabupaten Badung sendiri berada diatas rata-rata IPG Provinsi

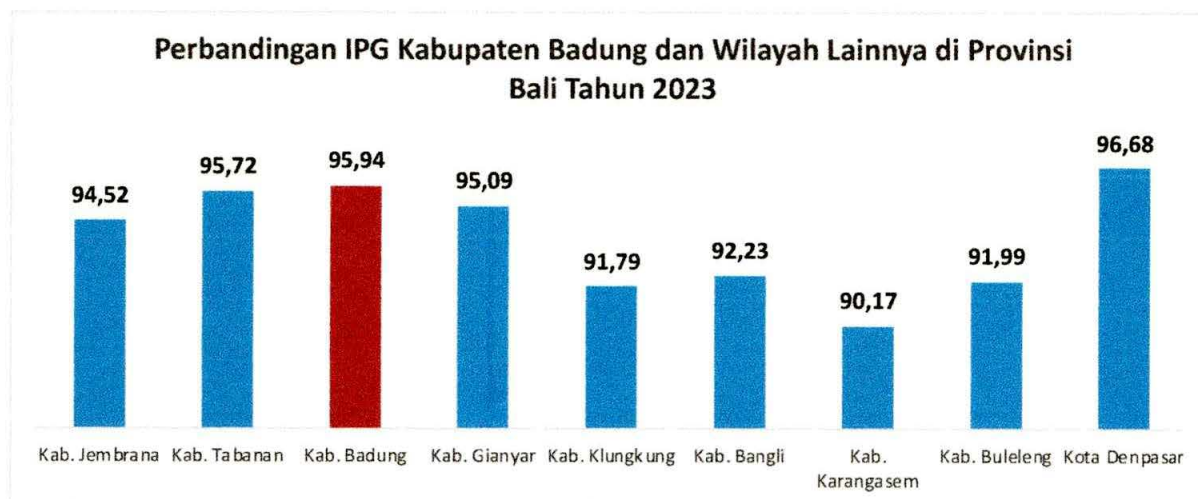
Bali yang memiliki nilai sebesar 94,59. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	93,21	93,52	93,38	93,86	94,43	94,52
Kab. Tabanan	95,34	95,35	95,36	95,42	95,45	95,72
Kab. Badung	94,90	95,50	95,51	95,53	95,65	95,94
Kab. Gianyar	94,16	94,26	94,63	94,7	94,72	95,09
Kab. Klungkung	91,06	91,10	91,12	91,18	91,37	91,79
Kab. Bangli	91,23	91,25	91,54	91,58	91,86	92,23
Kab. Karangasem	89,22	88,87	88,93	88,96	89,90	90,17
Kab. Buleleng	91,92	91,94	91,59	91,65	91,85	91,99
Kota Denpasar	96,89	96,92	96,77	96,88	96,92	96,68
Provinsi Bali	93,71	93,72	93,79	94,01	94,36	94,59

Sumber: BPS Provinsi Bali 2024

Gambar 2.26.
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

2) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator

proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, IDG Kabupaten Badung selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun khususnya pasca pandemi COVID-19. Pada Tahun 2023 tercatat IDG Kabupaten Badung adalah 76,08 dimana angka ini menurun dari tahun 2022 dengan IDG sebesar 76,33. IDG Badung tahun 2022 ini juga menurun dari tahun 2021 yang tercatat memiliki angka 76,99. Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Bali, IDG Kabupaten Badung pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan sendiri pada tahun 2023 memiliki IDG sebesar 78,07 dan rata-rata IDG Provinsi Bali pada tahun yang sama adalah 73,77.

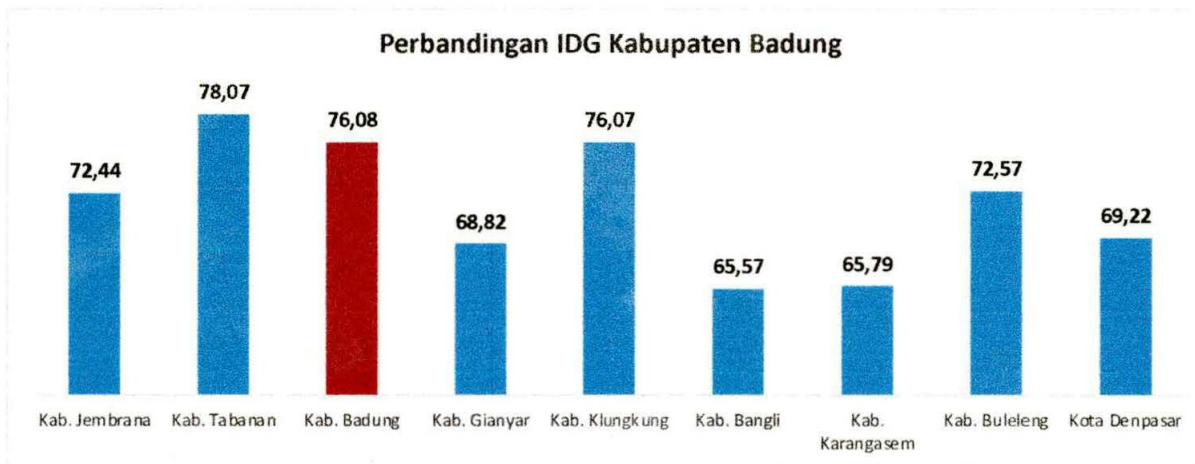
Tabel 2.34.
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	66,23	74,60	74,39	74,55	72,40	72,44
Kab. Tabanan	61,62	78,14	77,95	78,27	78,51	78,07
Kab. Badung	62,03	75,23	75,49	76,99	76,33	76,08
Kab. Gianyar	62,59	66,22	66,14	65,64	68,58	68,82
Kab. Klungkung	71,77	78,35	78,36	75,50	75,75	76,07
Kab. Bangli	61,07	61,81	65,16	65,36	65,69	65,57
Kab. Karangasem	60,20	60,77	63,61	65,09	64,59	65,79
Kab. Buleleng	65,58	73,13	72,89	72,91	73,73	72,57
Kota Denpasar	59,09	62,16	67,26	67,02	67,21	69,22
Provinsi Bali	64,18	72,27	72,16	72,17	72,29	73,77

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.27.

Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

3) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran Indeks Ketimpangan Gender dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Indeks Ketimpangan Gender dinilai semakin kecil maka semakin baik. Dimana apabila nilainya 0,5 artinya pada suatu wilayah, pembangunan berdasarkan gender mengalami ketimpangan yang dikoreksi sebanyak 50%.

Komponen pembentukan indeks ketimpangan gender terdiri atas beberapa komponen yaitu faktor risiko kematian ibu yang dihitung dengan proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan, komponen fertilitas remaja yang dihitung dari proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, komponen pendidikan yang dihitung dari persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA, komponen parlemen yang dihitung berdasarkan persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen dan komponen pasar kerja yang dihitung berdasarkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

IKG Kabupaten Badung mengalami tren penurunan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, pada tahun 2018 IKG Badung tercatat 0,216 dan pada tahun 2023 menurun signifikan menjadi 0,126. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Badung terus menurun. Kabupaten Badung memiliki IKG paling rendah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Bali. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Bali sendiri, IKG Badung terpaut hampir 1/3 dari IKG Provinsi Bali.



Tabel 2.35.
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	0,255	0,252	0,365	0,320	0,206	0,211
Kab. Tabanan	0,240	0,168	0,236	0,148	0,180	0,170
Kab. Badung	0,216	0,149	0,142	0,130	0,118	0,126
Kab. Gianyar	0,238	0,306	0,216	0,204	0,193	0,193
Kab. Klungkung	0,176	0,157	0,149	0,193	0,198	0,186
Kab. Bangli	0,284	0,389	0,362	0,261	0,257	0,249
Kab. Karangasem	0,479	0,342	0,401	0,297	0,358	0,284
Kab. Buleleng	0,306	0,384	0,405	0,421	0,462	0,389
Kota Denpasar	0,313	0,271	0,348	0,212	0,303	0,288
Provinsi Bali	0,262	0,237	0,305	0,265	0,321	0,239

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitas pada skala nasional antar daerah ataupun pada skala internasional antar negara. Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan internasional.

Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola dan berupa pembangunan infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah tercapainya produktivitas suatu daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian daerah. Semakin kompetitif daya saing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat.

Bank Indonesia mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut berdasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor *input*, *output*, dan *outcome* yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki

makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB atau tingkat kesempatan kerja.

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pariwisata menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung. Pantai-pantai seperti Kuta, Seminyak, dan Nusa Dua adalah daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari kesegaran alam dan hiburan. Selain itu, keberadaan resor mewah, villa, restoran, dan pusat perbelanjaan menjadikan Kabupaten Badung sebagai pusat aktivitas ekonomi yang berkembang memiliki perkembangan cukup pesat.

Selain pariwisata, sektor pertanian juga memainkan peran penting dalam ekonomi Kabupaten Badung. Kabupaten Badung utamanya pada wilayah bagian utara, terkenal dengan produksi pertanian dan buah-buahan seperti mangga, jeruk, dan pepaya. Pertanian organik juga semakin berkembang di Kabupaten Badung, mengikuti tren global untuk produk-produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dapat dilihat dalam beberapa faktor yaitu:

A. Distribusi PDRB Kabupaten Badung Berdasarkan Lapangan Usaha

Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2023, Kabupaten Badung telah menjadi sorotan utama dalam peta ekonomi Bali dengan dinamika distribusi PDRB-nya yang menarik. Awalnya, pada tahun 2018, Badung memperlihatkan keunggulan yang mengesankan dalam struktur PDRB, dengan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi kekuatan utama dalam kontribusinya dengan distribusi sebesar 28,66%. PDRB Badung pada saat itu juga memiliki satu lagi sektor yang mendominasi yaitu sektor transportasi dan pergudangan dengan distribusi sebesar 26,21%. Dapat dikatakan Sektor Pariwisata benar-benar menguasai ekonomi Kabupaten Badung. Namun, pada pertengahan periode tersebut, distribusi PDRB Badung mengalami kontraksi yang sangat signifikan. Tren pertumbuhan yang solid terhenti di beberapa titik, terutama di tengah-tengah periode, dimana sejumlah faktor, termasuk krisis ekonomi global yang dikarenakan pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola kunjungan wisatawan yang memberikan tekanan signifikan.

Pada saat-saat seperti itu, sektor pariwisata yang biasanya menjadi tulang punggung ekonomi Badung, mengalami penurunan yang mencolok. Hal ini memberikan dampak yang nyata pada distribusi PDRB, dengan sektor-sektor lain seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Konstruksi yang distribusinya tergolong stabil dan cenderung meningkat, hal ini memungkinkan sektor lain dapat menjadi penopang sementara dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah Kabupaten Badung.

Meskipun demikian, Badung menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pasca-masa penurunan, upaya pemulihan yang gigih dan adaptasi terhadap perubahan tren ekonomi global membantu mengangkat distribusi PDRB kembali ke jalurnya yang positif. Seiring berjalannya waktu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan distribusi sebesar 23,21% pada tahun 2021, lalu naik kembali pada tahun 2022 sebesar 23,57% dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 24,67%. Hal ini didukung oleh investasi

dalam infrastruktur pariwisata, promosi yang lebih agresif, dan diversifikasi produk wisata.

Periode fluktuasi ini tidak hanya menjadi pelajaran berharga bagi Kabupaten Badung tetapi juga menjadi titik fokus untuk perencanaan strategis masa depan. Evaluasi mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi PDRB menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan ketangguhan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, Kabupaten Badung dapat terus memperkokoh posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi terkemuka di Bali dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.

Untuk lebih jelasnya, distribusi kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Badung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Badung Tahun 2018-2023

Kategori Lapangan Usaha	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,95	5,87	7,60	8,51	7,16	6,08
Pertambangan dan Penggalian	0,28	0,27	0,34	0,36	0,31	0,26
Industri Pengolahan	3,64	3,61	4,40	4,79	4,23	3,58
Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,19	0,16	0,15	0,16	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,21	0,26	0,27	0,23	0,20
Konstruksi	8,69	8,78	11,22	11,64	10,28	8,53
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	6,37	7,79	8,55	7,82	6,93
Transportasi dan Pergudangan	26,21	26,14	17,10	12,78	20,76	27,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,66	28,53	24,46	23,21	23,57	24,67
Informasi dan Komunikasi	5,54	5,60	7,97	9,08	7,48	6,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,40	2,46	3,06	3,32	3,17	2,99
Real Estat	3,12	3,14	4,10	4,60	3,99	3,33
Jasa Perusahaan	0,67	0,66	0,84	0,90	0,83	0,74
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,12	4,06	4,46	3,77	3,19
Jasa Pendidikan	2,98	2,99	3,91	4,34	3,55	2,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,27	1,76	2,02	1,70	1,44
Jasa Lainnya	0,76	0,78	0,96	1,03	0,99	0,89
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Badung Tahun 2024

B. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung

Selama periode 2010 hingga 2023, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Badung mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi daerah tersebut. Awalnya, pada tahun 2010 sampai tahun 2019, PDRB Badung menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan kuat, didorong oleh perkembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan utama Kabupaten Badung. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung. Dilihat dari jumlahnya, PDRB Kabupaten Badung memiliki perkembangan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2010 jumlah PDRB Kabupaten Badung memiliki jumlah sebesar 20.848.561,24 Juta Rupiah, dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi berjumlah 62.836.113,17 Juta Rupiah.

Namun, fluktuasi mulai terlihat seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global dan faktor internal dikarenakan Pandemi COVID-19. Pada beberapa tahun di tengah periode tersebut, PDRB Kabupaten Badung mengalami penurunan hingga berjumlah sebesar 49.026.027,29 Juta Rupiah, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi global, perubahan tren pariwisata, atau faktor-faktor lokal seperti adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang memaksa perekonomian di Kabupaten Badung mengalami penurunan.

Selama periode fluktuasi ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan ekonomi lokal untuk melakukan evaluasi mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi tersebut. Hal ini penting untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi risiko fluktuasi di masa depan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Kabupaten Badung.

Meskipun demikian, Badung tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Tidak lama setelah periode penurunan, PDRB Badung kembali pulih dan bahkan mengalami pertumbuhan yang pesat di beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Badung meningkat hingga berjumlah 68.397.561,91 Juta Rupiah. Hal ini terjadi karena upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, investasi dalam infrastruktur pariwisata, atau adaptasi terhadap perubahan tren global.

Tabel 2.37.
Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Badung Tahun 2018-2023

Kategori Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.440.189,79	3.690.350,87	3.725.855,68	3.817.979,06	3.958.842,15	4.160.349,32
Pertambangan dan Penggalian	160.428,43	168.722,78	166.713,27	162.834,67	173.454,78	176.424,08
Industri Pengolahan	2.102.106,81	2.270.376,65	2.157.153,95	2.149.637,85	2.340.266,80	2.447.355,08
Pengadaan Listrik dan Gas	113.050,08	120.695,80	76.763,63	69.460,68	86.470,56	98.010,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	123.236,42	130.212,49	128.872,64	122.318,12	126.000,66	133.721,84
Konstruksi	5.020.409,87	5.517.282,89	5.498.713,60	5.225.361,78	5.682.997,77	5.831.279,10
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.646.377,22	4.001.287,03	3.820.088,34	3.838.160,37	4.320.982,49	4.738.448,09

Kategori Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transportasi dan Pergudangan	15.149.339,36	16.424.218,20	8.384.068,60	5.734.099,42	11.477.866,06	19.131.742,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.564.216,96	17.929.056,57	11.993.933,23	10.415.394,46	13.034.218,24	16.870.404,33
Informasi dan Komunikasi	3.201.001,85	3.517.861,17	3.908.081,77	4.073.862,12	4.133.369,68	4.216.549,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.770,10	1.543.421,54	1.501.162,64	1.487.860,16	1.753.186,88	2.043.883,80
Real Estat	1.800.528,53	1.973.191,23	2.012.484,11	2.064.844,15	2.204.535,95	2.278.749,26
Jasa Perusahaan	386.100,77	417.671,99	410.121,22	402.669,59	458.276,24	508.423,39
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.808.755,39	1.959.477,33	1.989.475,23	2.001.229,44	2.086.235,78	2.184.119,45
Jasa Pendidikan	1.723.287,85	1.880.328,83	1.919.157,31	1.946.425,97	1.965.509,23	1.980.372,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	727.759,75	800.009,29	864.305,56	905.962,18	942.239,86	986.583,93
Jasa Lainnya	437.693,22	491.949,05	469.076,49	463.980,15	545.547,02	611.145,40
PDRB	57.791.252,39	62.836.113,71	49.026.027,29	44.882.080,18	55.290.000,16	68.397.561,91

Sumber: BPS Kabupaten Badung Tahun 2024

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia dianalisis berdasarkan sub variabel ketenagakerjaan dan pendidikan. Sub variabel ketenagakerjaan meliputi angka ketergantungan, angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan produktivitas tenaga kerja. Sub variabel pendidikan meliputi Angka Partisipasi Sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pendidikan.

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Sekolah formal dan non formal penduduk umur 7-12 tahun di Kabupaten Badung pada periode 2019-2023 mendekati 100%, yaitu berkisar 99,22 - 100%. Ini menunjukkan hampir semua penduduk umur 7-12 tahun telah berpartisipasi di jenjang pendidikan SD/ sederajat.

APS formal dan non formal penduduk umur 13-15 tahun dalam periode 2019-2023 juga sudah tinggi angkanya mendekati 100%, yaitu berkisar 98,75 – 100%. Pada tahun-tahun tertentu terdapat APS kurang dari 100% dimungkinkan karena adanya pergeseran umur memasuki jenjang pendidikan SMP/ sederajat.

Sedangkan APS formal dan non formal penduduk umur 16-18 tahun pada periode 2019-2023 berkisar 89,68 – 93,77%. Ini berarti rata-rata kurang dari 10% penduduk umur 16-18 tahun tidak sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/ sederajat.

Dibandingkan dengan Provinsi Bali, APS umur 7-12 tahun, umur 13-15 tahun, dan umur 16-18 tahun di Kabupaten Badung pada umumnya lebih tinggi di bandingkan APS di tingkat provinsi. Ini berarti tingkat partisipasi penduduk menurut kelompok umur tersebut di Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan di tingkat provinsi.

Tabel 2.38.
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Badung tahun 2019-2023

No	Kelompok Umur Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
	Kabupaten Badung					
1	7-12 Tahun	100,00	99,86	99,97	99,97	99,99
2	13-15 Tahun	98,81	99,19	99,20	98,75	99,49
3	16-18 Tahun	92,09	91,27	90,79	90,69	90,30
	Provinsi Bali					
1	7-12 Tahun	99,71	99,53	99,70	99,55	99,61
2	13-15 Tahun	97,72	98,21	98,22	97,85	97,95
3	16-18 Tahun	82,60	82,77	83,96	83,84	84,73

Sumber: Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

B. Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang positif. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah untuk laki-laki berada di angka 11,08 tahun, dan meningkat sedikit menjadi 11,09 tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang lebih signifikan, dengan rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai 11,32 tahun. Sementara itu, untuk perempuan, rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 adalah 9,97 tahun. Angka ini naik menjadi 10,07 tahun pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 10,52 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian target pendidikan di Kabupaten Badung.

Tabel 2.39.
Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Badung 2021-2023

Kabupaten/Kota		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
		2021	2022	2023
Kabupaten Badung	Laki-laki	11,08	11,09	11,32
	Perempuan	9,97	10,07	10,52

Sumber: BPS Provinsi Bali 2023

C. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Perkembangan harapan lama sekolah di Kabupaten Badung selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah di Kabupaten Badung tercatat sebesar 13,99 tahun. Angka ini meningkat menjadi 14,03 tahun pada tahun 2022, dan terus naik hingga mencapai 14,22 tahun pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses

dan kualitas pendidikan di Kabupaten Badung. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, Kabupaten Badung menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan harapan lama sekolah yang terus berada di atas rata-rata provinsi.

Tabel 2.40.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	12,92	13,01	13,02
Kab. Tabanan	13,01	13,03	13,04
Kab. Badung	13,99	14,03	14,22
Kab. Gianyar	13,97	14,01	14,09
Kab. Klungkung	13,00	13,02	13,12
Kab. Bangli	12,35	12,49	12,52
Kab. Karangasem	12,42	12,62	12,63
Kab. Buleleng	13,08	13,26	13,27
Kota Denpasar	14,09	14,1	14,11
Provinsi Bali	13,4	13,48	13,58

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

D. Angka Literasi dan Numerisasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan dua makna istilah literasi, yaitu: (1) kemampuan menulis dan membaca; (2) pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Istilah literasi tampaknya merupakan saduran dari bahasa Inggris: *literacy*, yang memiliki arti: (1) *The ability to read and write*; (2) *Competence or knowledge in a specified area*.

Istilah literasi mulai marak digunakan di sekitar abad ke-19, sejalan dengan meluasnya dampak mesin cetak (Revolusi Guttenberg) yang merambah hingga negeri-negeri jajahan (Anderson, 2008). Semula, term literasi merujuk kepada praktik menulis dan membaca yang digunakan untuk membedakan antara mereka yang sudah melek aksara (*literate*) dan yang masih buta huruf (*illiterate*). Namun, istilah ini kemudian berkembang dan dipadankan dengan istilah 'pengetahuan' dan 'keterampilan' dalam berbagai bidang kehidupan. Pemerintah sendiri menyebutkan terdapat enam literasi dasar yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara, yakni literasi baca-tulis hitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi kewarganegaraan (Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi VI/Oktober-2016).

Dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Bali, seluruh Kabupaten/Kota masuk dalam kompetensi Literasi SMP dengan kategori Tinggi (60-80), serta dalam kompetensi Literasi SD 8 Kabupaten masuk dalam kategori sedang (40-60) dan hanya Kota Denpasar yang termasuk dalam kompetensi literasi SD kategori tinggi (60-80) dengan rata-rata 62,35. Namun dalam kompetensi numerisasi SD, Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng masuk dalam kompetensi numerisasi kategori rendah (20-40) dan Kabupaten lainnya masuk dalam kategori sedang (40-60). Dalam kompetensi numerisasi SMP hanya Kota Denpasar yang masuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata

61,18. Untuk lebih jelasnya tingkat kompetensi literasi dan numerisasi di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Badung menunjukkan variasi tingkat kompetensi antara tingkat SD dan SMP. Untuk tingkat SD, rata-rata kemampuan literasi adalah 83 yang masuk kategori baik sedangkan rata-rata kemampuan numerasi adalah 69,96 yang masuk kategori sedang. Di tingkat SMP, rata-rata kompetensi literasi siswa meningkat signifikan ke 89,95 yang masuk dalam kategori baik, sementara rata-rata kompetensi numerasi berada di 85,75, yang masih berada dalam kategori baik.

Tabel 2.41.

Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD SMP SMA di Provinsi Bali Tahun 2022

Nama Subyek	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Kemampuan Numerisasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Kompetensi Numerisasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional
Jembrana	53,93	41,41	68,05	56,35
Tabanan	58,20	42,66	68,60	57,01
Badung	83	69,96	89,95	85,75
Gianyar	59,47	47,35	68,01	57,04
Klungkung	55,51	42,41	66,52	55,75
Bangli	52,74	38,61	64,49	54,55
Karangasem	52,37	39,56	63,46	54,20
Buleleng	52,93	39,56	65,47	54,73
Denpasar	62,35	39,50	75,61	61,18
Provinsi Bali	-	-	-	-

Sumber: Dokumen Rancangan Awal RPJPD Provinsi Bali

E. Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk umur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok bekerja dan kelompok pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya.

Penduduk usia kerja adalah penduduk umur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok bekerja dan kelompok pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya.

Penduduk usia kerja di Kabupaten Badung mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja tahun 2019 sebanyak 514.626 orang meningkat menjadi 572.909 orang di tahun 2022 atau meningkat rata-rata 3,37% pertahun.

Penduduk usia kerja sebagai angkatan kerja tahun 2023 sebanyak 333.548 orang, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 373.958 orang. Peningkatan rata-rata 3,66% pertahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dalam periode 2019-2023 berkisar 70,43% sampai 72,92%, dengan rata-rata 72,21%.

Tabel 2.42.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Badung tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk usia kerja (orang)					
Laki-laki	262.137	276.556	283.945	291.501	
Perempuan	252.489	266.745	274.027	281.408	
Laki-laki + Perempuan	514.626	543.301	557.972	572.909	
Angkatan kerja (orang)					
Laki-laki	212.135	224.714	220.492	233.634	183.352
Perempuan	161.823	170.229	184.172	183.444	150.131
Laki-laki + Perempuan	373.958	394.943	404.664	417.078	333.548
TPAK (%)					
Laki-laki	80,93	81,25	77,65	80,15	81,42
Perempuan	64,09	63,82	67,21	65,19	66,21
Laki-laki + Perempuan	72,67	72,69	72,52	72,80	73,79

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka, 2024

Meskipun mengalami peningkatan, TPAK Kabupaten Badung lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali yaitu 77,08%, bahkan terendah kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Ini menunjukkan meskipun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, namun serapan tenaga kerja untuk penduduk Kabupaten Badung masih belum optimal sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemastian penggunaan tenaga kerja lokal khususnya pada sektor pariwisata untuk meningkatkan TPAK Kabupaten Badung sehingga menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali.

Tabel 2.43.

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2013-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	70.26	72.49	70.90	-	78.62	77.30	67.36	75.92	81.26	80.60	80.05
Kab. Tabanan	77.90	78.35	77.77	-	71.33	77.29	75.42	75.47	74.98	76.93	74.16
Kab. Badung	73.95	71.41	72.92	-	70.43	71.15	72.60	72.69	72.52	72.80	73.79
Kab. Gianyar	72.63	72.13	76.40	-	78.17	78.96	76.11	71.27	69.88	80.26	77.26
Kab. Klungkung	77.36	77.67	78.99	-	77.07	77.87	76.05	75.27	72.83	79.81	79.88
Kab. Bangli	86.24	87.60	82.70	-	84.14	85.72	83.11	82.20	82.09	83.36	83.04
Kab. Karangasem	83.13	82.36	82.14	-	78.37	82.28	80.61	80.75	81.15	85.39	86.01
Kab. Buleleng	75.56	72.73	73.94	-	75.44	76.60	69.51	75.07	73.08	75.38	75.49
Kota Denpasar	69.18	72.26	72.69	-	73.91	73.52	71.70	70.91	68.67	72.37	73.13
Provinsi Bali	74.93	74.91	75.51	77.24	75.24	76.56	73.77	74.32	73.54	76.86	77.08

Sumber: Dokumen Rancangan Awal RPJPD Provinsi Bali

3. Daya Saing fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemandapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu kondisi baik, kondisi sedang, dan kondisi rusak.

Proporsi kondisi jalan baik merupakan klasifikasi dengan panjang paling tinggi yaitu 703.130 m, dimana panjang ini lebih tinggi daripada pada tahun 2019 dengan panjang 619.175 m. Kondisi jalan sedang pada tahun 2023 yaitu 90.748 m. Jumlah ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang memiliki panjang yaitu 101.879 m. Kondisi jalan rusak merupakan klasifikasi yang meningkat secara signifikan. Dimana pada tahun 2019 Kabupaten Badung tidak memiliki kondisi jalan rusak, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 7.415 m, kemudian meningkat lagi di tahun berikutnya menjadi 8.176 m, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 9.372 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44.

Proporsi Panjang Jalan Menurut Klasifikasi Kondisi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Kondisi Baik	619.175	662.507	627.326	572.652	703.130
Kondisi Sedang	66.275	13.980	37.867	101.879	90.748
Kondisi Rusak	0	7.415	8.176	6.572	9.372

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka, 2024

Gambar 2.28.

Grafik Perbandingan Panjang Jalan Menurut Klasifikasi Kondisi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023



Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka, 2024

Kabupaten Badung harus mengurangi panjang jaringan jalan yang mengalami kerusakan karena aksesibilitas yang baik merupakan kunci dari pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan. Tanpa adanya aksesibilitas yang baik maka distribusi logistik, penumpang, barang, dan jasa tidak akan dapat berjalan dengan optimal. Terlebih Kabupaten Badung memiliki bentuk wilayah memanjang layaknya keris sehingga kualitas aksesibilitas menjadi faktor penentu bagaimana distribusi pembangunan dapat berjalan secara adil dan merata.

B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kabupaten Badung pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2023 akses rumah tangga terhadap sanitasi layak sebesar 84,41 berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2023.

Tabel 2.45.

Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Badung	100	100	100	100	84,41
2	Provinsi Bali	95,4	88,2	97,12	98,42	95,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024 dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung, 2023

Rumah tangga dengan sanitasi yang layak akan memberikan pengaruh pada kualitas kehidupan masyarakatnya. Apabila semakin banyak penduduk yang tidak terpenuhi akses

sanitasi layaknya maka akan semakin besar potensi munculnya rumah tidak layak huni yang berkorelasi pada timbulnya kawasan kumuh. Kawasan kumuh merupakan cerminan rendahnya kualitas hunian pada kawasan tersebut yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat serta citra daerah. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya penuntasan cakupan pelayanan sanitasi layak hingga mencapai 100% hingga 20 tahun mendatang.

Gambar 2.29.
Grafik Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024 dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung, 2023

C. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Jaringan yang langsung berfungsi sebagai sistem pengairan yang langsung ke lahan pertanian yaitu jaringan irigasi tersier. Jaringan ini terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnnya.

Berdasarkan Tabel 2.43 yang menunjukkan perkembangan rasio jaringan irigasi Kabupaten Badung dari tahun 2019 hingga 2023, dapat dilihat bahwa panjang jaringan primer, sekunder, dan tersier tetap konstan sepanjang periode ini. Panjang jaringan primer adalah 118.815 km, panjang jaringan sekunder adalah 94.972 km, dan panjang jaringan tersier adalah 139.556 km.

Namun, luas lahan budidaya mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2019, luas lahan budidaya adalah 2210.951 hektar, kemudian sedikit menurun menjadi 2199.952 hektar pada tahun 2020. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 menjadi 2189.007 hektar, dan terus menurun menjadi 2178.116 hektar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, luas lahan budidaya kembali menurun menjadi 2167.28 hektar.

Rasio jaringan irigasi menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode ini. Pada tahun 2019, rasio ini adalah 1,598, dan terus meningkat setiap tahun menjadi 1,606

pada tahun 2020, 1,614 pada tahun 2021, 1,622 pada tahun 2022, dan mencapai 1,630 pada tahun 2023. Peningkatan rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan jaringan irigasi yang lebih baik meskipun terjadi penurunan luas lahan budidaya.

Tabel 2.46.
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

Jaringan Irigasi	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jaringan Primer	118.815	118.815	118.815	118.815	118.815
Panjang Jaringan Sekunder	94.972	94.972	94.972	94.972	94.972
Panjang Jaringan Tersier	139.556	139.556	139.556	139.556	139.556
Luas Lahan Budidaya	2210,9518	2199,952	2189,007	2178,1164	2167,28
Rasio	1,598	1,606	1,614	1,622	1,630

Sumber: Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung

Berdasarkan Tabel 2.47 yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi Kabupaten Badung dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat beberapa indikator yang diukur, yaitu pasokan irigasi per area, pasokan irigasi relatif, pasokan air relatif, indeks luas areal, dan rancangan luas areal.

Pasokan irigasi per area tetap konstan sebesar 2.141 selama periode lima tahun ini. Demikian pula, pasokan irigasi relatif dan pasokan air relatif tetap stabil masing-masing pada angka 1.526 dan 1.617. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pasokan air irigasi yang dialirkan ke lahan pertanian tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode tersebut.

Indeks luas areal juga menunjukkan kestabilan pada angka 98.950 dari tahun 2019 hingga 2023. Indikator ini mengukur seberapa luas areal yang dapat diirigasi dengan sistem yang ada, dan kestabilannya menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam kemampuan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian.

Rancangan luas areal tetap pada 11.466 hektar sepanjang periode ini, menunjukkan bahwa perencanaan atau desain awal jaringan irigasi untuk mencakup area seluas itu tetap konsisten tanpa ada perubahan atau perluasan yang signifikan.

Secara keseluruhan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Badung selama periode 2019 hingga 2023 cukup stabil, dengan tidak adanya perubahan signifikan dalam pasokan air dan kemampuan irigasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi penurunan kualitas atau kapasitas irigasi.

Tabel 2.47.

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

No	Pasokan Irigasi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasok Irigasi per Area	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
2	Pasok Irigasi Relatif	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
3	Pasok Air Relatif	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
4	Indek Luas Areal	98.950	98.950	98.950	98.950	98.950
5	Rancangan Luas Areal	11.466	11.466	11.466	11.466	11.466

Sumber: Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung

D. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan sumber air minum layak adalah sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/ kolam/irigasi).

Memantau akses penduduk terhadap sumber air layak (*improved drinking water*) berdasarkan asumsi bahwa sumber air menyediakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).

Persentase rumah tangga di Kabupaten Badung yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023. Sebenarnya akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak telah mencapai 100% pada tahun 2021 namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan.

Sementara itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air utama perpipaan cenderung menurun. Pada tahun 2018, rumah tangga yang terlayani air bersih dari perpipaan telah mencapai 43,29% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 33,58%. Ini berarti bahwa peningkatan jumlah rumah tangga kurang diimbangi dengan pelayanan air minum perpipaan. Kondisi penurunan layanan air bersih perpipaan juga terjadi di tingkat provinsi. Akses rumah tangga terhadap layanan air bersih perpipaan di Badung lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi.

Gambar 2.30.

Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sumber Bersih Perpipaan Di Kabupaten Badung



Sumber: Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPIPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

E. Indeks Kualitas Air

Di Kabupaten Badung mengalir sejumlah sungai termasuk beberapa sungai lintas kabupaten/kota yaitu Tukad Ayung dan Tukad Penet. Sungai-sungai tersebut berperan penting sebagai sumber air untuk kebutuhan irigasi pertanian, air baku, perikanan, dan industri.

Saat ini, masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Kegiatan domestik, industri, peternakan, pertanian dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk melestarikan fungsi air. Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Sungai-sungai di Kabupaten Badung terutama di bagian hilir menghadapi permasalahan semakin meningkatnya beban pencemaran. Bahan-bahan pencemar memasuki perairan dapat melalui berbagai cara, misalnya melalui limpasan permukiman dan perkotaan, limpasan pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan limbah industri dan lain-lain. Sumber pencemar dapat berupa sumber tetap/tertentu (*point sources*) atau sumber tidak tetap/tak tentu/tersebar (*non-point sources/diffuse sources*). Sumber pencemar *point source* misalnya saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari sumber *point source* bersifat lokal, efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spasial kualitas air. Volume pencemar dari *point source* biasanya relatif tetap. Sumber pencemar *non-point source* dapat berupa *point source* dalam jumlah yang banyak, misalnya limpasan dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah permukiman penduduk (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan.

Berdasarkan pada tipe dampaknya terhadap organisme perairan laut beserta ekosistemnya, bahan-bahan pencemar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa urutan menurut peningkatan bahaya yang ditimbulkan (Duce, 2008), yaitu:

- 1) Senyawa-senyawa yang menyebabkan dampak mekanik yaitu bahan-bahan tersuspensi dan limbah padat (sampah).
- 2) Senyawa-senyawa pemacu efek eutrofikasi, meliputi nitrat dan fosfat, serta bahan-bahan organik lainnya, yang dapat mengakibatkan pertumbuhan fitoplankton secara cepat dimana hal ini dapat mengganggu keseimbangan, struktur dan fungsi ekosistem.
- 3) Senyawa-senyawa bersifat *saprogenik* yaitu senyawa *biodegradable*, yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut karena digunakan untuk proses dekomposisi.
- 4) Senyawa-senyawa menyebabkan efek toksik, antara lain logam berat, hidrokarbon klorinasi, dioksin dan furan, yang merusak proses fisiologis dan fungsi reproduksi, pencernaan dan respirasi.
- 5) Senyawa-senyawa bersifat mutagenik, antara lain *benzo(a)pyrene and other polycyclic aromatic compounds, biphenyls, radionuclides*, yang menimbulkan efek *karsinogenik, mutagenik dan tetragenik*.

Status mutu air, yaitu tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan, menunjukkan mutu air sungai-sungai di Kabupaten Badung pada musim hujan umumnya lebih baik dibandingkan pada musim kemarau. Pada musim hujan terjadi peningkatan volume air dan kecepatan aliran air yang membantu pengenceran bahan-bahan pencemar, baik bahan pencemar tersuspensi maupun terlarut, serta terjadi peningkatan laju purifikasi alamiahnya. Sedangkan secara spasial, mutu air sungai di bagian hulu lebih baik dibandingkan di bagian tengah dan hilir karena semakin ke hilir akan terjadi penumpukan atau akumulasi bahan-bahan pencemar.

Dari sepuluh sungai yang dipantau kualitasnya di Kabupaten Badung pada tahun 2022, status mutu air sungai pada musim hujan sebagian besar telah tergolong “cemar ringan”, hanya beberapa sungai pada bagian hulu yang statusnya “baik”, yaitu Tukad Ayung, Tukad Penet, dan Tukad Yeh Poh yang berstatus “baik”. Di bagian tengah dan hilir hanya terdapat satu sungai dengan status mutu air “baik” yaitu Tukad Bangiang. Sedangkan status mutu air sungai pada musim kemarau semuanya termasuk “cemar ringan” dari hulu sampai hilir.



Tabel 2.48.
Nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Di Kabupaten Badung Tahun 2022

Sungai	Nilai Indeks Pencemaran					
	Musim Hujan			Musim Kemarau		
	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
DAM Lukluk	3,9679	4,4971	4,7269	3,0213	3,0197	2,6867
Tukad Ayung	0,6147	2,2715	2,0638	2,2829	2,1843	2,9149
Tukad Bangiang	2,7581	0,7351	0,8692	2,6104	2,5788	2,6143
Tukad Danggang	1,5853	1,9128	2,6248	3,9085	3,6248	3,5357
Tukad Mati	1,5294	3,1246	2,8320	2,2077	3,0703	3,2880
Tukad Pangi	1,3310	1,9410	1,8729	2,5688	1,5812	2,6509
Tukas Penet	0,6601	1,4122	1,9391	2,1736	2,0158	2,6509
Tukad Ukian	1,9222	2,0332	2,2394	3,5713	3,4555	3,3567
Tukad Umalas	1,5279	1,5774	1,8343	2,3131	2,0045	2,6077
Tukad Yeh Poh	0,8361	2,2923	2,1675	2,6120	2,9591	3,0293

Sumber: Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Tabel 2.49.
Status Mutu Air Sungai Di Kabupaten Badung Tahun 2022

Sungai	Nilai Indeks Pencemaran					
	Musim Hujan			Musim Kemarau		
	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
DAM Lukluk	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukad Ayung	Baik	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukad Bangiang	Cemar Ringan	Baik	Baik	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukad Danggang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukad Mati	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukad Pangi	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukas Penet	Baik	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukad Ukian	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukad Umalas	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Tukad Yeh Poh	Baik	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan

Sumber: Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

2.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik didasari atas maksud implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Khususnya kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dan lain lain.

Pelayanan publik di masing-masing kabupaten di Bali sudah berada pada zona hijau dengan rata-rata nilai 94,01 atau sudah berada pada zona hijau. Nilai ini menempatkan Provinsi Bali sebagai provinsi dengan opini kualitas tertinggi kedua di bawah Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai pelayanan publik di Kabupaten Badung sendiri mengalami penurunan yang awalnya berada di angka 97,53 di tahun 2022 berubah menjadi 97,22 di tahun 2023. Apabila kita bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, Kabupaten Badung merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami penurunan nilai indeks pelayanan publik tersebut. Apabila kita bandingkan secara lebih spesifik dengan Kota Denpasar sebagai ibukota provinsi maka akan terlihat lonjakan nilai yang sangat signifikan dan selisih nilai yang cukup besar dengan Kabupaten Badung. Dimana pada tahun 2022 Kota Denpasar memiliki nilai sebesar 93,27 berubah menjadi 97,99 di tahun 2023.

Penurunan Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Badung ini tentu saja tidak boleh terjadi pada tahun-tahun berikutnya karena marwah dari pemerintah itu sendiri adalah melayani kepentingan publik. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk transformasi pelayanan publik yang andal dan prima demi mewujudkan Kabupaten Badung yang unggul pada seluruh aspek di Provinsi Bali.

Tabel 2.50.

Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	Nilai Pelayanan Publik	
	2022	2023
Jembrana	91,70	92,64
Tabanan	93,23	96,62
Badung	97,53	97,22
Gianyar	89,77	94,33
Klungkung	94,00	94,73
Bangli	93,55	96,13
Karangasem	90,47	94,84
Buleleng	93,80	96,38
Denpasar	93,27	97,99
Provinsi Bali	94,01	96,46

Sumber: Ombudsman RI

Gambar 2.31.

Grafik Perbandingan Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022-2023



Sumber: Ombudsman RI

2. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah mengacu pada proses penciptaan, pengadopsian, dan penerapan ide, produk, layanan atau praktik baru yang memiliki dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan dan perkembangan wilayah suatu daerah. Inovasi ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Penyelenggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah mengakibatkan pengoptimalisasian penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan pemerintahan daerah dalam berinovasi dalam penyelenggaraan kewenangannya sesuai dengan konteks dan dinamika yang terjadi di masing-masing daerah.

Pemerintah daerah perlu membuat strategi secara cermat dan matang agar inovasi yang dihadirkan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pelaksanaan inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, serta lingkungan organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Sumber daya yang dimaksud yaitu pengaturan organisasi, manajemen data dan jejaring atau kemitraan yang strategis. Hal-hal inilah yang harus mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam menghadirkan dan menjalankan inovasi daerah sesuai dengan kondisi dan dinamika yang ada.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 6301. A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022, inovasi daerah di

Kabupaten Badung mendapatkan nilai indeks sebesar 55,16 yang dimana menempatkan Kabupaten Badung menjadi kabupaten dengan nilai indeks tertinggi kedua di Provinsi Bali dengan status daerah inovatif tepat berada dibawah Kota Denpasar yang memiliki skor indeks sebesar 55,68 dengan status inovatif.

Kabupaten Badung membutuhkan upaya lebih untuk mendorong inovasi dan pemanfaatan inovasi daerah agar dapat mendorong atau mempercepat pertumbuhan pembangunan sekaligus transformasi daerah menjadi Badung yang unggul dan lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51.
Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bali Per Kabupaten Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Skor Indeks	Predikat
Jembrana	47,41	Inovatif
Tabanan	43,34	Inovatif
Badung	55,16	Inovatif
Gianyar	46,49	Inovatif
Klungkung	54,59	Inovatif
Bangli	36,51	Inovatif
Karangasem	49,64	Inovatif
Buleleng	51,78	Inovatif
Denpasar	55,68	Inovatif
Provinsi Bali	64,37	Sangat Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 6301. A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022

Gambar 2.32.
Grafik Perbandingan Indeks Inovasi Dearah Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2022



Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 6301. A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunaan SPBE. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Revolusi yang terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *E-Government*. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik membuka peluang untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan terpercaya.

Untuk mencapai sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan dengan cara penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas; membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; membangun SDM yang kompetan dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Keterlibatan pemerintah nasional dalam hal ini berbentuk tim koordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik nasional yang memiliki tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Sistem pemerintah berbasis elektronik yang ada di Kabupaten Badung sendiri mendapatkan nilai skor indeks sebesar 2,48 dengan predikat “cukup” yang mana merupakan peringkat tiga terbawah di Provinsi Bali. Apabila kita bandingkan dengan Kota Denpasar sebagai ibukota provinsi maka dapat kita lihat perbedaan yang sangat jauh, dimana skor indeks Kota Denpasar berada di angka 3,68 dengan predikat sangat baik. Hal ini menandakan masih perlunya peningkatan dan optimalisasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Badung. Untuk lebih jelasnya terkait dengan skor indeks dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52.

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Wilayah Lainnya di Bali Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Skor Indeks	Predikat
Jembrana	2,76	Baik
Tabanan	2,74	Baik
Badung	2,48	Cukup
Bangli	2,28	Cukup
Karangasem	2,16	Cukup
Buleleng	3,03	Baik
Denpasar	3,68	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023.

4. Daya Saing Iklim Investasi

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Nilai indeks ini dapat digunakan sebagai alat ukur yang komprehensif terhadap daya saing antar daerah guna merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Dimana, penilaian indeks daya saing daerah menggunakan skala 1-5. Adapun komponen indeks daya saing daerah pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1) Lingkungan Pendukung

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

2) Pasar

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.

3) Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

4) Ekosistem Inovasi

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Badung memiliki nilai sebesar 3,78 yang menempatkan Kabupaten sebagai peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bali tepat berada di bawah Kabupaten Buleleng dengan nilai indeks daya saing daerah sebesar 4,10. Apabila kita bandingkan dengan nilai indeks daya saing daerah Provinsi Bali secara nasional sebesar 3,85. Kendati demikian nilai yang dimiliki Kabupaten Badung sudah lebih tinggi dari rata-rata nilai indeks daya saing daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali



dengan nilai rata-rata sebesar 3,50. Dalam daya saing daerah, Kabupaten Badung memiliki permasalahan pada:

- Ketersediaan infrastruktur
- Stabilitas Ekonomi Makro
- Pasar Tenaga Kerja
- Sistem Keuangan
- Dinamisme Bisnis

Dibutuhkan upaya yang sistematis untuk mendongkrak kualitas dari aspek-aspek tersebut di atas agar daya saing daerah Kabupaten Badung dapat meningkat dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53.

Nilai Indeks Daya Saing Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023

Kabupaten	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor Indeks Daya Saing Daerah
	Institusi	Infrastruktur	Adopsi TIK	Stabilitas Ekonomi Makro	Kesehatan	Ketrampilan	Pasar Produk	Pasar Tenaga Kerja	Sistem Keuangan	Ukuran Pasar	Dinamisme Bisnis	Kapabilitas Inovasi	
PROV. BALI	4,7	2,98	4,8	3,63	3,97	4,1	3,44	3,73	3,14	4,36	3,52	3,85	3,85
RATA-RATA KAB/KOTA	4,4	2,98	4,46	3,18	4,08	3,82	4,19	3,23	2,05	4,24	2,76	2,6	3,5
JEMBRANA	4,35	3,34	4,43	3,17	4,06	3,78	4,14	3,16	1,57	4,06	2,59	2,05	3,39
TABANAN	4,51	2,67	4,35	2,91	4,15	4,12	4,05	3,12	1,96	4,28	2,99	2,55	3,47
BADUNG	4,19	2,83	4,83	3,32	4,26	4,23	5,00	3,51	1,90	4,62	2,67	4,01	3,78
GIANYAR	4,52	2,55	4,49	3,41	4,16	4,09	4,12	3,32	1,81	4,36	2,8	2	3,47
KLUNGKUNG	4,42	3,08	4,43	3,31	3,98	3,96	3,69	2,86	1,64	3,86	2,8	1,35	3,28
BANGLI	4,28	2,97	4,3	3,46	3,92	3,39	3,58	2,99	1,71	3,75	2,37	1,97	3,22
DENPASAR	4,41	3,36	4,13	2,8	3,91	3,54	3,97	2,86	1,57	4,14	2,75	1,66	3,26
KARANGASEM	4,3	2,83	4,29	2,92	4,02	3,32	4,18	3,48	2,09	4,46	2,77	3,43	3,51
BULELENG	4,59	3,17	4,88	3,29	4,25	3,93	5,00	3,79	4,21	4,65	3,07	4,33	4,1

Sumber: Buku Indeks Daya Saing Daerah 2023

Gambar 2.33.

Grafik Perbandingan Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Badung dengan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber: Buku Indeks Daya Saing Daerah 2023

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil proses evaluasi yang sudah dilaksanakan terhadap RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 baik Perda No. 2 Tahun 2009 maupun Perda No. 8 Tahun 2017, dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut.

1. Hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran pokok pembangunan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2009, yang ditetapkan dalam bentuk kuantitatif, dapat diringkas sebagai berikut:
 - a) Implementasi sasaran pokok menunjukkan tingkat keberhasilan yang **baik**, dengan rata-rata capaian implementasi sebesar 90%.
 - b) Dalam evaluasi ini, terdapat 3 indikator dengan capaian kategori tinggi dan 1 indikator dengan capaian kategori sangat tinggi.
2. Pada evaluasi sasaran pokok pembangunan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2009 yang diukur secara kualitatif, dapat disimpulkan bahwa:
 - a) Pencapaian sasaran pokok pembangunan mencapai tingkat yang **sangat baik**, dengan seluruh indikator relevan mencapai tingkat capaian sebesar 100%.
3. Untuk evaluasi sasaran pokok pembangunan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa:
 - a) Seluruh indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja daerah bersifat kualitatif.
 - b) Capaian sasaran pokok pembangunan tergolong sangat **baik**, dimana 5 indikator mencapai tingkat kinerja 100% (sangat tinggi), sementara 1 indikator mencapai tingkat capaian sebesar 79,05% (tinggi).
4. Perbedaan dalam sifat sasaran pokok RPJPD, apakah kuantitatif atau kualitatif, memiliki dampak yang signifikan terhadap evaluasi pencapaian masing-masing sasaran. Evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan ketika sasaran pokok berbentuk kuantitatif dengan penetapan target dan indikator kinerja yang jelas.
5. RPJPD Kabupaten Badung tidak memiliki target pencapaian yang bersifat kuantitatif untuk setiap periode (periode 5 tahunan), sehingga sulit untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja dalam setiap periode. Kehadiran target pencapaian yang berbasis kuantitatif pada setiap periode akan mempermudah proses evaluasi, memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap implementasi sasaran pokok pembangunan, dan memberikan dasar yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap RPJPD itu sendiri.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025, rekomendasi yang dapat diberikan untuk perencanaan RPJPD Kabupaten Badung periode berikutnya adalah perlunya menyusun target pencapaian yang bersifat kuantitatif untuk setiap periode (periode 5 tahunan). Dengan adanya target yang terukur memungkinkan pengukuran capaian kinerja yang jelas di setiap periode. Penerapan target kuantitatif ini juga memungkinkan adanya kontrol yang lebih efektif terhadap implementasi sasaran pokok pembangunan. Selain itu, target kuantitatif yang jelas akan memberikan landasan yang kuat untuk melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap RPJPD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.

Upaya ini dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan berbasis data, sehingga setiap intervensi pembangunan dapat dievaluasi secara objektif dan berkala, dan proses perencanaan periode berikutnya dapat ditingkatkan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari evaluasi periode sebelumnya.

2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

1. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan proses analisis yang bertujuan untuk memperkirakan perkembangan jumlah dan struktur penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Hasil proyeksi ini dapat menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, dengan memahami bagaimana populasi penduduk diperkirakan akan berkembang, kebijakan perencanaan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, permukiman dan sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, perhitungan proyeksi penduduk sangat krusial dalam penyusunan kebijakan perencanaan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, dilakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk mengevaluasi perkiraan pertumbuhan populasi penduduk di Kabupaten Badung sebagai berikut:

Tabel 2.54.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus Tahun 1961-2020

Periode Sensus (Tahun)	1961-1971	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2020
Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus (%)	2,60	2,34	1,23	2,33	4,62	0,09
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (%)						2,20

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2024

Selama periode sensus tahun 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung mencapai tingkat tertinggi sejak dimulainya sensus penduduk pada tahun 1961 yakni sebesar 4.62%. Dari hasil sensus tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung sebesar 2,2% per tahun. Angka ini akan menjadi acuan dalam melakukan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Badung hingga tahun 2045.

Tabel 2.55.

Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Rata Rata Laju Pertumbuhan	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		(%)	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Kuta selatan	2,20	146.213	163.020	181.759	202.651	225.946
2	Kuta	2,20	65.960	73.542	81.996	91.421	101.930
3	Kuta Utara	2,20	106.131	118.330	131.932	147.097	164.006

No	Kecamatan	Rata Rata Laju Pertumbuhan	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		(%)	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
4	Mengwi	2,20	148.049	165.067	184.041	205.197	228.783
5	Abiansemal	2,20	110.273	122.948	137.081	152.838	170.407
6	Petang	2,20	34.578	38.553	42.984	47.925	53.434
7	Jumlah		611.204	681.461	759.793	847.130	944.505

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dengan menggunakan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,2%, dapat ditentukan hasil proyeksi penduduk dari tahun 2025 hingga 2045 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 611.204 jiwa. Dari angka tersebut, dengan asumsi pertumbuhan penduduk yang konstan, jumlah penduduk Kabupaten Badung diperkirakan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 944.505 jiwa pada tahun 2045. Sehingga dapat dihitung pula terdapat selisih pertumbuhan penduduk antara tahun 2025 dan 2045 adalah sebesar 333.301 jiwa yang menunjukkan terdapat peningkatan penduduk sebesar 54,5% selama periode tersebut.

B. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan menggunakan data *sex ratio* Kabupaten Badung sebesar 100,35 maka dapat pula diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Badung tahun 2025-2045 yang didistribusikan berdasarkan jenis kelamin. *Sex ratio* merujuk pada perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi. Secara matematis, *sex ratio* dihitung dengan membagi jumlah laki-laki dalam populasi dengan jumlah perempuan. Oleh karena *sex ratio* penduduk Kabupaten Badung sebesar 100,35 maka secara matematis terdapat 100,35 laki-laki untuk setiap 100 perempuan atau sebanyak 10.035 laki-laki untuk setiap 10.000 perempuan dalam populasi tersebut. Mengacu pada data tersebut maka diperoleh hasil proyeksi penduduk Kabupaten Badung berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.56.

Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

No	Jenis kelamin	Sex Ratio	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Laki-laki	100,35	306.136	341.326	380.560	424.305	473.078
2	Perempuan		305.068	340.135	379.233	422.825	471.428
3	Jumlah		611.204	681.461	759.793	847.130	944.505

Sumber: Hasil Analisis, 2024

C. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan suatu proses untuk memperkirakan jumlah penduduk dalam berbagai kelompok usia dalam periode tertentu. Perhitungan proyeksi ini mengacu pada penggunaan data distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia yang diperoleh dari data BPS Kabupaten Badung.

Tabel 2.57.

Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025-2045

No.	Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	0 - 4 tahun	29.319	32.689	36.447	40.636	45.307
2	5 - 9 tahun	45.022	50.197	55.967	62.400	69.573
3	10 - 14 tahun	49.036	54.672	60.957	67.964	75.776
4	15 - 19 tahun	50.632	56.452	62.942	70.176	78.243
5	20 - 24 tahun	52.158	58.154	64.838	72.292	80.601
6	25 -29 tahun	44.109	49.179	54.832	61.135	68.163
7	30 -34 tahun	38.667	43.111	48.067	53.592	59.752
8	35 - 39 tahun	45.006	50.179	55.947	62.378	69.549
9	40 - 44 tahun	51.092	56.965	63.513	70.814	78.953
10	45 -49 tahun	56.947	63.493	70.791	78.929	88.001
11	50 - 54 tahun	48.209	53.751	59.929	66.818	74.499
12	55 -59 tahun	32.577	36.322	40.497	45.152	50.342
13	60 - 64 tahun	23.300	25.979	28.965	32.294	36.006
14	65 - 69 tahun	16.813	18.745	20.900	23.303	25.981
15	70 - 74 tahun	12.227	13.632	15.199	16.947	18.895
16	>75 tahun	16.090	17.939	20.001	22.300	24.864
17	TOTAL	611.204	681.461	759.793	847.130	944.505

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia tersebut, diketahui bahwa penduduk Kabupaten Badung lebih banyak oleh penduduk kelompok rentang usia 45-49 tahun. Hasil perhitungan proyeksi ini hanya mengacu pada data distribusi penduduk yang bersumber dari BPS Kabupaten Badung tanpa melibatkan perhitungan tingkat kelahiran, tingkat kematian dan migrasi. Dari hasil perhitungan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia tersebut dapat disoroti pentingnya penyusunan kebijakan perencanaan yang sesuai dengan struktur demografi tersebut. Umumnya kelompok usia 45-49 tahun ini masih dianggap sebagai kelompok usia produktif, meskipun tidak seenerjik kelompok usia yang lebih muda. Penduduk pada rentang usia tersebut masih sering aktif dalam dunia kerja, berkontribusi pada pekerjaan formal maupun informal, serta terlibat dalam kegiatan sosial dan masyarakat. Oleh karenanya, penyusunan kebijakan perencanaan wajib mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok usia ini, termasuk didalamnya hal kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan sosial lainnya.

2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Dalam membentuk suatu kebijakan perencanaan di wilayah tertentu perlu memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Proyeksi jumlah sarana dan prasarana sangat krusial dalam konteks ini karena menjadi kunci dalam menentukan infrastruktur yang dibutuhkan seperti kebutuhan akan rumah, air bersih, listrik dan lain sebagainya. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan perubahan sosio-ekonomi, proyeksi ini dapat memperhitungkan kebutuhan sarana prasarana dalam beberapa periode ke depan dan mengatur alokasi sumber daya yang tepat. Sehingga terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

A. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Perhitungan proyeksi rumah yang dilakukan merujuk pada hasil proyeksi penduduk dari data BPS Kabupaten Badung. Data proyeksi penduduk dari BPS tersebut digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan populasi penduduk di Kabupaten Badung dari tahun 2025 hingga 2045. Selanjutnya dilakukan penentuan kebutuhan jumlah rumah yang dibutuhkan, dengan mengasumsikan rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah sebanyak 4 orang. Pendekatan ini menggunakan kondisi ideal dimana setiap keluarga memiliki satu unit rumah sesuai dengan standar kelayakan hunian.

Tabel 2.58.

Hasil Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah (unit)				
		2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Kuta selatan	36.553	40.755	45.440	50.663	56.486
2	Kuta	16.490	18.386	20.499	22.855	25.482
3	Kuta Utara	26.533	29.583	32.983	36.774	41.001
4	Mengwi	37.012	41.267	46.010	51.299	57.196
5	Abiansemal	27.568	30.737	34.270	38.210	42.602
6	Petang	8.644	9.638	10.746	11.981	13.358
7	Jumlah	152.801	170.365	189.948	211.782	236.126

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan rumah yang telah dilakukan, pada tahun 2025 diperkirakan kebutuhan rumah mencapai 152.801 unit. Distribusi kebutuhan rumah terbanyak tercatat berada di Kecamatan Mengwi, dengan estimasi kebutuhan sebanyak 37.012 unit rumah. Adapun kebutuhan rumah ini akan terus meningkat secara bertahap seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Badung. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa hingga tahun 2045, jumlah total rumah yang diperlukan di Kabupaten Badung meningkat menjadi sekitar 236.126 unit rumah. Menyoroti jumlah kebutuhan rumah yang terus meningkat, pemerintah perlu mengkaji strategi pengembangan infrastruktur dan memastikan ketersediaan lahan yang memadai. Dengan asumsi 1 unit rumah membutuhkan lahan seluas 1 are, maka dapat dihitung pula proyeksi kebutuhan lahan untuk perumahan dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.59.

Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Lahan Perumahan di Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Lahan Rumah (Ha)				
		2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Kuta selatan	365,53	407,55	454,40	506,63	564,86
2	Kuta	164,90	183,86	204,99	228,55	254,82
3	Kuta Utara	265,33	295,83	329,83	367,74	410,01
4	Mengwi	370,12	412,67	460,10	512,99	571,96
5	Abiansemal	275,68	307,37	342,70	382,10	426,02
6	Petang	86,44	96,38	107,46	119,81	133,58
7	Jumlah	1.528,01	1.703,65	1.899,48	2.117,82	2.361,26

Sumber: Hasil Analisis, 2024

B. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Selain memperhitungkan proyeksi kebutuhan rumah, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan prasarana yang memadai yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih ini secara umum untuk memperkirakan kebutuhan air bersih di masa depan berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah. Dengan mengetahui proyeksi ini, dapat ditentukan prioritas pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Tabel 2.60.

Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

No.	Kebutuhan Air Bersih	Standar Kebutuhan	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
			611.204	681.461	759.793	847.130	944.505
A	Kebutuhan Domestik	150/lt/org/hari	91.680.641	102.219.115	113.968.963	127.069.428	141.675.761
B	Fasilitas Umum	8% dari Kebutuhan Domestik	7.334.451	8.177.529	9.117.517	10.165.554	11.334.061
	Perkantoran	8% dari Kebutuhan Domestik	7.334.451	8.177.529	9.117.517	10.165.554	11.334.061
	Komersial	8% dari Kebutuhan Domestik	7.334.451	8.177.529	9.117.517	10.165.554	11.334.061
	Industri	6% dari Kebutuhan Domestik	5.500.838	6.133.147	6.838.138	7.624.166	8.500.546
	Total Kebutuhan Non Domestik			27.504.192	30.665.735	34.190.689	38.120.829
C	Hidran	30% dari Kebutuhan Non Domestik	8.251.258	9.199.720	10.257.207	11.436.249	12.750.819
D	Kehilangan Air	20% dari Kebutuhan Non Domestik	5.500.838	6.133.147	6.838.138	7.624.166	8.500.546
Kebutuhan Total (A+B+C)			127.436.090	142.084.570	15.8416.859	176.626.505	196.929.308

No.	Kebutuhan Air Bersih	Standar Kebutuhan	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
			611.204	681.461	759.793	847.130	944.505
Kebutuhan Rata-Rata Harian (A+B+C-D)			121.935.252	135.951.423	151.578.721	169.002.340	188.428.763
Kebutuhan Maksimum/Hari		1.15 x Kebutuhan Rata-Rata Harian)	140.225.540	156.344.137	174.315.529	194.352.691	216.693.077

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dari hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air tersebut menggunakan standar kebutuhan domestik dan non domestik, dengan asumsi kebutuhan air bersih setiap individu untuk kebutuhan domestik yakni sebesar 150 liter/orang/hari, serta alokasi kebutuhan non domestik masing-masing sebesar 8% dari kebutuhan domestik meliputi kebutuhan untuk fasilitas umum, perkantoran, dan komersil. Sedangkan kebutuhan air bersih untuk industri sebesar 6% dari kebutuhan domestik. Selain kebutuhan domestik dan non domestik juga diperhitungkan proyeksi kebutuhan untuk hidran yakni sebesar 30% dari kebutuhan non domestik dan estimasi kehilangan air sebesar 20% dari kebutuhan non domestik. Dari alokasi tersebut diperoleh kebutuhan rata-rata harian yakni akumulasi kebutuhan domestik, non domestik dan hidran yang dikurangi dengan estimasi kehilangan air. Setelah memperoleh hasil perhitungan kebutuhan harian tersebut, maka dapat diketahui kebutuhan air maksimum perhari di suatu wilayah yakni 1,15% dari kebutuhan harian.

Merujuk dari standar perhitungan tersebut maka diperkirakan pada tahun 2025 dibutuhkan sebesar 140,2 megaliter per hari yang terus meningkat hingga tahun 2045 membutuhkan 216,6 megaliter per hari.

C. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik

Selain jaringan air bersih, jaringan prasarana yang perlu diperhatikan dalam perencanaan suatu kawasan yakni jaringan energi listrik. Jaringan listrik merupakan salah satu infrastruktur vital yang mendukung berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menghitung proyeksi kebutuhan listrik untuk masa mendatang, pemerintah dapat merancang infrastruktur listrik yang efisien dan memadai, termasuk pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi dan instalasi listrik. Berikut adalah hasil perhitungan proyeksi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Badung.

Tabel 2.61.
Hasil Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Listrik (Watt)					Total
		Rumah Tangga	Ekonomi	Perkantoran	Penerangan Jalan	Lain Lain	
2025	611204	55.008.384,37	19.252.934,53	2.750.419,22	5.500.838,44	5.500.838,44	88.013.414,98
2030	681461	61.331.469,23	21.466.014,23	3.066.573,46	6.133.146,92	6.133.146,92	98.130.350,77
2035	759793	68.381.377,89	23.933.482,26	3.419.068,89	6.838.137,79	6.838.137,79	109.410.204,62
2040	847130	76.241.657,02	26.684.579,96	3.812.082,85	7.624.165,70	7.624.165,70	121.986.651,23
2045	944505	85.005.456,82	29.751.909,89	4.250.272,84	8.500.545,68	8.500.545,68	136.008.730,90

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Perhitungan proyeksi kebutuhan listrik yang dilakukan dialokasikan 90 watt per orang sehingga menghasilkan total daya yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Selanjutnya, kebutuhan ekonomi menggunakan estimasi sebesar 30% dari kebutuhan rumah tangga, sementara kebutuhan perkantoran dan penerangan jalan masing-masing 5% dan 10% dari total kebutuhan rumah tangga. Adapun alokasi untuk kebutuhan lainnya seperti industri dan infrastruktur umum diasumsikan sebesar 10% dari total kebutuhan rumah tangga.

Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan listrik di atas menunjukkan peningkatan dari 88 mega watt pada tahun 2025 menjadi 136 mega watt pada tahun 2045, kenaikan tersebut menandakan pertumbuhan populasi penduduk yang berkelanjutan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan pasokan energi listrik. Oleh karena itu, perlu adanya rencana investasi pembangunan pembangkit listrik dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan guna memenuhi tuntutan kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat.

D. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pengelolaan Sampah

Proyeksi kebutuhan sarana pengelolaan sampah memiliki relevansi yang besar dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Hal itu karena pertumbuhan populasi dan aktivitas penduduk cenderung meningkatkan volume sampah yang dihasilkan. Dengan menggunakan hasil proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan setiap tahunnya, pemerintah dapat merencanakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai untuk mengakomodasi besarnya timbulan sampah tersebut. Dengan demikian, proyeksi ini menjadi salah satu landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.

Tabel 2.62.


Hasil Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

	Kebutuhan	Standar Kebutuhan	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
			611.204,00	681.461,00	759.793,00	847.130,00	944.505,00
A	Rumah Tangga (RT)	0,0025 m ³ /jiwa/hari	1.528,01	1.703,65	1.899,48	2.117,82	2.361,26
B	Kegiatan Sosial dan Umum	5% dari total kebutuhan RT	76,40	85,18	94,97	105,89	118,06
C	Kegiatan Perdagangan dan Jasa	10% dari total kebutuhan RT	152,80	170,37	189,95	211,78	236,13
D	Sampah Jalan Raya	2,5% dari total kebutuhan RT	38,20	42,59	47,49	52,95	59,03
Total Timbulan Sampah (A+B+C+D)			1.795,41	2.001,79	2.231,89	2.488,44	2.774,48

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dalam perhitungan proyeksi ini, kebutuhan rumah tangga diasumsikan sebesar 0,0025 m³/orang/hari. Selain itu, terdapat juga kebutuhan kegiatan sosial dan umum yang menyumbang sebesar 5% dari kebutuhan rumah tangga, kegiatan perdagangan dan jasa sebesar 10% dan sampah jalan raya sebesar 2,5%. Total timbulan sampah yang dihasilkan dihitung dengan mengakumulasi total kebutuhan tersebut.

Mengacu pada hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperkirakan pada tahun 2025, Kabupaten Badung akan menghasilkan sekitar 1.795,41 m³ timbulan sampah, yang kemudian diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 2.774,48 m³ pada tahun 2045. Untuk



menghadapi peningkatan jumlah timbulan sampah ini, perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan melakukan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien dan modern.

Menurut data DLHK Badung, saat ini kemampuan pengolahan timbulan sampah di Fasilitas Pengolahan Sampah yang tersebar di Kabupaten Badung pada tahun 2023 hanya mencapai 63,50% dari total sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sehingga apabila kondisi tersebut disandingkan dengan hasil proyeksi, pada tahun 2025 diperkirakan masih terdapat 655,325 m³ sampah yang belum dapat tertangani setiap harinya. Oleh karenanya dibutuhkan upaya yang signifikan dalam pengolahan sampah khususnya pengelolaan sampah berbasis sumber (pengelolaan sampah yang telah dimulai dari Rumah Tangga). Ini bertujuan supaya sampah yang diolah pada fasilitas pengolahan sampah jumlahnya dapat jauh berkurang yang dapat meringankan beban fasilitas pengolahan sampah itu sendiri.

E. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan penting dalam perencanaan pembangunan karena merupakan akses terhadap layanan kesehatan dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan dibutuhkan dengan tujuan memperkirakan berapa banyak fasilitas kesehatan yang diperlukan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan proyeksi sarana kesehatan ini menggunakan data proyeksi jumlah penduduk untuk memperkirakan kebutuhan akan rumah sakit bersalin, puskesmas dan posyandu di Kabupaten Badung. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Badung yang terdiri atas rumah sakit bersalin, puskesmas, dan posyandu.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Badung, dapat disimpulkan bahwa fasilitas rumah sakit bersalin membutuhkan penambahan unit secara bertahap: diperlukan 20 unit pada tahun 2025, 23 unit pada tahun 2030, 25 unit pada tahun 2035, 28 unit pada tahun 2040, dan 31 unit pada tahun 2045. Dengan kondisi eksisting yang hanya memiliki 12 unit rumah sakit bersalin, diperlukan penambahan signifikan sepanjang periode 2025-2045 untuk memenuhi kebutuhan ini.

Sedangkan untuk puskesmas, proyeksi menunjukkan bahwa jumlah eksisting puskesmas di Kabupaten Badung saat ini sudah cukup untuk menampung pelayanan sesuai dengan jumlah penduduk hingga tahun 2045. Hal ini juga sesuai dengan standar teknis skala pelayanan puskesmas pada SNI 03-1733-2004, sehingga tidak memerlukan penambahan unit hingga periode tersebut.

Untuk posyandu, proyeksi menunjukkan bahwa jumlah eksisting posyandu saat ini cukup untuk melayani penduduk Kabupaten Badung hingga tahun 2030. Namun, mulai tahun 2035 hingga 2045, diperlukan penambahan beberapa unit posyandu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan total proyeksi penduduk di tahun-tahun tersebut.

Tabel 2.63.

Hasil Proyeksi Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Fasilitas		Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	
Jumlah Eksisting (Unit)		12	13	556	
Standar Daya Tampung		30.000	120.000	1.250	
Proyeksi Penduduk (jiwa)	2025	611.204	20	13	556
	2030	681.461	23	13	556
	2035	759.793	25	13	608
	2040	847.130	28	13	678
	2045	944.505	31	13	756

Sumber: Hasil Analisis, 2024

F. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan memiliki peran krusial dalam perencanaan pembangunan. Ketersediaan sekolah yang memadai tidak hanya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi tingkat literasi, keterampilan dan pengetahuan yang menjadi modal utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Sarana pendidikan juga berperan dalam menyeimbangkan distribusi penduduk, mengurangi disparitas sosial-ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.64.

Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Badung 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk usia 6-12 tahun	Rata-rata kapasitas 1 unit SD	Proyeksi Jumlah SD	Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun	Rata-rata kapasitas 1 unit SMP	Proyeksi Jumlah SMP	Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun	Rata-rata kapasitas 1 unit SMA	Proyeksi Jumlah SMA
Jumlah Eksisting			295			69			62
2025	65.439	207	316	29.741	398	75	30.379	290	105
2030	72.961		352	33.159		83	33.871		117
2035	81.348		393	36.971		93	37.765		130
2040	90.698		438	41.221		104	42.106		145
2045	101.124		489	45.959		115	46.946		162

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dalam memproyeksikan jumlah sarana pendidikan, perhitungan kapasitas sekolah dilakukan dengan membagi jumlah penduduk dalam rentang usia yang sesuai dengan tingkat pendidikannya (6-12 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SMP, 16-18 tahun untuk SMA) dengan jumlah sekolah yang ada. Dengan demikian, dapat diperkirakan rata-rata kapasitas satu unit sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan. Dalam menentukan proyeksi kebutuhan satu unit sekolah, perhitungan rata-rata kapasitas unit sekolah menjadi standar. Berdasarkan perhitungan di atas, tahun 2025, jumlah penduduk yang berusia 6-12 tahun sebanyak 65.439 jiwa dibagi dengan rata-rata kapasitas satu unit SD yang mampu menampung 207 jiwa.

Apabila disandingkan dengan kondisi eksisting saat ini, maka setidaknya hingga akhir tahun 2045, Kabupaten Badung membutuhkan tambahan:

- 194 unit SD untuk mencapai kebutuhan ideal (sesuai proyeksi penduduk usia SD)

- 46 unit SMP untuk mencapai kebutuhan ideal (sesuai proyeksi penduduk usia SMP)
- 100 unit SMA untuk mencapai kebutuhan ideal (sesuai proyeksi penduduk usia SMA)

Namun angka di atas bukan hasil mutlak mengingat proyeksi penduduk di Kabupaten Badung menggunakan proyeksi optimis (eksponensial), sehingga realisasinya bisa terjadi tidak setinggi proyeksi tersebut di atas bergantung dari dinamika yang terjadi selama 20 tahun mendatang. Hasil proyeksi di atas memberikan gambaran agar Pemerintah Kabupaten Badung dapat bersiap untuk menghadapi kondisi paling ekstrem dalam penyediaan sarana pendidikan akibat ledakan jumlah penduduk seiring dengan semakin meningkatnya rangkaian pembangunan yang dilaksanakan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah merupakan strategi penataan ruang wilayah yang bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah merupakan kunci dalam perencanaan pembangunan daerah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Badung telah merancang dengan cermat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2024-2044. Pusat Pertumbuhan Wilayah ini terbagi menjadi tiga komponen utama yaitu: 1) Sistem pusat permukiman, yang bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi dan ketersediaan fasilitas permukiman yang memadai; 2) Pola ruang wilayah, yang mencakup penataan penggunaan lahan dan pengembangan infrastruktur secara menyeluruh guna mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya, yang ditetapkan berdasarkan potensi dalam menarik investasi dan memperkuat daya saing ekonomi dan sosial budaya Kabupaten Badung di tingkat nasional maupun internasional.

Keseluruhan kawasan tersebut berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Badung karena menjadi lokasi konsentrasi berbagai kegiatan dan kelompok usaha, yang didukung oleh sarana, prasarana, serta infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, aktivitas masyarakat di Kabupaten Badung lebih banyak terpusat pada kawasan-kawasan tersebut.

1. Sistem Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman Kabupaten Badung terdiri atas:

- a) **Pusat Pelayanan Kawasan** yang meliputi:
 - (1) Kawasan Perkotaan Petang di Kecamatan Petang;
 - (2) Kawasan Perkotaan Abiansemal di Kecamatan Abiansemal;
 - (3) Kawasan Perkotaan Mengwi di Kecamatan Mengwi yang merupakan kawasan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai kawasan perkotaan di sekitar kawasan perkotaan inti;
 - (4) Kawasan Perkotaan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara;
 - (5) Kawasan Perkotaan Kuta di Kecamatan Kuta yang merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai kawasan perkotaan inti; dan
 - (6) Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan yang merupakan kawasan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai kawasan perkotaan di sekitar kawasan perkotaan inti.
- b) **Pusat Pelayanan Lingkungan** yang meliputi:
 - (1) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Petang terdiri atas:
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Pelaga; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Carangsari.
 - (2) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Abiansemal terdiri atas:
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Sangeh;


- Pusat Pelayanan Lingkungan Mambal; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Sibanggede.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Mengwi terdiri atas:
- Pusat Pelayanan Lingkungan Werdibhuana; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Buduk.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kuta Utara terdiri atas:
- Pusat Pelayanan Lingkungan Dalung; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Cunggu.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kuta terdiri atas:
- Pusat Pelayanan Lingkungan Seminyak;
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Tuban; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Kedongan.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan terdiri atas:
- Pusat Pelayanan Lingkungan Benoa; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan Ungasan

2. Pola Ruang Wilayah

Pola Ruang Wilayah Kabupaten Badung terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.


a) Kawasan Lindung terdiri atas:

- (1) Badan Air seluas kurang lebih 22 hektare, yang terdapat di:
- Kecamatan Petang;
 - Kecamatan Mengwi;
 - Kecamatan Kuta Utara; dan
 - Kecamatan Kuta.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.007 hektare, yang terdapat di Kecamatan Petang.
- (3) Kawasan Perlindungan Setempat seluas kurang lebih 364 hektare, yang terdapat di:
- Kecamatan Petang;
 - Kecamatan Abiansemal;
 - Kecamatan Mengwi;
 - Kecamatan Kuta Utara;
 - Kecamatan Kuta; dan
 - Kecamatan Kuta Selatan.
- (4) Kawasan Konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam seluas kurang lebih 547 hektare, yang meliputi:
- Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas kurang lebih 533 hektare, yang terdapat di:
 - i. Kecamatan Kuta; dan
 - ii. Kecamatan Kuta Selatan.
 - Taman Wisata Alam berupa Taman Wisata Alam Sangeh seluas kurang lebih 14 hektare, yang terdapat di Kecamatan Abiansemal.

- 
- (5) Kawasan Cagar Budaya seluas kurang lebih 7 hektare, yang terdapat di:
- Kecamatan Petang;
 - Kecamatan Abiansemal; dan
 - Kecamatan Mengwi.
- (6) Kawasan Ekosistem Mangrove seluas kurang lebih 152 hektare, yang meliputi:
- Kawasan Ekosistem Mangrove yang berada di daratan dengan luas 118 hektare, yang terdapat di:
 - i. Kecamatan Kuta; dan
 - ii. Kecamatan Kuta Selatan.
 - Kawasan Ekosistem Mangrove yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan masih ditetapkan sebagai perairan, selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/Kawasan Ekosistem Mangrove seluas kurang lebih 34 hektare, yang berada di Kawasan Teluk Benoa.

b) **Kawasan Budidaya** terdiri atas:

- (1) Badan Jalan seluas kurang lebih 53 hektare, yang terdapat di:
- Kecamatan Mengwi;
 - Kecamatan Kuta Utara;
 - Kecamatan Kuta; dan
 - Kecamatan Kuta Selatan.
- (2) Kawasan Hutan Produksi berupa hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 0,4 hektare, yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.
- (3) Kawasan Pertanian seluas kurang lebih 17.204 hektare meliputi:
- Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 8.437 hektare dan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 6.652 hektare, yang terdapat di:
 - i. Kecamatan Petang;
 - ii. Kecamatan Abiansemal;
 - iii. Kecamatan Mengwi; dan
 - iv. Kecamatan Kuta Utara.
 - Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 1.820 hektare, yang terdapat di:
 - i. Kecamatan Petang;
 - ii. Kecamatan Abiansemal;
 - iii. Kecamatan Mengwi; dan
 - iv. Kecamatan Kuta Selatan.
 - Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 6.945 hektare, yang terdapat di:
 - i. Kecamatan Petang;
 - ii. Kecamatan Abiansemal; dan
 - iii. Kecamatan Mengwi.
 - Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 2 hektare, yang terdapat di Kecamatan Abiansemal.


- 
- (4) Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budidaya seluas kurang lebih 3 hektare, yang terdapat di:
- Kecamatan Kuta; dan
 - Kecamatan Kuta Selatan.
- (5) Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 5 hektare, yang terdapat di:
- Kecamatan Mengwi; dan
 - Kecamatan Kuta Selatan.
- (6) Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 84 hektare, yang terdapat di:
- Kecamatan Petang;
 - Kecamatan Abiansemal; dan
 - Kecamatan Mengwi.
- (7) Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 5.289 hektare, yang meliputi:
- Kawasan Pariwisata di daratan seluas 5.115 hektare, yang terdapat di:
 - i. Kecamatan Mengwi;
 - ii. Kecamatan Kuta Utara;
 - iii. Kecamatan Kuta; dan
 - iv. Kecamatan Kuta Selatan.
 - Kawasan Pariwisata yang masih ditetapkan sebagai perairan, selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/Kawasan Pariwisata, seluas kurang lebih 175 hektare, yang terdiri dari:
 - i. Kawasan reklamasi perairan/Kawasan Pariwisata seluas 76 hektare di Kawasan Teluk Benoa.
 - ii. Kawasan reklamasi perairan/Kawasan Pariwisata seluas 98 hektare di kawasan pantai Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Kuta.
- (8) Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 14.969 hektare, yang meliputi:
- Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 13.930 hektare, yang terdapat di:
 - i. Kecamatan Petang;
 - ii. Kecamatan Abiansemal;
 - iii. Kecamatan Mengwi;
 - iv. Kecamatan Kuta Utara;
 - v. Kecamatan Kuta; dan
 - vi. Kecamatan Kuta Selatan.
 - Kawasan Permukiman Pedesaan seluas kurang lebih 1.039 hektare, yang terdapat di Kecamatan Petang.
- (9) Kawasan Transportasi seluas kurang lebih 343 hektare, yang meliputi:
- Kawasan Terminal Tipe A Mengwi di Kecamatan Mengwi; dan
 - Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai di Kecamatan Kuta.
- (10) Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas kurang lebih 13 hektare, yang meliputi:
- Kepolisian Sektor Petang di Kecamatan Petang;

- Komando Rayon Militer 1611-05 Abiansemal di Kecamatan Abiansemal;
- Brimob Batalyon B Pelopor Kabupaten Badung, Kepolisian Sektor Mengwi, dan Komando Rayon Militer 1611-04 Mengwi di Kecamatan Mengwi; dan
- Asrama Wisma Bayu dan Kompi A Raider 900/SWB di Kecamatan Kuta.

3. Kawasan Strategis Kabupaten

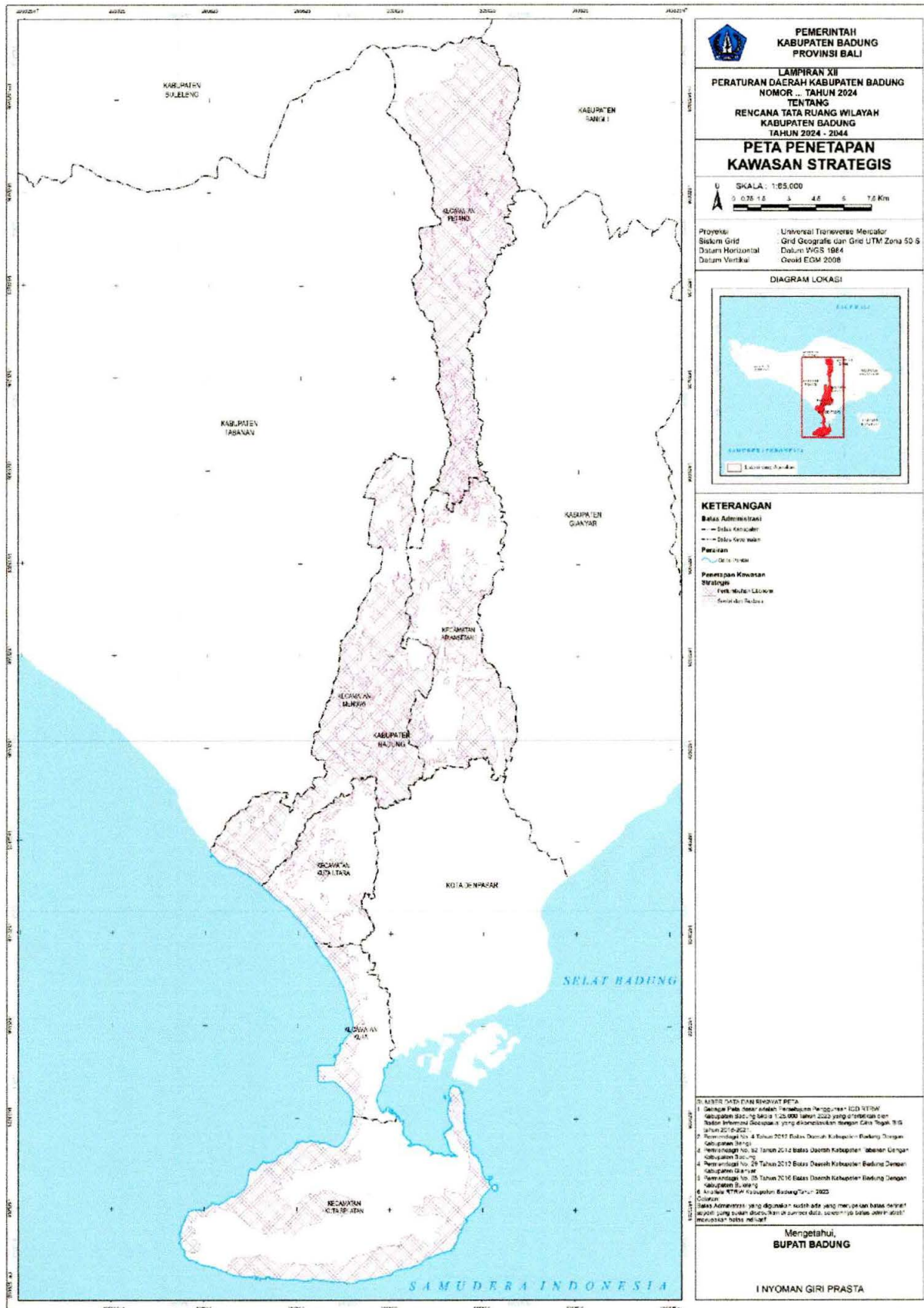
RTRW Kabupaten Badung telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten Badung sebagai berikut:

- a) **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**, meliputi:
- (1) Kawasan Perkotaan Mangupura yang terdapat di Kecamatan Mengwi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional, yaitu Kawasan Perkotaan Sarbagita.
 - (2) Kawasan Perkotaan Agropolitan yang terdapat di Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal.
 - (3) Kawasan Perkotaan Pariwisata, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya, serta bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSPD) yaitu KSPD Canggü, KSPD Kuta, dan KSPD Nusa Dua yang terdapat di:
 - Kecamatan Mengwi
 - Kecamatan Kuta Utara
 - Kecamatan Kuta
 - Kecamatan Kuta Selatan
 - (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional, yaitu Kawasan Subak Bali Landscape yang terdapat di:
 - Kecamatan Petang
 - Kecamatan Abiansemal
 - Kecamatan Mengwi
 - Kecamatan Kuta Utara
- b) **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**, meliputi:
- (1) Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu yang terdapat di Kecamatan Petang
 - (2) Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Tedung yang terdapat di Kecamatan Petang
 - (3) Kawasan Tempat Suci Pura Sada yang terdapat di Kecamatan Mengwi
 - (4) Kawasan Tempat Suci Pura Taman Ayun yang terdapat di Kecamatan Mengwi
 - (5) Kawasan Tempat Suci Pura Petitenget yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara

- 
- (6) Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan
 - (7) Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Payung yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan
 - (8) Kawasan Tempat Suci Pura Goa Gong yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan

Kawasan-kawasan ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga warisan budaya serta sosial di Kabupaten Badung. Integrasi dan pengelolaan yang baik terhadap kawasan-kawasan strategis ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Badung.

Gambar 2.36.
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Badung



Sumber: RTRW Kabupaten Badung 2024-2044

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan hasil telaah kondisi gambaran umum daerah Kabupaten Badung sebagaimana yang diuraikan dalam Bab 2 sebelumnya, berikut dapat terpetakan permasalahan pembangunan yang harus dikelola dalam konteks perumusan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung.

Tabel 3.1.
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Badung

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
1	Aspek Geografis	
a	Alih Fungsi Lahan	Kabupaten Badung mengalami alih fungsi lahan yang signifikan pada lahan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah. Selama tahun 2018-2022, lahan pertanian Kabupaten Badung menurun sebesar 28,04%.
b	Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Badung mengalami penurunan selama periode Tahun 2018-2022. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Ini mencerminkan kualitas udara dan kualitas ekosistem lingkungan di Kabupaten Badung menurun selama periode tersebut.
c	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	<p>Beberapa wilayah di Badung Selatan seperti Kelurahan Tuban dan Kelurahan Tanjung Benoa diperkirakan akan mengalami defisit lahan pengembangan permukiman pada Tahun 2043 sehingga pengembangan permukiman di wilayah ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk 20 tahun mendatang.</p> <p>Pada tahun 2043 terdapat 15 desa di Kabupaten Badung yang diperkirakan akan mengalami defisit air yaitu:</p> <p>a. Kecamatan Abiansemal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Abiansemal 2. Desa Angantaka 3. Desa Bongkasa Pertiwi 4. Desa Dauh Yeh Cani 5. Desa Jagapati 6. Desa Mambal 7. Desa Mekar Bhuwana 8. Desa Selat <p>b. Kecamatan Kuta Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerobokan 2. Kerobokan Kaja

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
		<p>c. Kecamatan Mengwi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Buduk 2. Kelurahan Kapal 3. Kelurahan Lukluk 4. Kelurahan Sading 5. Desa Tumbakbayuh
d	Bencana	Meskipun Indeks Risiko Bencana Badung menurun yang mengindikasikan menurunnya potensi bencana yang disertai meningkatnya kemampuan mitigasi bencana masyarakat dan pemerintah namun Badung masih harus menghadapi dampak dari perubahan iklim seperti angin kencang, gelombang panas, dan banjir.
2	Aspek Demografi	
a	Jumlah, Sebaran, dan Komposisi Penduduk	<p>Badung Utara dan Badung Selatan mengalami ketidakseimbangan pembangunan yang ditunjukkan pada tingkat kepadatan penduduk yang tidak seimbang diantara keduanya. Badung Selatan memiliki kepadatan penduduk 2x lebih tinggi dibandingkan dengan Badung Utara yang menunjukkan perkembangan pembangunan terfokus pada Badung Selatan.</p> <p>Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kedua kecamatan tersebut mulai memasuki titik jenuh pada perkembangan populasi penduduk. Hal ini dimungkinkan karena semakin terbatasnya ruang-ruang pengembangan permukiman maupun semakin tingginya biaya hidup di kedua wilayah tersebut yang membuat penduduknya mengalami penurunan pertumbuhan.</p> <p>Angka Ketergantungan Anak mengalami penurunan sedangkan Angka Ketergantungan Usia Lanjut mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk lansia meningkat namun jumlah penduduk anak-anak mulai menurun. Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan pada ketersediaan tenaga kerja, kemampuan daerah dalam meningkatkan kemampuan ekonomi, serta beban pengeluaran penduduk akan semakin besar karena akan menanggung penduduk usia lanjut lebih banyak.</p>
3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
a	Kesejahteraan Ekonomi	<p>Perekonomian Kabupaten Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata sehingga apabila sektor ini mengalami penurunan maka akan berdampak langsung pada penurunan perekonomian Badung dan begitu pula sebaliknya.</p> <p>Angka Kemiskinan Penduduk Kabupaten Badung masih berada di atas 2%. Meskipun menjadi yang terendah di Bali namun penuntasan kemiskinan perlu tetap diprioritaskan untuk menuju kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Badung 0%.</p>

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Badung meskipun pada tahun 2023 menurun (2,72%) namun masih berada di atas rata-rata TPT Provinsi Bali (2,69%).
b	Kesejahteraan Sosial Budaya	<p>Indeks Ketimpangan Gender Badung mengalami peningkatan di tahun 2023.</p> <p>Meskipun Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Badung merupakan yang tertinggi di Provinsi Bali (71,01 pada Tahun 2023) namun memiliki masalah pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya karena nilainya hanya 48,19. Pada Klaster ini, yang menjadi penilaian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase anak usia 7-17 Tahun yang tidak bersekolah ▪ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia ▪ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) ▪ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler ▪ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni <p>Pengaruh digitalisasi yang menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat mampu menerapkan kesenian, budaya, dan adat dengan baik.</p> <p>Pelestarian Subak ditengah pesatnya alih fungsi lahan pertanian</p>
4	Aspek Daya Saing Daerah	
	Daya Saing SDM	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung terus meningkat selama 5 tahun terakhir dan selalu berada di atas IPM Provinsi Bali. Namun, IPM Kabupaten Badung masih berada di bawah Kota Denpasar. Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Kabupaten Badung masih berada di bawah Kota Denpasar. Untuk itu perlu upaya lebih lanjut dalam meningkatkan IPM Kabupaten Badung agar dapat menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali.</p> <p>Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD (usia 7-12 tahun) dan SMP (usia 13-15 tahun) Kabupaten Badung merupakan yang tertinggi di Provinsi Bali. Meskipun capaiannya tertinggi di Provinsi Bali namun APS SD (99,99%) dan SMP (99,49%) Kabupaten Badung tidak menyentuh angka 100%. Oleh karenanya program peningkatan pemerataan pendidikan di Kabupaten Badung perlu mendapatkan perhatian untuk menjamin seluruh penduduk Badung mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dan setara.</p> <p>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Badung belum mencapai kondisi ideal. RLS ideal adalah 12 tahun yang artinya anak-anak usia 6 tahun memiliki lama bersekolah ideal selama 12 tahun yang mampu mengantarnya hingga tamat SMA. RLS Kabupaten Badung sendiri pada tahun 2023 adalah 10,90 Tahun atau rata-rata penduduk Kabupaten Badung telah menempuh</p>

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
		<p>sekolah hingga pada jenjang kelas XI SMA. Untuk itu perlu upaya meningkatkan RLS Kabupaten Badung untuk mencapai kondisi ideal yaitu 12 Tahun. Pada sisi lainnya, RLS Kabupaten Badung masih berada di bawah Kota Denpasar yaitu 11,52 tahun.</p> <p>Siswa SD di Kabupaten Badung memiliki tingkat literasi dan numerasi yang berada dalam klasifikasi sedang dimana perlu ditingkatkan sehingga masuk ke dalam klasifikasi tinggi. Siswa SMP di Kabupaten Badung memiliki tingkat literasi tinggi namun tingkat numerasi masih sedang sehingga khusus dibutuhkan peningkatan kemampuan numerasi untuk mencapai klasifikasi tinggi.</p>
c	Daya saing infrastruktur wilayah	<p>Adanya penurunan kualitas infrastruktur jalan dan terdapat permasalahan dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan di Kabupaten Badung.</p> <p>Terjadi penurunan signifikan dalam hal persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitas layak pada tahun 2023 yakni dari 100% menjadi 84,41%. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pemeliharaan, perluasan, dan aksesibilitas terhadap infrastruktur sanitasi di Kabupaten Badung pada periode tersebut.</p> <p>Rasio jaringan irigasi Kabupaten Badung mengalami peningkatan, namun masih terdapat lahan pertanian di Kabupaten Badung yang tidak terlayani oleh jaringan irigasi secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam distribusi infrastruktur jaringan irigasi yang berdampak pada produksi pertanian.</p> <p>Meskipun pada tahun 2021 sudah mencapai 100%, namun terjadi penurunan persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi ini menimbulkan kekhawatiran akan konsistensi akses terhadap air minum yang layak bagi rumah tangga di Kabupaten Badung. Selain itu, persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih dari perpipaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama terlihat dari data pada tahun 2018 dan 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah rumah tangga meningkat, namun pelayanan air bersih perpipaan tidak mengalami peningkatan yang sebanding.</p>
d	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Badung meningkat selama Tahun 2022-2023. Meskipun meningkat namun IDSD Kabupaten Badung pada Tahun 2023 masih berada di bawah Kabupaten Buleleng. Faktor penghambatnya daya saing daerah Kabupaten Badung adalah keterbatasan Sumber Daya dan kurangnya kolaborasi dan komunikasi antar stakeholder terkait.
5	Aspek Pelayanan Umum	
a	Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung, yang menjadi cerminan dari kualitas pelayanan publik, meningkat sepanjang

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
		<p>tahun 2021-2023. Namun, masih terdapat permasalahan dalam implementasi pelayanan publik di Kabupaten Badung yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia di bidang pemeliharaan perangkat keras dan jaringan komputer yang mendukung sistem informasi perizinan online masih terbatas Sistem Informasi Manajemen/SIM belum seluruhnya terintegrasi dengan perangkat daerah terkait
b	Inovasi Daerah	Kabupaten Badung mendapatkan nilai indeks Inovasi Daerah sebesar 55,16 yang menempatkan Kabupaten Badung memiliki nilai indeks tertinggi kedua di Provinsi Bali dengan status daerah inovatif tepat berada di bawah Kota Denpasar.
c	Pemerintah Berbasis Elektronik	Kabupaten Badung memiliki predikat "Sangat Baik" dengan untuk Indeks SPBE dengan nilai 3,66. Namun Indeks SPBE Kabupaten Badung masih berada di bawah Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan.
d	Kesehatan	<p>Menurut data SKI Tahun 2023, persentase prevalensi stunting di Kabupaten Badung adalah 4,9% dan menjadikannya terendah di Provinsi Bali. Meskipun dengan status terendah namun perlu upaya untuk mendorong agar prevalensi stunting di Kabupaten Badung menurun hingga batas optimalnya (0%) sehingga menjadikan Kabupaten Badung bebas stunting.</p> <p>Angka Kematian Bayi meningkat dari Tahun 2020 sebesar 2,3% menjadi 7,8% di tahun 2023.</p> <p>Angka Kematian Ibu meningkat pada Tahun 2023. Tahun 2022 tercatat sebesar 36,5% dan tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 84,62%.</p> <p>Penurunan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit yang ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Kematian Umum, dan Angka Kematian Netto.</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan Kartu Krama Badung Sehat (KBS) pada rumah sakit swasta di Kabupaten Badung. Hal ini terlihat dari Angka Penggunaan Tempat Tidur atau <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR) tertinggi adalah pada RSUD Mangusada yang telah melayani pasien dengan Kartu KBS sedangkan RS lainnya memiliki BOR di bawah 40% (kondisi ideal adalah 60-85%).</p>
e	Ketertiban Umum	<p>Belum optimalnya ketaatan masyarakat pada Perda dan Perkada.</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Sumber: Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Badung 2025-2045

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, Kabupaten Badung menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Masalah utama meliputi inklusi sosial ekonomi bagi penyandang disabilitas, akses terhadap pangan yang cukup, pola konsumsi yang tidak merata, kesehatan ibu dan anak, lapangan kerja, infrastruktur, pengelolaan sampah, energi, dan pelestarian lingkungan. Perlindungan terhadap nelayan skala kecil juga menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan upaya

bersama untuk mengatasi masalah ini dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.


Disamping permasalahan yang terangkum dari Kondisi dan Gambaran Umum Daerah, terdapat permasalahan dan tantangan dalam konteks regional (Provinsi Bali) yang juga harus masuk sebagai pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung. Permasalahan dan tantangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dan Tantangan Alam Bali Ke Depan yang Turut Menjadi Permasalahan dan Tantangan Alam Kabupaten Badung dalam Jangka Panjang

- a. Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya *Taksu* Bali, seperti: penodaan tempat suci; pencurian pratima; serta polusi sungai, dan laut.
- b. Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana alam.
- c. Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan.
- d. Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas, dan keanekaragaman hayati menurun.
- e. Sumber air yang aktif seperti Mata Air dan Sungai berpotensi semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih untuk kehidupan masyarakat, irigasi, dan industri pariwisata.
- f. Ekosistem Mata Air, Sungai, dan Laut berpotensi semakin rusak yang mengancam keanekaragaman hayati.
- g. Polusi dan kontaminasi dari berbagai sumber semakin meningkat yang mengancam ketersediaan udara bersih, air bersih, dan tanah berkualitas.
- h. Terjadinya perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan, bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit.
- i. Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan, sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan.

2. Permasalahan dan Tantangan Manusia Bali Ke Depan yang Turut Menjadi Permasalahan dan Tantangan Manusia Kabupaten Badung dalam Jangka Panjang

- a. Karakteristik Manusia Bali yang dahulu dikenal jemet/rajin, ulet/teknis, jujur, *tragia*/perencana yang baik, *lascarya*/tulus ikhlas, *dabdab* (teratur, sopan, dan matang), loyal, dan berdedikasi, mengalami degradasi, yang berimplikasi pada menurunnya identitas ke-Bali-an sebagai *Nak Bali*.
- b. Semangat hidup kebersamaan, gotong-royong, dan kohesi sosial sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal: *gilik-saguluk*, *para-sparo*, *salunglung sabayantaka*, *sarpana ya* (se-ia sekata, seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja), semakin menurun, yang berimplikasi pada menurunnya ketahanan sosial kehidupan Masyarakat Bali.
- c. Jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama karena migrasi dari luar Bali berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, dan papan serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana kebutuhan

- 
- hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk terutama pada wilayah perkotaan.
- d. Sistem kesehatan tradisional Bali (*Usadha*), yang merupakan warisan adiluhung Leluhur dan Guru-Guru Suci Bali, telah lama diabaikan sebagai bagian sistem kesehatan Masyarakat Bali.
 - e. Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk lokal.
 - f. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah (kurang dari dua) dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama Manusia Bali terutama Nyoman/Komang (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai pelaku utama Kebudayaan Bali.
 - g. Pemanfaatan penduduk lokal Bali oleh warga negara asing semakin meningkat untuk kepentingan penguasaan aset, yang berimplikasi pada ancaman semakin tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan, serta terjadinya degradasi moral masyarakat.
 - h. Kebutuhan penyediaan lapangan kerja semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, yang berpotensi meningkatkan pengangguran, dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
 - i. Tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan/perikanan cenderung menurun, dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun, yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian dan kelautan/perikanan, serta berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.

3. Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Bali Ke Depan yang Turut Menjadi Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Kabupaten Badung dalam Jangka Panjang

- a. Perkembangan berbagai aspek kehidupan akibat globalisasi, berimplikasi pada menurunnya budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan Masyarakat Badung, seperti tata krama, kesopanan dan kesantunan, serta etika, dan budi pekerti.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan, pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), serta persaingan pasar global yang tidak sehat dan kejahatan ekonomi, berimplikasi pada menurunnya produk budaya Bali, seperti seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat.
- c. Badung memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Badung.
- d. Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali.
- e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pesatnya teknologi digital, berimplikasi kepada menurunnya orisinalitas produk budaya Bali.
- f. Badung sebagai tujuan utama wisata dunia, sangat rentan terhadap terjadinya akulturasi budaya, di satu sisi memberi manfaat positif, namun sekaligus juga membawa ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan Kebudayaan Bali.
- g. Masifnya perkembangan pariwisata dan perkembangan teknologi, berimplikasi pada penurunan ragam budaya agraris dan budaya Bahari tradisional Bali secara drastis.
- h. Keberadaan lembaga tradisional Subak semakin berkurang karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi.

- i. Keberadaan Puri dalam fungsinya sebagai lembaga pelestarian adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal tidak optimal.
- j. Perkembangan kuliner global menjadi ancaman terhadap kuliner tradisional lokal.
- k. Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali.

3.2. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Badung yang mempengaruhi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung berdasarkan hasil pemetaan permasalahan pembangunan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.1 serta penyelarasan permasalahan dan tantangan Bali ke depan tersebut di atas sebelumnya, dapat dilihat pada **Tabel 3.2** berikut.

Tabel 3.2.
Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Badung

No	Isu Strategis	Rangkuman Permasalahan
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IPM Kabupaten Badung bukan yang terbaik di Bali ▪ Tingkat Pengangguran Terbuka di atas rata-rata Provinsi Bali ▪ Angka Partisipasi Sekolah belum tuntas 100% ▪ Rata-rata lama sekolah belum mencapai batas ideal 13 Tahun. ▪ Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP yang masih berada pada klasifikasi sedang ▪ Prevalensi stunting berada di angka 4,9% yang perlu diturunkan hingga 0%. ▪ Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu meningkat ▪ Kualitas Pelayanan Kesehatan menurun ▪ Belum optimalnya pemanfaatan jaminan kesehatan daerah (KBS) ▪ Angka Kemiskinan yang belum mencapai 0%
2	Penguatan Ketahanan dan Diversifikasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perekonomian Kabupaten Badung masih sangat bergantung pada sektor pariwisata yang membutuhkan adanya upaya diversifikasi ekonomi yaitu pertanian, ekonomi kreatif, maupun IKM ▪ Pemerataan persebaran penduduk untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan ruang dan lingkungan ▪ Alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan dan pelestarian alam sekaligus budaya Badung ▪ Angka pengangguran Badung masih di atas rata-rata Provinsi Bali ▪ Peningkatan Ketimpangan Gender



No	Isu Strategis	Rangkuman Permasalahan
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan publik berbasis sistem informasi▪ Pelayanan Publik yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem informasi▪ Inovasi Daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai posisi terbaik di Provinsi Bali▪ Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan rendahnya kolaborasi antar stakeholder dalam mendukung peningkatan daya saing daerah
4	Peningkatan Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya ketaatan masyarakat pada Perda dan Perkada▪ Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Pelestarian Seni, Adat, dan Budaya	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelestarian Subak ditengah pesatnya alih fungsi lahan pertanian▪ Pengaruh digitalisasi yang menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat mampu menerapkan kesenian, budaya, dan adat dengan baik▪ Rendahnya keikutsertaan siswa sekolah dalam pertunjukan seni▪ Perkembangan berbagai aspek kehidupan akibat globalisasi, berimplikasi pada menurunnya budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan Masyarakat Bali, seperti tata krama, kesopanan dan kesantunan, serta etika, dan budi pekerti▪ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan, pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), serta persaingan pasar global yang tidak sehat dan kejahatan ekonomi, berimplikasi pada menurunnya produk budaya Bali, seperti seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat.▪ Badung memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali.▪ Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali.▪ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pesatnya teknologi digital, berimplikasi




No	Isu Strategis	Rangkuman Permasalahan
		<p>kepada menurunnya orisinalitas produk budaya Bali.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Badung sebagai tujuan utama wisata dunia, sangat rentan terhadap terjadinya akulturasi budaya, di satu sisi memberi manfaat positif, namun sekaligus juga membawa ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan Kebudayaan Bali di Badung.▪ Masifnya perkembangan pariwisata dan perkembangan teknologi, berimplikasi pada penurunan ragam budaya agraris dan budaya Bahari tradisional Bali secara drastis.▪ Keberadaan lembaga tradisional Subak semakin berkurang karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi.▪ Keberadaan Puri dalam fungsinya sebagai lembaga pelestarian adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal tidak optimal.▪ Perkembangan kuliner global menjadi ancaman terhadap kuliner tradisional lokal.▪ Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali.
6	Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none">▪ Penurunan kualitas lingkungan hidup yaitu pada kualitas tutupan lahan dan kualitas air▪ Sebagian wilayah di Abiansemal, Kuta Utara, dan Mengwi diperkirakan akan mengalami defisit air pada akhir tahun 2045▪ Baru 40% Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.▪ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) menurun di Tahun 2023 menjadi 63,50% dari tahun 2022 (93,33%).▪ Sampah yang terdaur ulang hanya 23% di tahun 2023.▪ Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali, seperti: penodaan tempat suci; pencurian pratima; serta polusi sungai, dan laut.▪ Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana alam.



No	Isu Strategis	Rangkuman Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none">▪ Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan.▪ Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas, dan keanekaragaman hayati menurun.▪ Sumber air yang aktif seperti Mata Air dan Sungai berpotensi semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih untuk kehidupan masyarakat, irigasi, dan industri pariwisata.▪ Ekosistem Mata Air, Sungai, dan Laut berpotensi semakin rusak yang mengancam keanekaragaman hayati.▪ Polusi dan kontaminasi dari berbagai sumber semakin meningkat yang mengancam ketersediaan udara bersih, air bersih, dan tanah berkualitas.▪ Terjadinya perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan, bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit.▪ Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan, sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan.
7	Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik	<ul style="list-style-type: none">▪ Aksesibilitas kawasan menurun akibat kualitas jaringan jalan yang belum optimal serta kemacetan lalu lintas▪ Cakupan pelayanan air minum yang belum tuntas 100%▪ Cakupan pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal▪ Kawasan Badung Selatan mengalami permasalahan pada kualitas dan debit air bersih perpipaan yang disalurkan ke Rumah Tangga.▪ Pemeliharaan, perluasan, dan aksesibilitas terhadap infrastruktur sanitasi yang belum optimal

Sumber: Hasil Pemetaan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Badung



Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, telah dilakukan penyelarasan isu strategis RPJPD Kabupaten Badung tahun 2025-2045 terhadap isu strategis KLHS RPJPD Kabupaten Badung. Penyelarasan ini memastikan konsistensi semua aspek penting dalam isu-isu strategis dalam Rancangan RPJPD dan KLHS RPJPD Kabupaten Badung, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan inklusif. Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Badung, terdapat 12 isu strategis yang menjadi fokus utama. Isu-isu strategis ini mencakup berbagai aspek penting yang akan dijelaskan lebih lanjut pada **Tabel 3.3** berikut ini.

Tabel 3.3.

Keselarasan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Badung Terhadap Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

No Isu	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	No Isu	Isu Strategis KLHS RPJPD Badung Tahun 2025-2045
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	2	Kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan belum optimal
		3	Pemerataan dan mutu pendidikan belum optimal
		4	Perlindungan sosial belum optimal
		5	Pemberdayakan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana belum optimal
		8	Kualitas dan daya saing SDM tenaga kerja masih rendah
2	Penguatan Ketahanan dan Diversifikasi Ekonomi	1	Kemandirian, kecukupan, dan kualitas konsumsi pangan belum optimal
		7	Ketidakseimbangan fundamental struktur perekonomian
		10	Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		
4	Peningkatan Ketertiban Masyarakat	12	Meningkatnya kriminalitas
5	Pelestarian Seni, Adat, dan Budaya		
6	Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	6	Pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal
		11	Kualitas lingkungan hidup masih rendah
7	Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik	9	Sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan persampahan belum memadai

Sumber: Hasil Penyelarasan Isu Strategis RPJPD dan KLHS RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045

BAB IV

VISI DAN MISI

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025-2045

4.1 Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045

Visi pembangunan jangka panjang merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud di Kabupaten Badung pada akhir tahun 2045. Kabupaten Badung merupakan Kabupaten dengan kondisi daerah paling unggul dalam segala aspek dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Bali. Kondisi ini disamping sebagai anugerah juga merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini karena Kabupaten Badung memegang peranan penting dalam tulang punggung ekonomi Provinsi Bali baik Makro maupun Mikro sehingga apapun yang terjadi di Kabupaten Badung akan berpengaruh secara langsung pada kondisi Provinsi Bali. Oleh karenanya, dalam perumusan visi pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan kondisi paling optimis yang bisa dicapai oleh Kabupaten Badung.

Secara umum, menetapkan visi pembangunan jangka panjang adalah langkah yang krusial bagi Pemerintah Kabupaten Badung karena membawa sejumlah manfaat yang sangat penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting bagi Kabupaten Badung untuk menetapkan visi pembangunan jangka panjang:

- a) **Menciptakan Fokus dan Orientasi:** Visi pembangunan jangka panjang memberikan pedoman dan orientasi bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini membantu dalam menetapkan tujuan jangka panjang serta mengalokasikan sumber daya, upaya, dan perhatian ke arah yang sesuai dengan visi tersebut.
- b) **Perencanaan yang Terkoordinasi:** Dengan adanya visi, daerah dapat merencanakan pembangunan mereka dengan lebih terstruktur. Ini memungkinkan penyusunan rencana aksi yang konkret untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.
- c) **Keberlanjutan dan Pelestarian Lingkungan:** Visi pembangunan jangka panjang memungkinkan daerah untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan sebagai elemen kunci dalam perencanaan. Ini membantu dalam menjaga alam, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- d) **Penyelarasan Kebijakan:** Visi pembangunan jangka panjang membantu dalam menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan. Ini memastikan bahwa semua langkah dan keputusan pemerintah sejalan dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.
- e) **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan:** Dengan visi yang jelas, daerah dapat mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
- f) **Pembangunan Infrastruktur:** Visi jangka panjang membantu dalam merencanakan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah. Ini termasuk jaringan transportasi, sumber air, pendidikan, perumahan, dan sarana publik lainnya.
- g) **Manajemen Risiko:** Visi pembangunan jangka panjang juga membantu daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi di masa depan, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau ketidakpastian ekonomi.

- h) **Partisipasi Masyarakat:** Proses penetapan visi pembangunan jangka panjang seringkali melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ini memungkinkan warga untuk berkontribusi pada rencana pembangunan dan menetapkan prioritas mereka sendiri, sehingga meningkatkan keterlibatan dan keberlanjutan rencana tersebut.
- i) **Evaluasi dan Pengukuran Kemajuan:** Dengan adanya visi jangka panjang, daerah dapat lebih efektif dalam mengevaluasi kemajuan mereka terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Ini memungkinkan pengukuran kinerja dan penyesuaian rencana jika diperlukan.
- j) **Legasi untuk Generasi Mendatang:** Visi pembangunan jangka panjang membantu daerah untuk merencanakan pembangunan yang akan mewariskan hal positif bagi generasi mendatang, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Secara umum, penetapan visi pembangunan jangka panjang membantu menghasilkan pemahaman bersama mengenai gambaran masa depan yang diinginkan dan menyediakan kerangka kerja untuk mencapainya. Ini memiliki signifikansi penting dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan, menghadapi tantangan, dan mengoptimalkan potensi suatu wilayah.


Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, sesuai dengan tuntutan sistem perencanaan pembangunan nasional, merujuk pada visi pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN, visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi Bali, dan Tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Badung. Keberadaan tuntutan ini menjamin bahwa visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Badung telah disesuaikan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Bali serta telah mengikuti visi pembangunan wilayah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menetapkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan yang mengarahkan pembangunan untuk 100 tahun ke depan, yang harus dijadikan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam merancang perencanaan pembangunan wilayah mereka. Isi dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan bertujuan untuk melindungi alam, manusia, dan warisan budaya Bali dari kemungkinan degradasi yang disebabkan oleh laju pembangunan global yang terjadi dengan cepat saat ini. Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk menjaga kelestarian alam, manusia, dan budaya Bali, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung mengikuti arahan yang terdapat dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan.

Konsep Bali Masa Depan berisi Arah Bali 100 tahun ke depan berpedoman pada warisan berupa Wejangan Leluhur Bali untuk menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Konsep Bali Masa Depan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, serta dengan memperhatikan dinamika kebutuhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan secara lokal, nasional, dan global, sehingga arah Pembangunan Bali 100 tahun ke depan harus mengimplementasikan konsep:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
dalam BALI ERA BARU

Yang mengandung makna: Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, *Niskala-Sakala* Menuju Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari



secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Konsep *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru tersebut akan diselaraskan ke dalam visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 yang mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, arah pembangunan Bali masa depan, dan aspirasi bersama para pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.

“Badung Unggul: Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan *Tri Hita Karana*”

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung mencerminkan Kabupaten Badung yang modern, inovatif, dan adaptif dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan yang bersifat sirkular. Kabupaten Badung menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi dan informasi, pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, resiliensi terhadap bencana, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Visi pembangunan jangka panjang ini harus dapat mengatasi semua tantangan ini secara holistik, dengan mengintegrasikan aspek sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi secara bersinergi. Unsur-unsur seperti kemajuan, identitas lokal, kesejahteraan, dan keberlanjutan dijadikan landasan untuk mencapai tujuan tersebut. Visi ini juga mencerminkan komitmen Kabupaten Badung terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dalam konteks lokal.

Pembangunan di Kabupaten Badung tidak dapat terlepas dari Budaya dan Agama Hindu Bali yang telah memberikan *taksu* pada Tanah Bali sehingga setiap aspek pembangunan harus sinergis dan selaras dengan filosofi Pembangunan Budaya dan Agama Hindu Bali. Salah satu filosofi Pembangunan Hindu Bali adalah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah konsep filosofis dalam budaya Bali yang menggambarkan harmoni dan keseimbangan antara Manusia, Alam, dan Tuhan. Dalam konteks pembangunan di Kabupaten Badung, *Tri Hita Karana* menjadi landasan yang penting untuk memandu pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada keberlangsungan lingkungan, sosial, dan spiritual.

Penerapan *Tri Hita Karana* dalam pembangunan Kabupaten Badung berarti memperhatikan interaksi yang seimbang antara tiga elemen utama: Pertama, hubungan harmonis antara manusia dengan alam, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Kedua, hubungan yang sehat antara manusia dengan manusia, yang mencakup pembangunan masyarakat yang inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemenuhan kebutuhan dasar semua Masyarakat Kabupaten Badung. Ketiga, hubungan yang mendalam antara manusia dengan Tuhan, yang mencakup praktik spiritual dan keagamaan yang memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan konsep *Tri Hita Karana*, Kabupaten Badung memiliki visi besar pembangunan yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan spiritualitas manusia. Oleh karenanya, dalam

menetapkan Visi Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Badung menyematkan filosofi *Tri Hita Karana* di dalamnya.

Visi **Badung Unggul: Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan *Tri Hita Karana*** juga mencerminkan komitmen Kabupaten Badung terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dalam konteks lokal.

Dalam konteks visi jangka panjangnya, Kabupaten Badung mengartikan Badung Unggul sebagai yang terbaik dalam segala aspek pembangunan, menjadi tolok ukur kesuksesan, dan barometer pembangunan. Kabupaten ini telah menjadi tumpuan dan harapan untuk mencapai Bali *Dwipa Jaya* serta menjadi motor transformasi Bali-Nusa Tenggara untuk mendukung Indonesia Emas. Dengan komitmen besar, Kabupaten Badung bertekad untuk unggul dalam pemajuan ekonomi, kesejahteraan yang merata, serta melindungi dan mengelola warisan alam. Kemajuan di Kabupaten Badung tercermin dalam tingkat pendapatan tinggi, infrastruktur berkualitas, tingkat pendidikan yang tinggi, dan tenaga kerja terampil. Sejahtera dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesetaraan distribusi kekayaan, dan perlindungan lingkungan alam. Keberlanjutan pembangunan Kabupaten Badung mencakup perlindungan lingkungan alam, dengan upaya bijak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Secara lebih terperinci visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Rincian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Badung Unggul: Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>	Unggul	Unggul dimaknai sebagai terbaik dari yang terbaik, selalu berada di garis depan diantara lainnya, menjadi barometer pembangunan serta tolok ukur kesuksesan. Menjadi yang terbaik dan selalu berada di garis terdepan dalam segala aspek pembangunan merupakan anugerah sekaligus kebanggaan yang dilakoni Kabupaten Badung selama 20 tahun terakhir. Badung adalah tumpuan dan harapan untuk mencapai <i>Bali Dwipa Jaya</i> sekaligus motor transformasi Bali-Nusa Tenggara untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Demi menjaga marwahya tersebut, diiringi niat yang tulus Badung bertekad untuk unggul. Unggul dalam pemajuan ekonomi daerah dan masyarakat berkualitas, unggul dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata, serta unggul dalam melindungi sekaligus mengelola warisan dan kekayaan alam ibu pertiwi dari generasi ke generasi.
	Maju	Maju dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Badung telah memiliki tingkat pendapatan tinggi yang mencerminkan produktivitas ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata,



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>infrastruktur yang berkualitas tinggi, termasuk jaringan transportasi yang baik, sistem telekomunikasi yang canggih, serta akses yang luas terhadap energi dan teknologi informasi, tingkat pendidikan yang tinggi dan tenaga kerja yang terampil dan terlatih yang didukung sistem pendidikan dan pelatihan efektif dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas.</p> <p>Maju juga dimaknai sebagai kemampuan memberikan standar hidup yang tinggi yaitu akses yang luas, adil, dan merata terhadap layanan kesehatan; pendidikan; perumahan yang layak; serta keamanan pangan dan air bersih.</p> <p>Pada sisi ekonomi, Kabupaten Badung memiliki diversifikasi perekonomian dengan sektor-sektor ekonomi yang berkembang dan inovatif, seperti jasa keuangan, teknologi, pertanian berkelanjutan dan pariwisata yang mengungguli wilayah lainnya.</p> <p>Maju dalam pembangunan jangka panjang daerah adalah sebuah visi yang menginspirasi dan memotivasi untuk terus bergerak maju. Ini mengandung makna bahwa pembangunan bukanlah sebuah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan tanpa akhir menuju masa depan yang lebih baik bagi semua penduduk Kabupaten Badung. Dengan semangat Maju ini, Kabupaten Badung dapat menciptakan perubahan yang positif dan mewujudkan potensi sejati.</p>
	Sejahtera	<p>Sejahtera dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mulai dari utara hingga selatan, kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, serta perlindungan terhadap lingkungan alam. Sejahtera berarti tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak bagi semua warga Kabupaten Badung, tetapi juga memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan air bersih.</p> <p>Lebih dari itu, sejahtera juga mencakup kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Badung untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, memiliki akses yang adil terhadap pengambilan keputusan, dan merasa dihargai dan dihormati sebagai anggota masyarakat. Ini berarti membangun institusi yang kuat, mempromosikan hak asasi</p>



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		manusia, dan menghormati keberagaman budaya dan identitas.
	Pola Pembangunan Semesta Berencana	Pola Pembangunan Semesta Berencana merupakan salah satu konsep pembangunan yang merujuk pada kondisi yang diharapkan terjadi di Kabupaten Badung yaitu Satu Kesatuan Wilayah, Satu Kesatuan Pola Pengelolaan, dan Satu Kesatuan Pola Pembangunan. Pola Pembangunan Semesta Berencana juga menjadi dasar dalam pemuliaan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang berlandaskan nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i> .
	Berkelanjutan	<p>Keberlanjutan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung mengacu pada perlindungan terhadap lingkungan alam. Ini mencakup upaya untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mencegah kerusakan lingkungan, dan membatasi emisi gas rumah kaca dan polusi lainnya. Perlindungan lingkungan tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem alami, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekonomi.</p> <p>Selain itu, keberlanjutan juga mencakup aspek ekonomi. Ini berarti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan.</p> <p>Lebih dari itu, keberlanjutan dalam pembangunan juga mencakup dimensi sosial. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya tahan. Ini mencakup mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, mempromosikan kesetaraan gender, dan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.</p> <p>Pada intinya, keberlanjutan dalam pembangunan adalah tentang menciptakan Kabupaten Badung yang lebih baik untuk generasi masa depan. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang bijaksana, investasi yang berkelanjutan, dan kerja sama antar semua pemangku kepentingan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan</p>



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		sosial. Dengan mewujudkan makna keberlanjutan dalam pembangunan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan lebih berkelanjutan bagi semua orang.
	Tri Hita Karana	<p><i>Tri Hita Karana</i> adalah konsep filosofis dalam budaya Bali yang menggambarkan harmoni dan keseimbangan antara Manusia, Alam, dan Tuhan. Dalam konteks pembangunan di Kabupaten Badung, <i>Tri Hita Karana</i> menjadi landasan yang penting untuk memandu pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada keberlangsungan lingkungan, sosial, dan spiritual.</p> <p>Penerapan <i>Tri Hita Karana</i> dalam pembangunan Kabupaten Badung berarti memperhatikan interaksi yang seimbang antara tiga elemen utama: Pertama, hubungan harmonis antara manusia dengan alam, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Kedua, hubungan yang sehat antara manusia dengan manusia, yang mencakup pembangunan masyarakat yang inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemenuhan kebutuhan dasar semua Masyarakat Kabupaten Badung. Ketiga, hubungan yang mendalam antara manusia dengan Tuhan, yang mencakup praktik spiritual dan keagamaan yang memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.</p>

Sumber: Penjabaran definisi Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung

Visi ini menyatukan aspirasi untuk kemajuan, kelestarian, dan kesejahteraan, dengan mengakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang ada melalui pembangunan yang integratif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk tumbuh secara berkelanjutan sambil memelihara identitas dan nilai-nilai yang menjadi ciri khasnya.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung telah selaras dengan visi pembangunan jangka panjang nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 serta visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bali dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2045. Berikut adalah tabel keselarasan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung dengan Provinsi Bali dan Nasional.



Tabel 4.2.


Keselarasan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Terhadap Provinsi Bali dan Nasional

	RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045
Visi Pembangunan Jangka Panjang	"Indonesia Emas 2045": Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.	" <i>Bali Dwipa Jaya</i> ": Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan <i>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</i> melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.	Badung Unggul: Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>
Makna Visi Secara Umum	Negara Kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia	Bali yang tertata secara fundamental dan komprehensif melalui pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai <i>Tri Hita Karana</i> yang berakar dari kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> mewujudkan Bali yang Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan	Kabupaten Badung menjadi yang terbaik dalam segala aspek pembangunan, menjadi tolok ukur kesuksesan, dan barometer pembangunan. Dengan komitmen besar, Kabupaten Badung bertekad untuk unggul dalam pemajuan ekonomi, kesejahteraan yang merata, serta melindungi dan mengelola warisan alam berlandaskan filosofi <i>Sad Kerthi</i> dan <i>Tri Hita Karana</i> .

Sumber: Hasil Penyelarasan Terhadap Dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Bali

Penyelarasan antara RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 tidak hanya terbatas pada visi pembangunan, tetapi juga mencakup aspek turunannya. Dalam RPJPN Nasional Tahun 2025-2045 yang menekankan tema Indonesia Emas 2045, terdapat pola pembangunan yang menjadi dasar perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan, yang juga harus diadopsi dalam penyusunan RPJP di tingkat daerah, termasuk kabupaten/kota. Keselarasan dalam pola pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan akhir pembangunan jangka panjang, yaitu Indonesia Emas 2045, dapat diwujudkan dan didukung oleh seluruh daerah di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah menerapkan Pola 5 Sasaran Visi – 8 misi – 17 arah pembangunan – 45 indikator. Pola ini mencerminkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (17-8-1945) dan nilai-nilai Pancasila. Pola ini harus diadopsi oleh pemerintah provinsi dan diselaraskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Guna mewujudkan pola tersebut di atas maka dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini juga



menggunakan pola yang sama yaitu 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.

Setelah penyelarasan visi dilakukan sesuai dengan pola tersebut, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan sasaran visi pembangunan jangka panjang. Sasaran visi ini mencerminkan gambaran besar kondisi Indonesia Emas yang diharapkan dalam 20 tahun mendatang. Sasaran visi RPJP Nasional ditetapkan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Pendapatan per Kapita
- b) Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Sosial Berkurang
- c) Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Transformatif
- d) Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Meningkatkan
- e) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*

Masing-masing sasaran visi dirumuskan indikator serta targetnya sebagai tolok ukur dalam mengukur keberhasilan perwujudan Indonesia Emas 2045. Kelima sasaran visi ini lah yang harus diselaraskan hingga ke Kabupaten/Kota di Indonesia. Tidak semua sasaran visi tersebut dapat diimplementasikan oleh kabupaten/kota sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kondisi dan kemampuan daerah. Sasaran visi yang disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Badung adalah:

- Sasaran ketiga yaitu Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatkan disesuaikan menjadi Badung yang Inovatif dan Transformatif.
- Sasaran keempat yaitu Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission* disesuaikan menjadi Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dalam Upaya Pemuliaan Alam dan Budaya Bali

Adapun penyelarasan terhadap sasaran visi RPJP Nasional tersebut terhadap visi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045

RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045					
Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline	Target
				2025	2045
Badung Unggul : Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan Tri Hita Karana	Peningkatan Pendapatan per Kapita	Pendapatan Perkapita	Rupiah	132.000.000/tahun 11.000.000/bulan	296.000.000/tahun 24.000.000/bulan
		Kontribusi Sektor Pariwisata dalam PDRB	Persen (%)	24,97	28,23
		Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	Persen (%)	6,12	6,57
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	2,15	0,61
		Rasio Gini	Indeks	0,271	0,193
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	2,28	0,38
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen (%)	11,58	14,87
	Badung yang Inovatif dan Transformatif meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,74	4,00
	Daya saing SDM meningkat dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,33	85,90
	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dalam Kerangka Pemuliaan Alam dan Budaya Bali	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	69,20	70,61
Indeks Pembangunan Kebudayaan		Indeks	90,00	100,00	

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPD Kabupaten Badung, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJPN

Tabel 4.4.
Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045					RPJPD Provinsi Bali 2025-2045					RPJPD Kabupaten Badung 2025-2045				
Visi	Sasaran Visi	Indikator	Baseline	Sasaran	Visi	Sasaran Visi	Indikator	Baseline	Sasaran	Visi	Sasaran Visi	Indikator	Baseline	Target
			2025	2045				2025	2045				2025	2045
Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 - 30.300	Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB Perkapita (Rp Juta)	69,10-69,94*	621,77 – 713,44	Badung Unggul : Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan Tri Hita Karana	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Perkapita	132.000.000	296.000.000
		Kontribusi PDRB Maritim (%)	7,6	15			Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	26,67*	103,09*			Kontribusi Sektor Pariwisata dalam PDRB	24,97	28,23
		Kontribusi PDRB Manufaktur (%)	20,8	28			Kontribusi PDB Industri Pengolahan	6,77 – 6,82	7,60 – 8,28			Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	6,12	6,57
	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pentantasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,57-3,93*	0,02-0,52*	Pentantasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	2,15	0,61		
		Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Rasio Gini (Indeks)	0,355 – 0,359*	0,294 – 0,317		Rasio Gini (Indeks)	0,271	0,193		
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi Bali (%)	1,35*	2,05		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,28	0,38		
				Pertumbuhan Ekonomi (%)		5,30 – 6,30	6,89-8,22	Pertumbuhan Ekonomi (%)		11,58	14,87			
	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index (Peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Indeks Inovasi Daerah	68	72	Badung yang Inovatif dan Transformatif	Indeks Daya Saing Daerah	3,74	4,00		
	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,6	93,5	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,59*	0,77*	Daya saing SDM meningkat dalam Upaya Pemuliaan Manusia Bali	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	83,33	85,90		
					Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	5,36	89,38	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dalam Upaya Pemuliaan Alam dan Budaya Bali	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	69,20	70,61		
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,19*	82,61*	Indeks Pembangunan Kebudayaan	90,00	100,00			

Keterangan: *Angka target yang dilakukan pemutakhiran

Sumber: Hasil Penyelarasan Terhadap Sasaran Visi RPJPN, dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045

4.2 Misi Pembangunan Jangka Panjang

Visi pembangunan jangka panjang adalah gambaran besar yang menjadi standar dalam membayangkan keadaan Kabupaten Badung dalam 20 tahun mendatang. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah-langkah implementatif yang terstruktur dan terperinci, yang diwujudkan dalam bentuk misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung.


Visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan elemen kunci dalam perencanaan dan pengembangan daerah. Visi mencerminkan gambaran besar dan aspiratif tentang masa depan yang diinginkan oleh masyarakat atau pemerintah daerah, sementara misi merupakan pernyataan tugas atau langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Transisi dari visi menjadi misi memiliki beberapa kepentingan sebagai berikut:

- a) **Konkretisasi Tujuan:** Visi pembangunan jangka panjang seringkali sangat umum dan idealistik. Misi membantu dalam mengubah visi ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih konkret dan dapat diukur, yang dapat dijalankan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan.
- b) **Alat Pengukur Kemajuan:** Misi memberikan panduan tindakan yang konkret, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan jangka panjang. Hal ini memungkinkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian yang diperlukan dalam perjalanan menuju visi tersebut.
- c) **Penentuan Prioritas:** Misi membantu dalam menentukan prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Ini memungkinkan pemilihan proyek-proyek dan program-program yang paling penting dan relevan untuk mencapai visi.
- d) **Pemahaman Bersama:** Misi adalah pernyataan tugas yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini membantu menciptakan pemahaman bersama tentang langkah-langkah yang perlu diambil.
- e) **Konsistensi dan Koordinasi:** Misi membantu dalam menjaga konsistensi dan koordinasi dalam berbagai inisiatif pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ini membantu dalam menghindari tumpang tindih dan penyebaran sumber daya yang tidak efisien.
- f) **Inspirasi dan Motivasi:** Misi dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini memberikan arah yang jelas dan tujuan yang kuat yang dapat memotivasi orang untuk berkontribusi pada pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan merumuskan misi berdasarkan visi, suatu daerah dapat memiliki panduan yang lebih jelas dan konkret dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya. Langkah ini membantu memastikan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Seperti yang dijelaskan dalam rumusan Visi Pembangunan Jangka Panjang di atas, merumuskan misi dalam RPJPD Kabupaten Badung tidak hanya menjadi perwujudan dari Visi, tetapi juga menyesuaikan dengan pola pembangunan nasional yang mencakup 8 misi nasional. Harmonisasi ini penting agar daerah dapat berkontribusi secara sejalan dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045.

Penyusunan misi pembangunan Kabupaten Badung mengarah pada tujuan-tujuan penting yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Misi pembangunan Kabupaten Badung mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta memperkuat keamanan daerah dan ketahanan



sosial budaya. Kabupaten Badung juga berkomitmen untuk pembangunan kewilayahan yang merata, infrastruktur berkualitas, dan kesinambungan pembangunan.

Adapun penjabaran dari masing-masing misi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. Misi 1. Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali

Transformasi sosial merupakan perubahan mendasar dalam nilai-nilai, norma, perilaku, dan struktur sosial masyarakat, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan di masa depan. Masyarakat Kabupaten Badung akan dihadapkan pada perubahan tatanan sosial sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi, dinamika ekonomi dunia yang semakin mengaburkan jarak dan waktu, maupun mitigasi terhadap kondisi-kondisi kahar tertentu yang berpengaruh langsung pada kondisi internal Badung seperti terjadinya wabah penyakit, perang antar negara, dll. Perubahan tatanan sosial ini apabila tidak diantisipasi semenjak dini maka akan membawa kerugian bagi Kabupaten Badung.

Aspek penting transformasi sosial mencakup perubahan struktural dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, penciptaan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, pengaruh terhadap pendidikan dan keterampilan, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, keberlanjutan lingkungan, adopsi inovasi dan teknologi, resilience terhadap perubahan, pencegahan konflik, pemulihan pasca-konflik, kesehatan mental, serta diplomasi dan hubungan antarbudaya.


Melalui transformasi sosial, masyarakat dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif dalam jangka panjang. Transformasi ini menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Masyarakat Kabupaten Badung merupakan manusia Bali yang unggul dan terbukti dari IPM Kabupaten Badung merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Bali. Keunggulan kualitas sumber daya manusia ini harus tetap terjaga selama Kabupaten Badung berdiri. Menjaga kualitas SDM Kabupaten Badung juga menunjukkan upaya untuk memuliakan manusia Bali di Kabupaten Badung. Pemuliaan manusia Bali merupakan salah satu arah dalam pembangunan Bali masa depan sesuai dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 tahun Bali Era Baru 2025-2125.

2. Misi 2. Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju

Dewasa ini perubahan ekonomi mulai sangat terasa dengan masuknya teknologi dan informasi seperti contoh sederhananya digitalisasi transaksi keuangan. Sektor Perdagangan dan Jasa mulai menerapkan mekanisme pembayaran secara non tunai dan mengurangi penggunaan uang tunai. Pada masa yang akan datang tentu kondisi ekonomi ini akan jauh lebih maju lagi dan Kabupaten Badung harus bersiap dengan perubahan tersebut. Bahkan menjadi yang paling unggul dan maju dalam pembangunan ekonomi. Kabupaten Badung harus memperhatikan perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi dan informasi yang berpengaruh pada transformasi ekonomi menjadi ekonomi berbasis digital. Transformasi ini bukan sekadar perubahan, tetapi juga peluang besar untuk pertumbuhan dan kemajuan.

Transformasi ekonomi unggul dan maju merupakan upaya strategis dalam mengubah struktur ekonomi Kabupaten Badung menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif,



resilient, dan mampu menghadapi tantangan global dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang ada. Ekonomi Maju dan Unggul dapat diterjemahkan sebagai berikut:


- **Diversifikasi Ekonomi:** Transformasi ekonomi unggul dan maju ditandai dengan diversifikasi sektor ekonomi, baik dari sektor primer, sekunder, hingga sektor tersier. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu, sehingga ekonomi lebih stabil dan tahan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia.
- **Inovasi dan Teknologi:** Transformasi ini mendorong penerapan inovasi dan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Investasi dalam riset dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi.
- **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Transformasi ekonomi unggul dan maju juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Melalui pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja ditingkatkan keterampilannya sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks.
- **Pembangunan Infrastruktur:** Infrastruktur yang memadai dan modern menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, memfasilitasi mobilitas barang dan jasa serta investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis.
- **Kolaborasi dan Kemitraan:** Transformasi ekonomi unggul dan maju juga mengedepankan kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sinergi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- **Ekonomi Hijau:** Transformasi ekonomi unggul dan maju juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan. Dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berpihak kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, transformasi ekonomi unggul dan maju merupakan upaya holistik untuk mengembangkan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui transformasi ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang lebih banyak, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transformasi ini juga menjadi fondasi dalam membangun negara atau daerah yang berdaya saing tinggi dan dapat bersaing di kancah global.

3. Misi 3. Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal

Transformasi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik andal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat, serta memperkuat integritas dan kapasitas institusi pemerintah dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan dengan baik. Berikut adalah narasi mengenai transformasi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik andal:

- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Transformasi tata kelola pemerintah melibatkan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dengan demikian,



masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah secara objektif, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

- **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Pelayanan publik yang andal memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Implementasi *e-government* dan digitalisasi layanan pemerintah memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik secara cepat, mudah, dan transparan.
- **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Transformasi ini juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah. Melalui pelatihan dan pendidikan, pegawai pemerintah ditingkatkan kompetensinya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- **Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan:** Transformasi tata kelola pemerintah yang andal mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat.
- **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:** Pelayanan publik yang andal ditandai dengan penyediaan layanan yang cepat, tepat, dan efisien. Melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan, masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan, serta pemerintah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Secara keseluruhan, transformasi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik andal merupakan upaya untuk mengubah paradigma pemerintahan yang berfokus pada kepentingan pemerintah menjadi pemerintahan yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Melalui transformasi ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi ini juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat.

4. Misi 4. Ketertiban Daerah Tangguh demi Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Ketertiban dan Keamanan daerah yang tangguh merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah yang berkelanjutan dan berkembang. Keamanan daerah yang tangguh merupakan prasyarat utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Keamanan tidak hanya berkaitan dengan aspek ketertiban dan keamanan fisik, namun juga mencakup keamanan sosial, ekonomi, politik, dan ekologi.

- **Ketertiban dan Keamanan Fisik:** Keamanan fisik menciptakan rasa aman bagi masyarakat untuk beraktivitas tanpa khawatir akan ancaman kejahatan atau konflik. Kehadiran kepolisian yang profesional, sistem keamanan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan adalah kunci dalam menciptakan ketertiban dan keamanan fisik.
- **Keamanan Sosial dan Ekonomi:** Keamanan sosial mencakup hubungan harmonis antar kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan agama. Sedangkan keamanan ekonomi berkaitan dengan stabilitas ekonomi, peluang kerja, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

- **Keamanan Politik dan Ekologi:** Keamanan politik menjamin stabilitas pemerintahan dan proses demokrasi yang berjalan dengan baik, sementara keamanan ekologi menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

Secara keseluruhan, keamanan daerah yang tangguh dan stabilisasi ekonomi daerah adalah dua pilar utama dalam menciptakan daerah yang stabil, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan memastikan kedua aspek ini terjaga dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

5. Misi 5. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai *Sad Kerthi*

Menjaga dan melindungi ekosistem lingkungan merupakan langkah yang sangat penting dalam menanggapi perubahan iklim dan mengurangi dampaknya. Kehadiran ekosistem yang sehat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko yang terkait dengannya. Oleh karena itu, perlindungan ekosistem menjadi elemen kunci dalam strategi perubahan iklim yang berkelanjutan.

Dari perspektif sosial-budaya, Kawasan Hutan, Sungai, dan Mata Air dianggap sebagai tempat yang suci bagi masyarakat Hindu Bali, termasuk di Kabupaten Badung. Sesuai dengan arah pembangunan masa depan Bali yang mengamanatkan perlindungan Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup sosial-budaya di Bali, perlindungan terhadap Gunung, Danau, Sungai, dan Mata Air di Kabupaten Badung menjadi langkah yang mutlak. Perlindungan alam Bali ini telah diamanatkan dalam konsep pembangunan *Sad Kerthi*. *Sad Kerthi* adalah Penyucian dan Pemuliaan enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan Manusia, terdiri atas:


- a. *Atma Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa.
- b. *Segara Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai.
- c. *Danu Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air.
- d. *Wana Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan.
- e. *Jana Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Manusia.
- f. *Jagat Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta.

Kearifan lokal *Sad Kerthi* telah mendapat pengakuan sebagai karakteristik Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali.

Adat, Seni, dan Budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Badung. Setiap aspek kehidupan di Badung tercermin dalam unsur-unsur adat, seni, dan budaya yang merupakan representasi dari Agama Hindu, agama mayoritas di wilayah tersebut. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, pertukaran informasi yang cepat dan mudah dapat menyebabkan perubahan budaya yang signifikan. Perubahan ini dapat mengancam kelestarian identitas budaya masyarakat Hindu Bali, khususnya di Badung.

Selain menjaga keberlanjutan identitas budaya, pelestarian dan pengembangan adat, seni, dan budaya juga memiliki dampak positif lain bagi Kabupaten Badung, seperti:

- **Daya Tarik Pariwisata yang Lebih Kuat:** Seni dan budaya lokal meningkatkan daya tarik pariwisata suatu daerah. Dengan potensi alam yang sudah dikenal, Kabupaten Badung dapat



menambah daya tarik wisata dengan memperkaya pengalaman wisatawan melalui seni tradisional, musik, tarian, kerajinan, dan pameran seni unik.


- **Pelestarian Warisan Budaya:** Promosi seni dan budaya lokal membantu pelestarian warisan budaya, memungkinkan masyarakat Badung untuk menjaga tradisi dan pengetahuan budaya mereka.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Pengembangan adat, seni, dan budaya memberikan peluang bagi masyarakat Badung untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata, menciptakan peluang pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi.
- **Pertukaran Budaya dan Dialog Antarbudaya:** Pariwisata yang berfokus pada seni dan budaya mempromosikan pertukaran budaya dan dialog antarbudaya, meningkatkan pemahaman lintas budaya dan toleransi.
- **Pendidikan dan Pemahaman:** Seni dan budaya lokal dapat menjadi sumber pendidikan dan pemahaman, meningkatkan kesadaran tentang keberagaman budaya.
- **Pembangunan Infrastruktur:** Pariwisata yang didukung oleh seni dan budaya memerlukan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pariwisata dan komunitas lokal.
- **Masa Depan yang Berkelanjutan:** Dengan merawat seni dan budaya tradisional, suatu daerah dapat menciptakan dasar untuk pariwisata berkelanjutan, menjaga daya tarik pariwisata jangka panjang dan mencegah komersialisasi yang merusak.

Pemajuan dan pelestarian adat, seni, dan budaya memainkan peran penting dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Badung yang berkelanjutan di masa depan, meningkatkan daya tarik pariwisata, mendukung ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan memperkaya pemahaman antarbudaya.

6. Misi 6. Memantapkan Pembangunan yang Maju, Adil, dan Merata

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Badung memiliki beberapa kepentingan yang sangat penting. Berikut adalah beberapa penjelasan detail mengenai pentingnya misi ini:

- **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Pembangunan kewilayahan yang merata dapat membantu dalam pemberdayaan ekonomi lokal di Kabupaten Badung. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi di daerah pedesaan serta memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal yang berpotensi, seperti pertanian, pariwisata berbasis budaya, dan kerajinan lokal. Dengan demikian, penduduk lokal dapat lebih mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung secara keseluruhan.
- **Kesejahteraan Masyarakat:** Pembangunan kewilayahan yang merata juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di seluruh wilayah Kabupaten Badung, masyarakat di daerah pedalaman juga dapat menikmati standar hidup yang lebih baik. Ini akan membantu mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan.
- **Preservasi Budaya dan Lingkungan:** Kabupaten Badung kaya akan warisan budaya dan alam yang memerlukan perlindungan dan pelestarian. Pembangunan kewilayahan yang merata memungkinkan untuk mempertahankan warisan budaya dan lingkungan di daerah pedalaman yang sering kali masih asli dan belum terpengaruh oleh perkembangan perkotaan. Dengan




demikian, tujuan ini juga mendukung upaya pelestarian budaya dan lingkungan di Kabupaten Badung.

- **Peningkatan Stabilitas Sosial:** Pembangunan kewilayahan yang merata dapat berkontribusi pada peningkatan stabilitas sosial di Kabupaten Badung. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk berkembang, akan tercipta rasa keadilan dan kesetaraan yang lebih besar di antara penduduk. Hal ini dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidaksetaraan pembangunan.
- **Peningkatan Daya Saing Wilayah:** Akhirnya, pembangunan kewilayahan yang merata juga dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Badung secara keseluruhan. Dengan memperkuat infrastruktur, sumber daya manusia, dan sektor ekonomi di seluruh wilayah, Kabupaten Badung dapat menjadi lebih menarik bagi investasi dan pariwisata. Ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

7. Misi 7. Memantapkan Sarana dan Prasarana yang Andal, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan

Secara keseluruhan, mewujudkan sarana dan prasarana yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan di Kabupaten Badung, adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga lingkungan alam, dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Hal ini akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi keberlangsungan dan kemajuan Kabupaten Badung di masa depan. Memantapkan sarana dan prasarana yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan penting bagi Kabupaten Badung untuk mewujudkan kondisi berikut ini:

- **Meningkatkan Kualitas Hidup:** Sarana dan prasarana yang berkualitas, seperti jalan raya yang baik, sistem transportasi yang efisien, air bersih yang layak, dan fasilitas kesehatan yang memadai, akan secara langsung meningkatkan kualitas hidup penduduk Kabupaten Badung. Masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan penting dan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
- **Pendorong Pertumbuhan Ekonomi:** Infrastruktur yang baik adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas, Kabupaten Badung dapat menarik investasi, mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.
- **Keberlanjutan Lingkungan:** Pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan akan membantu melindungi dan melestarikan lingkungan alam Kabupaten Badung. Ini termasuk penggunaan teknologi hijau dalam pembangunan, pengelolaan limbah yang baik, konservasi sumber daya alam, dan upaya lainnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Badung dapat menjaga keindahan alamnya dan mencegah kerusakan lingkungan yang tidak diinginkan.
- **Peningkatan Kepuasan Masyarakat:** Sarana dan prasarana yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis dan positif.
- **Daya Tarik Pariwisata:** Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan juga akan meningkatkan daya tarik Kabupaten Badung sebagai tujuan wisata. Wisatawan akan lebih tertarik untuk mengunjungi daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik, serta



lingkungan yang bersih dan terawat. Ini akan membantu meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- **Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana:** Pembangunan sarana dan prasarana yang kuat dan tahan bencana akan membantu Kabupaten Badung dalam menghadapi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Ini mencakup pembangunan tanggul, sistem drainase yang baik, dan infrastruktur lainnya yang dirancang untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat bencana.

8. Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Menuju Bali Dwipa Jaya

Mewujudkan kestinambungan pembangunan merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi Kabupaten Badung secara keseluruhan. Ini tidak hanya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan saat ini tidak bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan masa depan. Mewujudkan kestinambungan pembangunan Kabupaten Badung sangat penting dalam merencanakan pembangunan jangka panjang karena beberapa alasan krusial:

- **Pemeliharaan Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan:** Kestinambungan pembangunan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan sosial atau kerusakan lingkungan. Dengan mempertahankan keseimbangan ini, Kabupaten Badung dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana kebutuhan generasi sekarang dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- **Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan:** Kabupaten Badung memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Mewujudkan kestinambungan pembangunan memastikan bahwa sumber daya ini dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Hal ini termasuk prinsip-prinsip seperti pengelolaan hutan yang lestari, perlindungan sumber air, dan penanganan limbah yang ramah lingkungan.
- **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat:** Pembangunan yang berkelanjutan berarti memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi bagi semua lapisan masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup saat ini, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk kesejahteraan jangka panjang.
- **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif:** Kestinambungan pembangunan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pertumbuhan didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat. Ini termasuk memastikan akses yang setara terhadap lapangan kerja, peluang usaha, dan layanan keuangan, serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah di Kabupaten Badung.
- **Resilience terhadap Perubahan Iklim dan Bencana:** Pembangunan yang berkelanjutan mempersiapkan Kabupaten Badung untuk menghadapi perubahan iklim dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Ini mencakup peningkatan infrastruktur tangguh, sistem peringatan dini, dan rencana darurat, serta pengurangan risiko melalui tindakan mitigasi dan adaptasi.
- **Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan:** Kabupaten Badung adalah tujuan wisata utama di Bali. Dengan memprioritaskan kestinambungan pembangunan, pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam atau merugikan komunitas lokal. Ini termasuk praktik pariwisata yang bertanggung jawab, pengelolaan kunjungan wisatawan, dan pelestarian warisan budaya.

Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 Terhadap Misi RPJPD Provinsi Bali dan RPJPN adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 Terhadap Misi RPJPD Provinsi Bali dan RPJPN

	RPJP 2025-2045		
	Nasional	Provinsi Bali	Kabupaten Badung
Visi	Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	“Bali Dwipa Jaya” Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan tetap berpijak pada budaya lokal Bali	Badung Unggul : Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>
Misi 1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas dan Adaptif	Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali
Misi 2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif	Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju
Misi 3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Koordinatif	Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal
Misi 4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh dan Kondusif, Demokrasi Substansial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Ketertiban Daerah Tangguh Demi Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Misi 5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai <i>Sad Kerthi</i>
Misi 6	Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Memantapkan Pembangunan yang Maju, Adil, dan Merata
Misi 7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Terkoneksi serta Ramah Lingkungan	Memantapkan Sarana dan Prasarana yang Andal, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan
Misi 8	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Menuju Bali Dwipa Jaya

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPD Provinsi Bali dan RPJPN



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Badung Unggul yang Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan *Tri Hita Karana* membutuhkan suatu orientasi kebijakan pembangunan yang terencana dan terstruktur dengan baik. Kebijakan pembangunan ini dirancang untuk merangkul aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Implementasi kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan langkah konkret untuk mewujudkan visi Badung Unggul: Maju, Sejahtera Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan *Tri Hita Karana*. Kebijakan ini memberikan panduan yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang. Selain itu, kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung harus sejalan dengan rencana pembangunan Provinsi Bali agar dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Adapun arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Misi Pembangunan Jangka Panjang		Arah Kebijakan Pembangunan Pada Masing-Masing Pentahapan Pembangunan			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Akselerasi Pondasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Penyiapan Pondasi Badung Unggul	Perwujudan Badung Unggul
Misi 1	Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	Akselerasi pengembangan pelayanan dasar prima bagi penduduk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial yang didukung oleh sistem informasi dan teknologi yang mumpuni dan andal.	Kesinambungan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berkualitas berbasis sistem informasi dan teknologi yang mumpuni dan andal.	Pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif, modern, inovatif, dan produktif berbasis sistem informasi dan teknologi yang mumpuni dan andal.	Masyarakat Badung Unggul dan Mulia.
Misi 2	Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju	Akselerasi pengembangan pertanian dan pariwisata unggulan berkelanjutan mendukung wisata premium, pengembangan ekosistem digital berkualitas bagi ekonomi kreatif.	Pemantapan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Badung yang berorientasi pada peningkatan ekonomi kreatif berbasis Komoditas Unggulan dan Pariwisata Berkelanjutan yang didukung oleh ekosistem digital yang andal.	Ekspansi pemasaran produk pertanian dan pariwisata unggulan berkelanjutan untuk pasar global, dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dalam rangka memperkuat pembangunan di wilayah Kabupaten Badung.	Ekonomi Badung Unggul melalui perwujudan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pertanian dan pariwisata berkelanjutan yang didukung oleh ekonomi kreatif dengan naungan ekosistem digital yang andal dan mumpuni. ▪ Pusat-pusat ekonomi lokal yang mantap dan stabil sebagai motor pembangunan wilayah.
Misi 3	Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	Reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemantapan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan	Terwujudnya kelembagaan yang adaptif, terintegrasi, kolaboratif dan modern dalam pelayanan publik.	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan.

Misi Pembangunan Jangka Panjang		Arah Kebijakan Pembangunan Pada Masing-Masing Pentahapan Pembangunan			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Akselerasi Pondasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Penyiapan Pondasi Badung Unggul	Perwujudan Badung Unggul
			teknologi dan sistem informasi yang andal.		
Misi 4	Ketertiban daerah tangguh demi stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan ketertiban umum yang mendukung akselerasi pembangunan berkelanjutan dan investasi berkualitas guna mempertahankan daya saing daerah.	Digitalisasi serta modernisasi sistem penegakan ketertiban umum yang disertai peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur.	Optimalisasi penegakan ketertiban umum untuk mewujudkan perekonomian Kabupaten Badung yang berdaya saing tinggi.	Perekonomian Kabupaten Badung yang unggul di level Nasional serta telah berkecimpung pada kancah ekonomi global.
Misi 5	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Penguatan perlindungan adat, agama, dan budaya; penguatan karakter masyarakat berdaya saing dan tangguh bencana; dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i> .	Pemantapan perlindungan adat, agama, dan budaya; masyarakat berdaya saing dan tangguh bencana; dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i> .	Masyarakat Kabupaten Badung yang adaptif dan inovatif terhadap perubahan global namun tetap terjaga nilai-nilai luhur <i>Sad Kerthi</i> yang telah diwariskan turun temurun; serta sumber daya alam yang <i>ajeg</i> dan lestari.	Ketangguhan adat, agama, dan budaya yang didukung oleh karakter masyarakat Kabupaten badung yang inovatif dan adaptif, serta sumber daya alam yang <i>ajeg</i> dan lestari berlandaskan nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i> .
Misi 6	Memantapkan Pembangunan yang Maju, Adil, dan Merata	Akselerasi pembangunan dan konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas pada bidang pertanian organik dan pariwisata berkelanjutan.	Pemantapan pembangunan dan konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas pada bidang pertanian organik dan pariwisata berkelanjutan.	Pembangunan dan konektivitas wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.	Terwujudnya pembangunan Kabupaten Badung Unggul yang Maju, Adil, dan Merata.
Misi 7	Memantapkan Sarana dan Prasarana yang Andal, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan	Akselerasi pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas pelayanan dasar serta lingkungan yang berkualitas, dan andal.	pemantapan kualitas sarana prasarana dan utilitas pelayanan dasar yang andal, modern, dan ramah lingkungan.	pengembangan lebih lanjut sarana prasarana dan utilitas pelayanan dasar yang modern, terintegrasi, berkualitas, dan ramah lingkungan.	Sarana prasarana dan utilitas pelayanan dasar Kabupaten Badung yang unggul.
Misi 8	Mewujudkan Kesenambungan	Perkuatan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung; perkuatan pengendalian pembangunan;	Pemantapan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung; pengendalian	Pemerintah Kabupaten Badung yang berintegritas; pembangunan yang	Pemerintahan yang unggul; pembangunan yang terkendali; sistem elektronik

Misi Pembangunan Jangka Panjang		Arah Kebijakan Pembangunan Pada Masing-Masing Pentahapan Pembangunan			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Akselerasi Pondasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Penyiapan Pondasi Badung Unggul	Perwujudan Badung Unggul
	Pembangunan Menuju Bali Dwipa Jaya	Pengembangan pembiayaan inovatif.	pembangunan; dan pemantapan pembiayaan inovatif.	berkesinambungan dan terkendali; sistem pembangunan terintegrasi dengan data yang akuntabel; Pembiayaan pembangunan yang sehat dan mandiri.	dan data pembangunan terintegrasi dan dikelola optimal; Pembiayaan pembangunan yang sehat dan mandiri.

Sumber: Pemetaan Arah Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Badung



5.2 Sasaran Pokok Pembangunan

Sasaran pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi Kabupaten Badung yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi yang telah dirumuskan sebelumnya dalam kerangka mendorong terwujudnya visi pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama pembangunan (IUP) hasil penyesuaian RPJPD Kabupaten Badung dengan RPJPD Provinsi Bali dan RPJPN sesuai dengan karakteristik daerah Kabupaten Badung yang mencerminkan keotonomian daerah Kabupaten Badung itu sendiri.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah atau tujuan pembangunan mengacu pada hasil yang diinginkan atau kondisi yang diharapkan untuk dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Tujuan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, dan politik. Secara umum, arah pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan.

Arah pembangunan ini sering diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan proyek yang dirancang untuk mempromosikan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mencapai tujuan pembangunan ini, diharapkan bahwa masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, RPJPN dan RPJPD Provinsi Bali memiliki pola 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan yang diadopsi dan diselaraskan pada perencanaan pembangunan daerah. Demi keselarasan pembangunan dengan provinsi dan nasional, maka 8 misi RPJPD Kabupaten Badung tersebut di atas akan dijabarkan ke dalam 17 arah pembangunan sebagai berikut.

Tabel 5.2.

17 Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

No	RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	
	Agenda/Misi	17 Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung
(1)	(2)	(3)
1.	Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	1. Kesehatan Unggul Untuk Semua Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali
		3. Perlindungan Sosial yang Adil dan Adaptif Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali
2.	Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju	4. Pemanfaatan IPTEK, Inovasi berkesinambungan, dan Produktivitas Ekonomi Meningkat
		5. Penerapan Ekonomi Hijau
		6. Transformasi Digital
		7. Integrasi ekonomi Lokal dan Nasional



No	RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	
	Agenda/Misi	17 Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung
(1)	(2)	(3)
		8. Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3.	Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif
4.	Ketertiban Daerah Tangguh, Demi Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10. Ketertiban Daerah yang Tangguh
		11. Stabilitas Ekonomi Makro Menuju Bali Dwipa Jaya
		12. Penegakan Hukum Adaptif
5.	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai <i>Sad Kerthi</i>	13. Tradisi, Adat, Agama dan Budaya yang <i>Ajeg</i> dan Lestari berlandaskan nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i>
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		15. Lingkungan Hidup Berkualitas Dalam Kerangka Pemuliaan Alam Bali
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim untuk mewujudkan ketangguhan alam Bali.
6	Memantapkan Pembangunan yang Maju, Adil, dan Merata	
7	Memantapkan Sarana dan Prasarana yang Andal, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan	
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Menuju Bali Dwipa Jaya	

Sumber: Perumusan Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung

Tabel 5.3.

Penyelarasan Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 Terhadap Arah (Tujuan) Pembangunan Provinsi Bali

RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045		RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	
Transformasi (Agenda Perubahan)	17 Arah (Tujuan) Pembangunan	Transformasi (Agenda Perubahan)	17 Arah (Tujuan) Pembangunan
Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas dan Adaptif	1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	1. Kesehatan Unggul Untuk Semua Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		3. Perlindungan Sosial yang Adil dan Adaptif Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali
Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju	4. Pemanfaatan IPTEK, Inovasi berkesinambungan, dan Produktivitas Ekonomi Meningkat

RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045		RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	
Transformasi (Agenda Perubahan)	17 Arah (Tujuan) Pembangunan	Transformasi (Agenda Perubahan)	17 Arah (Tujuan) Pembangunan
	5. Penerapan Ekonomi Hijau		5. Penerapan Ekonomi Hijau
	6. Transformasi Digital		6. Transformasi Digital
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		7. Integrasi Ekonomi Lokal dan Nasional
	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		8. Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Koordinatif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh dan Kondusif, Demokrasi Substansial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Ketertiban Daerah Tangguh Demi Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10. Ketertiban Daerah yang Tangguh
	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		11. Stabilitas Ekonomi Makro Menuju Bali Dwipa Jaya
	12. Kerjasama Daerah dan Pertahanan Kawasan		12. Penegakan Hukum Adaptif
Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai <i>Sad Kerthi</i>	13. Tradisi, Adat, Agama dan Budaya yang <i>Ajeg</i> dan Lestari berlandaskan nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i>
	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15. Lingkungan Hidup Berkualitas		15. Lingkungan Hidup Berkualitas Dalam Kerangka Pemuliaan Alam Bali
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim untuk mewujudkan ketangguhan alam Bali.

Sumber: Hasil Penyelarasan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPD Kabupaten Badung terhadap RPJPD Provinsi Bali

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi dunia, transformasi daerah menjadi salah satu langkah strategis yang sangat krusial untuk mengakselerasi perekonomian Kabupaten Badung dan keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*). *Middle income trap* adalah situasi di mana suatu daerah mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi setelah mencapai tingkat pendapatan menengah, sehingga sulit untuk naik menjadi daerah dengan pendapatan tinggi. Untuk menghindari situasi ini, Pemerintah Kabupaten Badung perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan transformasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berikut adalah Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung dan keselarasannya dengan Arah Pembangunan serta Arah Kebijakan Transformasi Daerah Provinsi Bali.

Tabel 5.4.
Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung 2025-2045

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
Misi/Agenda	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial Yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	Penegakan budaya perilaku hidup sehat.
	Penguatan kualitas tenaga medis dan kesehatan yang merata yang didukung dengan kesejahteraan yang terjamin serta pendayagunaan sumber daya manusia wilayah setempat sebagai sumber tenaga medis utama.
	Pemantapan kualitas fasilitas kesehatan yang merata dan berkeadilan.
	Perlindungan sosial yang adaptif yang merata dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat melalui: Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan maksimal (100%) bagi seluruh kelompok pekerja, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, Jaminan sosial terkait adat dan agama, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan program terkait perubahan iklim.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.
	Penuntasan stunting.
	Pelayanan kesehatan berbasis data dan teknologi informasi unggul.
	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.
	Penegakan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama serta dukungan terhadap 3 tahun pendidikan menengah)
	Pemantapan kualitas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama yang merata yang didukung



Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
Misi/Agenda	Arah Kebijakan
	dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang unggul.
	Mendorong pengembangan pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas unggul.
	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.
	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan termasuk pada perluasan akses beasiswa, transportasi sekolah yang merata dan andal, serta penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bidang kesenian dan budaya, olahraga, teknologi dan informasi, hingga kewirausahaan.
	Pendidikan agama, kesenian, adat, dan budaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
	Kemiskinan 0% melalui perlindungan sosial adaptif, dan pemberdayaan sosial yang adil dan berkelanjutan.
	Peningkatan dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data sosial ekonomi untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
	Peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan budaya, adat, dan tradisi setempat.
	Perencanaan, penganggaran melalui APBD, APBDes, serta dana pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Penegakan lingkungan yang inklusif termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan optimalisasi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
	Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju
Pengembangan pertanian organik dan pertanian presisi pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	
Pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.	
Peningkatan kualitas subak melalui pemberian subsidi berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM petani, serta penerapan teknologi pertanian unggulan.	
Pengembangan sektor perdagangan jasa, dan ekonomi kreatif berorientasi pasar nasional dan global di kawasan perkotaan.	
Peningkatan diversifikasi ekonomi yang andal dan maju untuk mengurangi kebergantungan pada sektor pariwisata.	
Pengembangan kawasan pariwisata premium berkelanjutan berbasis komoditas unggulan Kabupaten Badung.	
Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim,	



Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
Misi/Agenda	Arah Kebijakan
	kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.
	Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata.
	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.
	Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM terutama pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.
	Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik lokal dan nasional.
	Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle</i> (EV) dan infrastruktur pendukungnya.
	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan budaya.
	Pemenuhan jaringan internet dan TIK yang inklusif
	Edukasi dan implementasi TIK bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran secara global melalui berbagai platform seperti <i>e-commerce</i> dan lainnya.
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.
	Perluasan dan penguatan peran serta desa adat dalam pembangunan daerah termasuk lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan desa adat seperti LPD dan Subak.
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
	Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis.
	Pengembangan pusat-pusat inkubasi usaha kreatif dan digital yang berorientasi pada pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual.
	Peningkatan BUMD.
	Pembangunan ekosistem digital.



Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
(Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
Misi/Agenda	Arah Kebijakan
Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Penguatan tata kelola kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan publik
	Optimalisasi peran kelembagaan yang kolaboratif lintas sektor melalui SDM ASN yang kompeten dan berintegritas.
Ketertiban Daerah Tangguh Demi Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan keamanan dan koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa adat untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
	Optimalisasi peran desa adat dalam penyelesaian konflik sosial.
	Optimalisasi peran desa adat dalam pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum (termasuk perijinan).
	Penguatan stabilitas ekonomi makro.
	Digitalisasi peraturan daerah terkait penegakan hukum, investasi, dan perijinan yang didukung oleh sumber daya manusia pengelola dan penegakan hukum yang unggul dan andal.
Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Penguatan dan pelestarian adat, seni, dan budaya.
	Perlindungan optimal pada subak melalui perlindungan lahan sawah, perlindungan sumber air, dan pengurangan beban produksi lainnya.
	Penguatan eksistensi desa adat dan lembaga-lembaga di bawah naungan desa adat di Kabupaten Badung.
	Digitalisasi desa adat dan aset-aset budaya yang berada di desa adat.
	Penguatan keluarga berkualitas dan peningkatan kesetaraan gender.
	Pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal yang berbasis pada kekuatan eksistensi desa adat dan lembaga-lembaga adat.
	Pembangunan wilayah pesisir dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan ketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat adaptif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.
	Pengembangan kawasan perkotaan yang humanis, adaptif, dan berkelanjutan.
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi, konservasi air, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
	Perluasan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan khususnya pada gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik.
	Penegakan RTRW dan RDTR untuk menjamin keberlanjutan dan pelestarian kawasan lindung dan kawasan budidaya berfungsi lindung.
	Pengelolaan terpadu risiko bencana dan pengembangan mitigasi secara struktural dan non-struktural dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana tinggi.
	Peningkatan mitigasi bencana pada skala mikro seperti perluasan pengembangan biopori dan sumur resapan pada lingkungan



Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
Misi/Agenda	Arah Kebijakan
Implementasi Transformasi	permukiman, perluasan pengembangan TPS3R, dan memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau skala lingkungan.
	Modernisasi irigasi dan modernisasi subak.
	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
	Penegakan proses pemantauan dan evaluasi RTRW dan RDTR
	Pengembangan kawasan berbasis aerocity untuk mendukung pengembangan Bandara Ngurah Rai.
	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung.
	Pengembangan transportasi umum massal terintegrasi yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi.
	Penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh.
	Peningkatan sistem elektronik secara terpadu dan manajemen tata kelola melalui kebijakan satu data pembangunan.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> , dan pendanaan alternatif lainnya.
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
	Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	

Sumber: Hasil Kajian Arah Transformasi daerah kabupaten Badung

Tabel 5.5.

Keselarasn Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan, dan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung 2025-2045

No	Misi/Agenda	Arah (Tujuan) Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
1	Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	Kesehatan Unggul untuk Semua Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	<p>Penegakan budaya perilaku hidup sehat.</p> <p>Penguatan kualitas tenaga medis dan kesehatan yang merata yang didukung dengan kesejahteraan yang terjamin serta pendayagunaan sumber daya manusia wilayah setempat sebagai sumber tenaga medis utama.</p> <p>Pemantapan kualitas fasilitas kesehatan yang merata dan berkeadilan.</p> <p>Perlindungan sosial yang adaptif yang merata dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat melalui: Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan maksimal (100%) bagi seluruh kelompok pekerja, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, jaminan sosial terkait adat dan agama, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan program terkait perubahan iklim.</p> <p>Pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.</p> <p>Penuntasan stunting.</p> <p>Pelayanan kesehatan berbasis data dan teknologi informasi unggul.</p> <p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.</p>
		Pendidikan Berkualitas yang Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	<p>Penegakan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama serta dukungan terhadap 3 tahun pendidikan menengah).</p> <p>Pemantapan kualitas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama yang merata yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang unggul.</p> <p>Mendorong pengembangan pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas unggul.</p> <p>Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.</p>

No	Misi/Agenda	Arah (Tujuan) Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		<p>Perindungan Sosial yang Adil dan Adaptif Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali</p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan termasuk pada perluasan akses beasiswa, transportasi sekolah yang merata dan andal, serta penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bidang kesenian dan budaya, olahraga, teknologi dan informasi, hingga kewirausahaan.</p> <p>Pendidikan agama, kesenian, adat, dan budaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan.</p> <p>Kemiskinan 0% melalui perlindungan sosial adaptif, dan pemberdayaan sosial yang adil dan berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</p> <p>Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.</p> <p>Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data sosial ekonomi untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.</p> <p>Peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan budaya, adat, dan tradisi setempat.</p> <p>Perencanaan, penganggaran melalui APBD, APBDes, serta dana pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penegakan lingkungan yang inklusif termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan optimalisasi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.</p>
2	Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju	Pemanfaatan IPTEK, Inovasi berkesinambungan, dan Produktivitas Ekonomi Meningkat	<p>Pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.</p> <p>Peningkatan kualitas subak melalui pemberian subsidi berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM petani, serta penerapan teknologi pertanian unggulan.</p> <p>Pengembangan kawasan pariwisata premium berkelanjutan berbasis komoditas unggulan Kabupaten Badung.</p> <p>Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata.</p> <p>Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.</p> <p>Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM terutama pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.</p> <p>Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.</p>

No	Misi/Agenda	Arah (Tujuan) Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			<p>Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis.</p> <p>Pengembangan pusat-pusat inkubasi usaha kreatif dan digital yang berorientasi pada pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual.</p> <p>Peningkatan BUMD.</p>
		Penerapan Ekonomi Hijau	<p>Pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan yang dapat diarahkan sebagai kawasan wisata premium dan pengembangan ekonomi kreatif untuk sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan di kawasan perdesaan, yang terintegrasi dengan jejaring pemasaran berorientasi ekspor di kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan pertanian organik dan pertanian presisi pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Peningkatan diversifikasi ekonomi yang andal dan maju untuk mengurangi kebergantungan pada sektor pariwisata.</p> <p>Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.</p> <p>Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle</i> (EV) dan infrastruktur pendukungnya.</p>
		Transformasi Digital	<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Pemenuhan jaringan internet dan TIK yang inklusif.</p> <p>Edukasi dan implementasi TIK bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran secara global melalui berbagai platform seperti <i>e-commerce</i> dan lainnya.</p> <p>Pembangunan ekosistem digital.</p>
		Integrasi Ekonomi Lokal Dan Nasional	<p>Pengembangan sektor perdagangan jasa, dan ekonomi kreatif berorientasi pasar nasional dan global pada di kawasan perkotaan.</p> <p>Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik lokal dan nasional.</p> <p>Perluasan dan penguatan peran serta desa adat dalam pembangunan daerah termasuk lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan desa adat seperti LPD dan Subak.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p>

No	Misi/Agenda	Arah (Tujuan) Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<p>Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.</p> <p>Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan budaya.</p>
3	Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	<p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Penguatan tata kelola kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan publik.</p> <p>Optimalisasi peran kelembagaan yang kolaboratif lintas sektor melalui SDM ASN yang kompeten dan berintegritas.</p>
4	Ketertiban daerah tangguh demi stabilitas ekonomi makro daerah	Ketertiban Daerah yang Tangguh	<p>Peningkatan keamanan dan koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa adat untuk mengurangi tingkat kriminalitas.</p> <p>Optimalisasi peran desa adat dalam penyelesaian konflik sosial.</p> <p>Optimalisasi peran desa adat dalam pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum (termasuk perijinan).</p>
		Stabilitas Ekonomi Makro Menuju Bali Dwipa Jaya	Penguatan stabilitas ekonomi makro.
		Penegakan Hukum Adaptif	Digitalisasi peraturan daerah terkait penegakan hukum, investasi, dan perijinan yang didukung oleh sumber daya manusia pengelola dan penegakan hukum yang unggul dan andal.
5	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Tradisi, Adat, Agama dan Budaya yang <i>Ajeg</i> dan Lestari Berlandaskan Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	<p>Penguatan dan pelestarian adat, seni, dan budaya.</p> <p>Perlindungan optimal pada subak melalui perlindungan lahan sawah, perlindungan sumber air, dan pengurangan beban produksi lainnya.</p> <p>Penguatan eksistensi desa adat dan lembaga-lembaga di bawah naungan desa adat di Kabupaten Badung.</p> <p>Digitalisasi desa adat dan aset-aset budaya yang berada di desa adat.</p>
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penguatan Keluarga Berkualitas dan Peningkatan Kesenjangan Gender.
		Lingkungan Hidup Berkualitas Dalam Kerangka Pemuliaan Alam Bali	Pembangunan wilayah pesisir dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan ketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat adaptif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.
			Pengembangan kawasan perkotaan yang humanis, adaptif, dan berkelanjutan.
			Penegakan RTRW dan RDTR untuk menjamin keberlanjutan dan pelestarian kawasan lindung dan kawasan budidaya berfungsi lindung.
Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.			

No	Misi/Agenda	Arah (Tujuan) Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	<p>Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi, konservasi air, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>Perluasan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan khususnya pada gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik.</p> <p>Modernisasi irigasi dan modernisasi subak.</p>
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Untuk Mewujudkan Ketangguhan Alam Bali.	<p>Pengelolaan terpadu risiko bencana dan pengembangan mitigasi secara struktural dan non-struktural dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana tinggi.</p> <p>Peningkatan mitigasi bencana pada skala mikro seperti perluasan pengembangan biopori dan sumur resapan pada lingkungan permukiman, perluasan pengembangan TPS3R, dan memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau skala lingkungan.</p>

Sumber: Hasil Penyelarasan Misi, Arah Pembangunan, dan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Tabel 5.6.

Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 terhadap RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
	1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas dan Adaptif	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</p> <p>Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah-daerah non perkotaan.</p> <p>Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.</p> <p>Penuntasan stunting dan eliminasi malaria.</p> <p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.</p> <p>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</p>	Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
		<p>Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat keberkerjaan tinggi.</p> <p>Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta mendorong pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.</p> <p>Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar.</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI.</p> <p>Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.</p> <p>Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marjinal antara lain, melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.</p> <p>Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marjinal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja</p>		<p>Pelayanan kesehatan berbasis data dan teknologi informasi unggul.</p> <p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.</p> <p>Penegakan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama serta dukungan terhadap 3 tahun pendidikan menengah).</p> <p>Pemantapan kualitas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama yang merata yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang unggul.</p> <p>Mendorong pengembangan pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas unggul.</p> <p>Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan termasuk pada perluasan akses beasiswa, transportasi sekolah yang merata dan andal, serta penyediaan fasilitas pendukung</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>bukan penerima upah dan rentan, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</p> <p>Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.</p> <p>Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data sosial ekonomi untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.</p> <p>Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.</p> <p>Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <p>Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk</p>	

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.</p> <p>Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.</p>	
2		Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif	<p>Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan.</p> <p>Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.</p> <p>Peningkatan diversifikasi ekonomi Bali dengan penerapan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.</p>	<p>Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju</p> <p>Pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan yang dapat diarahkan sebagai kawasan wisata premium dan pengembangan ekonomi kreatif untuk sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan di kawasan perdesaan, yang terintegrasi dengan jejaring pemasaran berorientasi ekspor di kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan pertanian organik dan pertanian presisi pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.</p> <p>Peningkatan kualitas subak melalui pemberian subsidi berkelanjutan, peningkatan kualitas</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan dengan menekankan di antaranya ekonomi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera.</p> <p>Pengembangan kawasan pariwisata premium.</p> <p>Pengembangan kawasan pariwisata massal (<i>mass tourism</i>).</p> <p>Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multi pihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestik dan internasional.</p> <p>Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.</p> <p>Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, padi, kakao pada sentra-sentra ekonomi lokal.</p> <p>Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.</p> <p>Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas</p>	

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.</p> <p>Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan provinsi-provinsi di negeri ASEAN Asia Timur, Pasifik, dan Australia.</p> <p>Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM terutama pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau <i>ecotourism</i>.</p> <p>Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.</p> <p>Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.</p> <p>Revitalisasi penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja serta Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.</p> <p>Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi kualitas layanan, dan fasilitasi perdagangan untuk memajukan kelancaran rantai pasok dan peningkatan rantai nilai pada produksi komoditas unggulan, industri pariwisata, dan industri kreatif.</p> <p>Penerapan Sistem Angkutan Umum Massal yang berkelanjutan, memberikan kesetaraan dan pengelolaan infrastruktur pendukung yang mampu</p>	

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>mendorong tercapainya tujuan transisi energi penunjang penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) atau teknologi ramah lingkungan lainnya.</p> <p>Pengembangan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Denpasar yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kultur atau budaya setempat.</p> <p>Pemenuhan jaringan internet dan TIK yang inklusif serta menjangkau wilayah-pulau kecil.</p> <p>Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.</p> <p>Edukasi dan implementasi TIK bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran secara global melalui berbagai platform seperti <i>e-commerce</i> dan lainnya.</p> <p>Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis.</p>	

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>Pengembangan pusat-pusat inkubasi usaha kreatif dan digital yang berorientasi pada pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual.</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau</p> <p>Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD dan pembentukan BUMD – BUMD baru.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan</p>	

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Koordinatif	<p>Penguatan integritas partai politik.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Penguatan Tata Kelola kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan publik</p> <p>Optimalisasi peran kelembagaan yang kolaboratif lintas sektor melalui SDM ASN yang kompeten dan berintegritas</p>	Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	<p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Penguatan Tata Kelola kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan publik</p> <p>Optimalisasi peran kelembagaan yang kolaboratif lintas sektor melalui SDM ASN yang kompeten dan berintegritas</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
	4	Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh dan Kondusif, Demokrasi Substansial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan keamanan dan koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa adat untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.	Ketertiban daerah tangguh demi stabilitas ekonomi daerah
Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.			Optimalisasi peran desa adat dalam penyelesaian konflik sosial.	
Penguatan tata kelola supremasi hukum yang akuntabel berlandaskan Pancasila			Optimalisasi peran desa adat dalam pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum (termasuk perijinan)	
Optimalisasi supremasi hukum melalui digitalisasi sistem penegakan hukum yang modern serta peningkatan kualitas SDM penegakan hukum yang berintegritas			Penguatan stabilitas ekonomi makro	
Penguatan Supremasi hukum yang akuntabel dalam kebebasan sipil dan kesetaraan bagi semua warga negara			Digitalisasi peraturan daerah terkait penegakan hukum, investasi, dan perijinan yang didukung oleh sumber daya manusia pengelola dan penegakan hukum yang unggul dan andal	
Peningkatan kerja sama daerah dalam penguatan hukum dan keamanan daerah				
5	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penanaman kebudayaan Bali yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan <i>Nilai Sad Kerthi</i>	Penguatan dan pelestarian adat, seni, dan budaya.
		Peningkatan pengakuan, penghormatan, penguatan desa adat, subak, banjar, lembaga-lembaga adat dan hak adat masyarakat Bali		Perlindungan optimal pada subak melalui perlindungan lahan sawah, perlindungan sumber air, dan pengurangan beban produksi lainnya.
		Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.		Penguatan eksistensi desa adat dan lembaga-lembaga di bawah naungan desa adat di Kabupaten Badung.
		Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama di Bali sebagai penggerak masyarakat		Digitalisasi desa adat dan aset-aset budaya yang berada di desa adat.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.</p> <p>Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/<i>food estate</i> termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.</p> <p>Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kepulauan Nusa Penida dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan ketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.</p> <p>Pengelolaan terpadu risiko bencana dan pengembangan mitigasi secara struktural dan non-struktural yang melibatkan multi-aktor disertai dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana tinggi seperti banjir, kekeringan, longsor, bahaya gelombang ekstrim, abrasi, serta kebakaran hutan.</p> <p>Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti <i>rainwater harvesting</i>, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.</p>	

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>Modernisasi irigasi dan subak.</p> <p>Perlindungan pantai pulau Bali dan kepulauan Nusa Penida dari risiko abrasi.</p> <p>Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.</p> <p>Pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.</p> <p>Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pantai dari risiko abrasi.</p> <p>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.</p>	
6	Implementasi Transformasi	<p>Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.</p> <p>Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Pelaksanaan kerja sama antardaerah (antar kabupaten/kota dengan Provinsi Bali dan Provinsi Bali dengan provinsi lainnya) dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.</p>	Implementasi Transformasi	<p>Penegakan proses pemantauan dan evaluasi RTRW dan RDTR.</p> <p>Pengembangan kawasan berbasis <i>aerocity</i> untuk mendukung pengembangan Bandara Ngurah Rai.</p> <p>Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung.</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>Peningkatan layanan pelabuhan untuk mendukung pengembangan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi Bali-Nusa Tenggara diantaranya Pelabuhan Sangsit, Pelabuhan Gunaksa, Pelabuhan Toya Pakeh dan pemanfaatan secara optimal Pelabuhan Tanah Ampo dan pelabuhan lainnya.</p> <p>Pemanfaatan ALKI II di sisi wilayah Selat Lombok secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.</p> <p>Peningkatan penyebrangan antarpulau Bali dan kepulauan Nusa Penida termasuk pemanfaatan Pelabuhan Gunaksa, Pelabuhan Sangsit sebagai Pelabuhan Penyebrangan Regional dan pelabuhan lainnya dengan pembangunan infrastruktur Pelabuhan, penyediaan layanan Kapal RoRo, angkutan barang, kapal barang dan konektivitas multimoda yang menjangkau Kepulauan Nusa Penida.</p> <p>Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity di untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah.</p> <p>Pembangunan dan rehabilitasi pangkalan kenavigasian pelayaran - bangunan dan fasilitasnya.</p> <p>Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan.</p> <p>Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Denpasar dan metropolitan</p>	

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
		lainnya yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.		Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.			Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
	Penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh.			Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
	Peningkatan sistem elektronik secara terpadu dan manajemen tata kelola melalui kebijakan satu data pembangunan.			Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> , dan pendanaan alternatif lainnya.			Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).			Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan
	Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.			
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.			
	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.			
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.			

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Provinsi Bali)		Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
			<p>Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau</p>	
		<p>Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.</p>		

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPD Badung Terhadap RPJPD Provinsi Bali

Tabel 5.7.

Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Badung

Isu Strategis	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
	(Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Sumber Manusia	Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	Penegakan budaya perilaku hidup sehat.
		Penguatan kualitas tenaga medis dan kesehatan yang merata yang didukung dengan kesejahteraan yang terjamin serta pendayagunaan sumber daya manusia wilayah setempat sebagai sumber tenaga medis utama.
		Pemantapan kualitas fasilitas kesehatan yang merata dan berkeadilan.
		Perlindungan sosial yang adaptif yang merata dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat melalui: Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan maksimal (100%) bagi seluruh kelompok pekerja, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, Jaminan sosial terkait adat dan agama, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan program terkait perubahan iklim.
		Pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.
		Penuntasan stunting.
		Pelayanan kesehatan berbasis data dan teknologi informasi unggul.
		Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.
		Penegakan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama serta dukungan terhadap 3 tahun pendidikan menengah).
		Pemantapan kualitas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama yang merata yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang unggul.
		Mendorong pengembangan pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas unggul.
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.
		Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan termasuk pada perluasan akses beasiswa, transportasi sekolah yang merata dan andal, serta penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bidang kesenian & budaya, olahraga, teknologi dan informasi, hingga kewirausahaan.
Pendidikan agama, kesenian, adat, dan budaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan.		

Isu Strategis	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
		<p>Kemiskinan 0% melalui perlindungan sosial adaptif, dan pemberdayaan sosial yang adil dan berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</p> <p>Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.</p> <p>Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data sosial ekonomi untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.</p> <p>Peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan budaya, adat, dan tradisi setempat.</p> <p>Perencanaan, penganggaran melalui APBD, APBDes, serta dana pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penegakan lingkungan yang inklusif termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur; dan optimalisasi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.</p>
Penguatan Ketahanan dan Diversifikasi Ekonomi Badung	<p>Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju</p> <p>Pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan yang dapat diarahkan sebagai kawasan wisata premium dan pengembangan ekonomi kreatif untuk sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan di kawasan perdesaan, yang terintegrasi dengan jejaring pemasaran berorientasi ekspor di kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan pertanian organik dan pertanian presisi pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.</p> <p>Peningkatan kualitas subak melalui pemberian subsidi berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM petani, serta penerapan teknologi pertanian unggulan.</p> <p>Pengembangan sektor perdagangan jasa, dan ekonomi kreatif berorientasi pasar nasional dan global pada di kawasan perkotaan.</p> <p>Peningkatan diversifikasi ekonomi yang andal dan maju untuk mengurangi kebergantungan pada sektor pariwisata.</p> <p>Pengembangan kawasan pariwisata premium berkelanjutan berbasis komoditas unggulan Kabupaten Badung.</p>	

Isu Strategis	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
		<p>Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.</p> <p>Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata.</p> <p>Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.</p> <p>Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM terutama pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.</p> <p>Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik lokal dan nasional.</p> <p>Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle</i> (EV) dan infrastruktur pendukungnya.</p> <p>Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan budaya.</p> <p>Pemenuhan jaringan internet dan TIK yang inklusif</p> <p>Edukasi dan implementasi TIK bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran secara global melalui berbagai platform seperti <i>e-commerce</i> dan lainnya.</p> <p>Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.</p> <p>Perluasan dan penguatan peran serta desa adat dalam pembangunan daerah termasuk lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan desa adat seperti LPD dan Subak.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis.</p> <p>Pengembangan pusat-pusat inkubasi usaha kreatif dan digital yang berorientasi pada pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual.</p> <p>Peningkatan BUMD.</p>

Isu Strategis	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		Penguatan tata kelola kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan publik .
		Optimalisasi peran kelembagaan yang kolaboratif lintas sektor melalui SDM ASN yang kompeten dan berintegritas.
Peningkatan Ketertiban Masyarakat	Ketertiban daerah tangguh demi stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan keamanan dan koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa adat untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Optimalisasi peran desa adat dalam penyelesaian konflik sosial.
		Optimalisasi peran desa adat dalam pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum (termasuk perijinan).
		Penguatan stabilitas ekonomi makro.
		Digitalisasi peraturan daerah terkait penegakan hukum, investasi, dan perijinan yang didukung oleh sumber daya manusia pengelola dan penegakan hukum yang unggul dan andal.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian Seni, Adat, dan Budaya ▪ Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim 	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Penguatan dan pelestarian adat, seni, dan budaya.
		Perlindungan optimal pada subak melalui perlindungan lahan sawah, perlindungan sumber air, dan pengurangan beban produksi lainnya.
		Penguatan eksistensi desa adat dan lembaga-lembaga di bawah naungan desa adat di Kabupaten Badung.
		Digitalisasi desa adat dan aset-aset budaya yang berada di desa adat.
		Penguatan Keluarga Berkualitas dan Peningkatan Kesetaraan Gender.
		Pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal yang berbasis pada kekuatan eksistensi desa adat dan lembaga-lembaga adat.
		Pembangunan wilayah pesisir dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan ketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat adaptif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.
		Pengembangan kawasan perkotaan yang humanis, adaptif, dan berkelanjutan.
Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi, konservasi air, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.		

Isu Strategis	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
		<p>Perluasan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan khususnya pada gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik.</p> <p>Penegakan RTRW dan RDTR untuk menjamin keberlanjutan dan pelestarian kawasan lindung dan kawasan budidaya berfungsi lindung.</p> <p>Pengelolaan terpadu risiko bencana dan pengembangan mitigasi secara struktural dan non-struktural dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana tinggi.</p> <p>Peningkatan mitigasi bencana pada skala mikro seperti perluasan pengembangan biopori dan sumur resapan pada lingkungan permukiman, perluasan pengembangan TPS3R, dan memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau skala lingkungan.</p> <p>Modernisasi irigasi dan modernisasi subak.</p> <p>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.</p>
Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik	Implementasi Transformasi <ul style="list-style-type: none"> Penegakan proses pemantauan dan evaluasi RTRW dan RDTR. Pengembangan kawasan berbasis aerocity untuk mendukung pengembangan Bandara Ngurah Rai. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung. Pengembangan transportasi umum massal terintegrasi yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi. Penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh. Peningkatan sistem elektronik secara terpadu dan manajemen tata kelola melalui kebijakan satu data pembangunan. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>, dan pendanaan alternatif lainnya. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 	

Isu Strategis	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Badung)	
	Misi/Agenda	Arah Kebijakan
		<p>Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p> <p>Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.</p>

Sumber: Penyelarasan Isu Strategis Terhadap Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Badung



5.2.3. Indikator Utama Pembangunan dan Sasaran Pokok Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan Daerah atau yang disingkat IUP, merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Adapun IUP Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 beserta sasaran pokok pembangunannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Agenda (Misi) Pembangunan	17 Arah (Tujuan) Pembangunan	No Indikator	IUP RPJPD Kabupaten Badung	Satuan	Baseline	Target	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung
			Indikator		2025	2045	
Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	Kesehatan Unggul Untuk Semua Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	1	Usia Harapan Hidup (UHH LF SP2020) (tahun)	Tahun	75,84	76,93	Terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat Badung yang prima, adil, dan merata
		2	Kesehatan Ibu dan Anak:				
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup)	102,2	86,02	
		3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
	a. Penemuan Kasus TBC (<i>treatment coverage</i>)		Persen (%)	52,30	95,00		
	4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)				100,00	100,00
		5	Hasil Pembelajaran				
	a. Indeks Literasi		Indeks	88,89	100,00		
	b. Indeks Numerasi		Indeks	85,65	100,00		
	c. Rata-rata lama sekolah		Tahun	11,08	13,00		
	6	Angka Partisipasi Sekolah					
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (PAUD)	Persen (%)	100,00	100,00		
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun (SD)	Persen (%)	100,00	100,00		
7	Angka Kelulusan SMP (%)				100,00	100,00	
	8	Tingkat Kemiskinan (%)				2,15	0,61
Perindungan Sosial yang Adil dan Adaptif Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali		9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Persen (%)	57,68	100,00
	10		Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal		Persen (%)	9,64	13,49
		Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju	Pemanfaatan IPTEK, Inovasi berkesinambungan, dan Produktivitas Ekonomi Meningkat	11	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (%)	Persen (%)	6,12
12	Pengembangan Pariwisata						
	a. Proporsi Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap Total PDRB (%)			Persen (%)	24,97	28,23	
b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	Orang			6,4 Juta	9,1 Juta		
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen (%)	10,37	13,31			

Agenda (Misi) Pembangunan	17 Arah (Tujuan) Pembangunan	No Indikator	IUP RPJPD Kabupaten Badung	Satuan	Baseline	Target	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung
			Indikator		2025	2045	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
		14	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Pertanian pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	12,12	13,12	
			b. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	87,88	88,48	
			c. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	8,15	9,00	
			d. Rasio Kewirausahaan (%)	Persen (%)	6,61	8,25	
			e. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDB (%)	Persen (%)	11,15	14,15	
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen (%)	2,72	2,20	
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen (%)	74,33	79,96	
		17	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,96	60,00	
	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	Persen (%)	11,58	14,87	Terwujudnya keselarasan pembangunan ekonomi dengan kemampuan lingkungan hidup melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di Kabupaten Badung
	Transformasi Digital	19	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persen (%)	82,18	100,00	Terciptanya ekosistem digital yang unggul dan berdaya saing
	Integrasi Ekonomi Lokal dan Nasional	20	Distribusi Sektor Perdagangan	Persen (%)	6,93	10,20	Terintegrasinya perekonomian kabupaten badung dengan nasional dan jejaring internasional
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta rupiah)	Juta Rp	22.800.000,00	30.900.000,00	
		22	Net ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	Persen (%)	1,80	3,30	
	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan				Terciptanya kawasan perkotaan sebagai daya ungkit ekonomi berkelanjutan di kabupaten badung
			a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan terhadap daerah (<i>Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Badung terhadap PDRB Provinsi Bali</i>) (%)	Persen (%)	25,00	30,00	
			b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (<i>Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dengan luas lantai per kapita diatas 10m2</i>) (%)	Persen (%)	95,90	98,00	
Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	0,55	0,84	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, andal, dan adaptif
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,80	4,40	
		26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,562 (A)	5,000 (A)	
		27	Indeks Integritas Daerah	Indeks	79,95	79,95	

Agenda (Misi) Pembangunan	17 Arah (Tujuan) Pembangunan	No Indikator	IUP RPJPD Kabupaten Badung	Satuan	Baseline	Target	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung	
			Indikator		2025	2045		
Ketertiban Daerah Tangguh Demi Stabilitas Ekonomi Daerah	Keamanan Daerah yang Tangguh	28	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	100,00	100,00	Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Badung	
		29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Persen (%)	100,00	100,00		
		30	Persentase Peningkatan dan Ketenteraman Ketertiban Umum	Persen (%)	90,00	100,00		
	Stabilitas Ekonomi Makro Menuju Bali Dwipa Jaya	31	Rasio Total Penerimaan Daerah terhadap PDRB	Persen (%)	12,18	51,08	Terwujudnya ekonomi Kabupaten Badung yang berkelanjutan dan adaptif	
			Total Penerimaan Daerah	Rp	9,1 Trilyun	96,3 Trilyun		
			PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp	74,5 Trilyun	176,2 Trilyun		
			32	Tingkat Inflasi	Persen (%)	2,0 ±1		2,0 ±1
			33		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
	Rasio kredit terhadap PDRB (%PDRB)	Persen (%)	11,49	6,89				
	Total Kredit (Juta Rp)	Juta Rp	8.547.500,92	11.847.420,07				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	Juta Rp	74.544.555,62	176.266.191,03					
34	Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	11,58	14,87				
Penegakan Hukum Adaptif	35	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	100,00	100,00	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang teratur dan tertib		
		36	Persentase Penegakan Perda	Persen (%)	100,00		100,00	
Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai Sad Kerthi	Tradisi, Adat, Agama dan Budaya yang Ajeg dan Lestari berlandaskan nilai-nilai Sad Kerthi	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	90,00	100,00	Terjaganya kelestarian adat, seni, dan budaya yang mengakar pada kehidupan masyarakat Badung	
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	80,00-100,00	80,00-100,00		
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	22,30	24,17	Terwujudnya keluarga sehat dan kesetaraan gender	
			40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,12		0,10
	Lingkungan Hidup Berkualitas Dalam Kerangka Pemuliaan Alam Bali	41	Persentase RTH	Persen (%)	10,69	10,69	Lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	
			42		Kualitas Lingkungan Hidup			
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,70	74,12		
			b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	Persen (%)	100,00	100,00		
			c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen (%)	63,50	83,50		
			d. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen (%)	83,00	100,00		
e. Sampah terkumpul (ton/hari)			Ton/Hari	534,80	827,37			
f. Daur Ulang Sampah (Recycling) (%)	Persen (%)	23,00	43,00					
g. Residu Sampah di Lahan Urug Residu (%)	Persen (%)	39,00	59,00					

Agenda (Misi) Pembangunan	17 Arah (Tujuan) Pembangunan	No Indikator	IUP RPJPD Kabupaten Badung	Satuan	Baseline	Target	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung
			Indikator		2025	2045	
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				Ketahanan energi, air, dan pangan yang prima dan ramah lingkungan
			a. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Kwh/Kapita	1.323,71	1.781,08	
			b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	1,23	1,33	
			c. Kapasitas Produksi Air Bersih	Persen (%)	100,00	100,00	
			d. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen (%)	77,15	83,15	
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim untuk mewujudkan ketangguhan alam Bali.	44	Indeks Risiko Bencana	Indeks	102,85	92,44	Terwujudnya Badung yang adaptif dan tangguh bencana.	
	45	Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,53	84,53		

Sumber: Penyelarasan Sasaran Pokok Pembangunan terhadap Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan IUP RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

Tabel 5.9.

Penyelarasan *Game Changer* RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045		RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	
1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas, dan Adaptif	Percepatan wajib belajar 13 tahun dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul termasuk penguatan karakter dan jati diri masyarakat Bali melalui peningkatan kualitas dan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan mutu pendidikan melalui penerapan Sekolah Unggulan yang inklusif dan adaptif.	Transformasi Sosial yang Unggul dan Merata Dalam Kerangka Pemuliaan Manusia Bali	Penegakan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar menengah pertama serta dukungan terhadap 3 tahun pendidikan menengah dan pendidikan menengah pertama).
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Digital, dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Inovasi melalui Pembentukan Creatif Hub.		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.
		Berinvestasi pada kesehatan secara terus menerus dan menyeluruh dengan meningkatkan gaya hidup sehat.		Penguatan kualitas tenaga medis dan kesehatan yang merata yang didukung dengan kesejahteraan yang terjamin serta pendayagunaan sumber daya manusia wilayah setempat sebagai sumber tenaga medis utama.
		Penuntasan kemiskinan, stunting dan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial.		Pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim. Penuntasan stunting. Kemiskinan 0% melalui perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan sosial yang adil dan berkelanjutan.
2		Peningkatan hilirisasi hasil riset perguruan tinggi yang bekerjasama	Transformasi Ekonomi Unggul, Hijau, dan Maju	Pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan yang dapat diarahkan sebagai

No	RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045
Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif	dengan dunia usaha dan dunia industri.	kawasan wisata premium dan pengembangan ekonomi kreatif untuk sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan di kawasan perdesaan, yang terintegrasi dengan jejaring pemasaran berorientasi ekspor di kawasan perkotaan.
	Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, serta perguruan tinggi. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan di sektor pertanian dalam arti luas, ekraf, UMKM berbasis kawasan yang berdaya saing tinggi dari hulu hingga hilir yang berorientasi pasar baik domestik maupun ekspor.	Pengembangan pertanian organik dan pertanian presisi pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan.	Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis.
	Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital	Edukasi dan implementasi TIK bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran secara global melalui berbagai platform seperti <i>e-commerce</i> dan lainnya.
	Mengatasi kemacetan melalui pengembangan sistem transportasi terintegrasi dan konektivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi, serta Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru (PKB, Turyapada, KEK Sanur, KEK Kura-Kura, Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulan, Kawasan Industri CandiKesuma, Air Port Bali Utara,	Pembangunan ekosistem digital
		Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik lokal dan nasional. Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle (EV)</i> dan infrastruktur pendukungnya.

No	RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045		RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	
		<p>Celukan Bawang, Pelabuhan Perikanan, Pasar Induk, Terminal Barang).</p> <p>Mengembangkan kepariwisataan kerakyatan yang berkualitas melalui penerapan standarisasi penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali dan sinergi pengembangan pariwisata dengan sektor pertanian dan ekraf.</p> <p>Menggali sumber sumber pendapatan asli daerah dan mengembangkan sistem pengelolaan APBD untuk pembiayaan Pembangunan.</p>		
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Koordinatif	<p>Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama <i>single salary</i> dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi</p> <p>Memperbaiki kinerja birokrasi yang produktif efektif dan efisien.</p>	Transformasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Andal	<p>Optimalisasi peran kelembagaan yang kolaboratif lintas sektor melalui SDM ASN yang kompeten dan berintegritas</p> <p>Penguatan Tata Kelola kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan publik</p>
4	Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<p>Memantapkan penegakan hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum untuk rasa aman dan damai masyarakat.</p> <p>Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan melibatkan lembaga adat untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kenyamanan serta kerukunan hidup bermasyarakat.</p> <p>Pengembangan pola industri penunjang pariwisata skala nasional dan internasional.</p>	Ketertiban Daerah Tangguh Demi Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<p>Peningkatan keamanan dan koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa adat untuk mengurangi tingkat kriminalitas.</p> <p>Optimalisasi peran desa adat dalam pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum (termasuk perijinan)</p> <p>Penguatan stabilitas ekonomi makro</p>

No	RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045		RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045	
		<p>Transformasi perencanaan dan pendanaan: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal</p> <p>Percepatan penggunaan energi baru terbarukan dan pertanian organik.</p>		<p>Digitalisasi peraturan daerah terkait penegakan hukum, investasi, dan perijinan yang didukung oleh sumber daya manusia pengelola dan penegakan hukum yang unggul dan andal.</p>
5	<p>Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</p>	<p>Menguatkan kelembagaan tradisional masyarakat, dalam mengawal pelestarian dan pengembangan tradisi, kearifan lokal, seni dan budaya.</p> <p>Meningkatkan penanganan sampah.</p> <p>Menguatkan ketahanan Pangan, Air dan Energi.</p>	<p>Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berlandaskan Nilai <i>Sad Kerthi</i></p>	<p>Penguatan dan pelestarian adat, seni, dan budaya.</p> <p>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi, konservasi air, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>Perluasan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan khususnya pada gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik.</p> <p>Pengelolaan terpadu risiko bencana dan pengembangan mitigasi secara struktural dan non-struktural dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana tinggi.</p>

Sumber: Penyelarasan Game Changer RPJPD Kabupaten Badung terhadap RPJPD Provinsi Bali

5.3 Pentahapan Pembangunan

Pengelompokan pembangunan menjadi tahap-tahap merupakan langkah untuk menyusun tema-tema pembangunan secara berkala, sehingga kemajuan pembangunan jangka panjang dapat diukur dengan lebih terstruktur. Pendekatan ini membentuk dasar bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Tahap-tahap pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 melibatkan pembagian implementasi visi dan misi ke dalam periode perencanaan lima tahunan (jangka menengah), di mana setiap periode memiliki tema implementasi tersendiri. Dengan demikian, dalam perspektif jangka panjang, pencapaian visi dan misi dapat diukur lebih sistematis melalui kemajuan pada setiap tema periode pembangunan.

Adapun pentahapan secara jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- Tahap I: Akselerasi Pondasi Transformasi (Periode 2025-2029)
- Tahap II: Pemantapan Transformasi (Periode 2030-2034)
- Tahap III: Penyiapan Pondasi Badung Unggul (Periode 2035-2039)
- Tahap IV: Perwujudan Badung Unggul (Periode 2040-2045)

Pentahapan pembangunan dalam implementasi Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10.

Target Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung Tahun 2025-2045

No Indikator	IUP RPJPD Kabupaten Badung Indikator	Satuan	Target Pentahapan Pembangunan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Usia Harapan Hidup (UHH LF SP2020) (tahun)	Tahun	76,06	76,33	76,60	76,93
2	Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	102,2	97,02	92,03	86,02
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen (%)	3,10	2,70	2,40	2,10
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)					
	a. Penemuan Kasus TBC (treatment coverage)	Persen (%)	95,00	95,00	95,00	95,00
	b. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Persen (%)	95,00	95,00	95,00	95,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Hasil Pembelajaran					
	a. Indeks Literasi	Indeks	92,34	95,90	99,66	100,00
	b. Indeks Numerasi	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00
	c. Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,44	11,91	12,40	13,00
	d. Harapan lama sekolah	Tahun	14,36	14,48	14,60	14,74
6	Angka Partisipasi Sekolah					
	Angka Partisipasi Sekolah Usia Dini (PAUD)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun (SD)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun (SMP)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Angka Kelulusan SMP (%)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen (%)	1,84	1,46	1,07	0,61
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen (%)	72,04	95,11	100,00	100,00
10	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen (%)	10,31	11,21	12,19	13,49
11	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (%)	Persen (%)	5,90	5,95	6,00	6,57
12	Pengembangan Pariwisata					
	a. Proporsi Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap Total PDRB (%)	Persen (%)	25,59	26,39	27,21	28,23
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	Orang	6,9 Juta	7,5 Juta	8,2 Juta	9,1 Juta
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen (%)	10,90	11,60	12,35	13,31
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Pertanian pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	12,12	12,52	12,82	13,12
	b. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	87,88	88,08	88,28	88,48
	c. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	Persen (%)	8,15	8,30	8,45	9,00

No Indikator	IUP RPJPD Kabupaten Badung Indikator	Satuan	Target Pentahapan Pembangunan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	d. Rasio Kewirausahaan (%)	Persen (%)	6,75	7,25	7,75	8,25
	e. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	Persen (%)	11,15	12,15	13,15	14,15
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen (%)	2,50	2,40	2,30	2,20
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen (%)	75,42	76,81	78,23	79,96
17	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,22	55,48	57,74	60,00
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	Persen (%)	12,17	12,96	13,79	14,87
19	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persen (%)	86,72	92,75	99,20	100,00
20	Distribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen (%)	7,80	8,60	9,40	10,20
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta rupiah)	Juta Rp	24.247.947,36	26.180.470,78	28.267.013,28	30.991.520,81
22	Net ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	Persen (%)	1,80	2,30	2,80	3,30
23	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan terhadap daerah (<i>Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Badung terhadap PDRB Provinsi Bali</i>) (%)	Persen (%)	25,00	27,00	29,00	30,00
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (<i>Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dengan luas lantai per kapita diatas 10m²</i>) (%)	Persen (%)	95,90	96,70	97,30	98,00
24	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	0,60	0,67	0,74	0,84
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,80	4,00	4,20	4,40
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,650 (A)	4,759 (A)	4,869 (A)	5,000 (A)
27	Indeks Integritas Daerah	Indeks	79,95	79,95	79,95	79,95
28	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Persentase Peningkatan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen (%)	90,00	100,00	100,00	100,00
31	Rasio Total Penerimaan Daerah terhadap PDRB	Persen (%)	16,22	23,22	33,23	51,08
	Total Penerimaan Daerah	Rp	14,6 Trilyun	26,3 Trilyun	47,5 Trilyun	96,3 trilyun
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp	88,5 Trilyun	109,8 Trilyun	136,1 Trilyun	176,2 Trilyun
32	Tingkat Inflasi	Persen (%)	2,0 ±1	2,0 ±1	2,0 ±1	2,0 ±1
33	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan					
	a. Rasio kredit terhadap PDRB (%PDRB)	Persen (%)	10,37	9,13	8,03	6,89
	b. Total Kredit (Juta Rp)	Juta Rp	9.124.227,02	9.900.160,61	10.742.080,39	11.847.420,07
	c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	Juta Rp	88.545.510,90	109.800.627,11	136.157.977,88	176.266.191,03
34	Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	11,58	12,96	13,79	14,87
35	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Persentase Penegakan Perda	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	80,00-100,00	80,00-100,00	80,00-100,00	80,00-100,00
39	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	22,30	22,87	23,46	24,17

No Indikator	IUP RPJPD Kabupaten Badung Indikator	Satuan	Target Pentahapan Pembangunan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,11	0,11	0,10	0,10
41	Persentase RTH	Persen (%)	10,69	10,69	10,69	10,69
42	Kualitas Lingkungan Hidup					
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,56	72,24	73,10	74,12
	b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen (%)	68,50	73,50	78,50	83,50
	d. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen (%)	88,00	93,00	98,00	100
	e. Sampah terkumpul (ton/hari)	Ton/Hari	584,10	651,24	736,10	827,37
	f. Daur Ulang Sampah (Recycling) (%)	Persen (%)	28,00	33,00	38,00	43,00
	Residu Sampah di Lahan Urug Residu (%)	Persen (%)	44,00	49,00	54,00	59,00
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
	a. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Kwh/Kapita	1.404,66	1.512,84	1.629,35	1.781,08
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	1,30	1,31	1,32	1,33
	c. Kapasitas Produksi Air Bersih	Liter/Detik	100,00	100,00	100,00	100,00
	d. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen (%)	78,31	79,79	81,30	83,15
44	Indeks Risiko Bencana	Indeks	100,28	97,77	95,33	92,44
45	Indeks Kualitas Udara	Indeks	81,33	82,53	83,33	84,53

Sumber: Penetapan Target Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Badung 2025-2045

BAB VI PENUTUP

Kabupaten Badung mengemban visi besar untuk 20 tahun ke depan yaitu selalu menjadi yang paling unggul dalam konteks pemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Badung adalah wajah dari Provinsi Bali sehingga tidak berlebihan apabila visi tersebut harus tersemat. Dalam mewujudkan Badung Unggul tersebut tentu banyak tantangan yang harus dihadapi seperti:

- Perubahan Iklim: Pemerintah perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, peningkatan suhu, dan perubahan cuaca ekstrem. Ini termasuk perencanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Demografi: Perubahan dalam komposisi penduduk, seperti pertumbuhan populasi, penuaan penduduk, urbanisasi, dan migrasi, perlu diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang.
- Kesehatan Masyarakat: Perubahan dalam kesehatan masyarakat, termasuk wabah penyakit, penyakit menular, dan penyakit tidak menular, harus diperhitungkan dalam program kesehatan dan sistem perawatan kesehatan yang efektif.
- Teknologi dan Inovasi: Kemajuan teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi dapat memengaruhi lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan industri. Pemerintah harus mengantisipasi perubahan ini dan merencanakan kebijakan yang relevan.
- Perekonomian Global: Fluktuasi dalam perekonomian global, termasuk resesi ekonomi dan perubahan dalam perdagangan internasional, dapat memengaruhi perekonomian nasional.
- Pendidikan dan Keterampilan: Perubahan dalam permintaan pasar tenaga kerja untuk keterampilan dan pendidikan tertentu harus diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan.
- Ketahanan Pangan: Ketahanan pangan harus dijamin mengingat tantangan dalam pasokan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim, bencana alam, dan faktor lainnya.
- Ketahanan Energi: Dengan meningkatnya permintaan energi dan perubahan dalam sumber energi, pemerintah perlu mengantisipasi kebutuhan energi dan merencanakan pasokan energi yang berkelanjutan.
- Ketahanan Lingkungan: Perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan limbah harus diintegrasikan dalam program pembangunan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
- Ketahanan Sosial: Pemerintah perlu memastikan bahwa program pembangunan mencakup ketahanan sosial yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
- Ketahanan Terhadap Bencana: Indonesia merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir. Pemerintah harus mengantisipasi dan merencanakan respons bencana yang efektif.

- **Partisipasi Masyarakat:** Pemerintah harus memastikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan respons terhadap berbagai perubahan dan tantangan.

Keseluruhan aspek tersebut telah terangkum dalam visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Badung pada bab sebelumnya. Kita harus berpikiran dan berwawasan jauh kedepan dalam menyikapi dan mengantisipasi perubahan yang ada saat ini sebagai modal untuk menyusun kebijakan masa yang akan datang. Kabupaten Badung telah bersiap untuk menghadapi tantangan tersebut dan memiliki keyakinan di masa yang akan datang Badung dapat berkembang selaras dengan perubahan jaman tanpa harus meninggalkan jati dirinya.

Untuk dapat memastikan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung dapat terwujud sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala pada masing-masing pelaksanaan indikator sasaran pokok. Perlu dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali sesuai dengan pentahapan pembangunan dengan melihat kinerja masing-masing indikator sasaran pokok.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam upaya ini, penerapan manajemen risiko menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan. Manajemen risiko pembangunan daerah membantu pemerintah daerah dalam meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian dan memaksimalkan peluang untuk keberhasilan pembangunan.

Pengendalian perencanaan pembangunan daerah melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Beberapa langkah penting dalam pengendalian perencanaan pembangunan meliputi:

1. **Pemantauan Berkala:** Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mengidentifikasi deviasi dari rencana awal.
2. **Pelaporan Kinerja:** Menyusun laporan kinerja secara periodik yang mencakup pencapaian target, penggunaan anggaran, serta masalah yang dihadapi.
3. **Evaluasi Tengah Jalan:** Mengadakan evaluasi tengah jalan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
4. **Penetapan Tindakan Korektif:** Menetapkan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang muncul dan memastikan pencapaian target sesuai rencana.

Evaluasi perencanaan pembangunan dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Proses evaluasi meliputi:

1. **Penilaian Kinerja:** Mengukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan.
2. **Analisis Dampak:** Menilai dampak dari program dan kegiatan pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan.
3. **Identifikasi Kendala dan Peluang:** Mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan di masa depan.

4. **Rekomendasi Perbaikan:** Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Manajemen risiko merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan. Beberapa langkah dalam manajemen risiko pembangunan daerah meliputi:

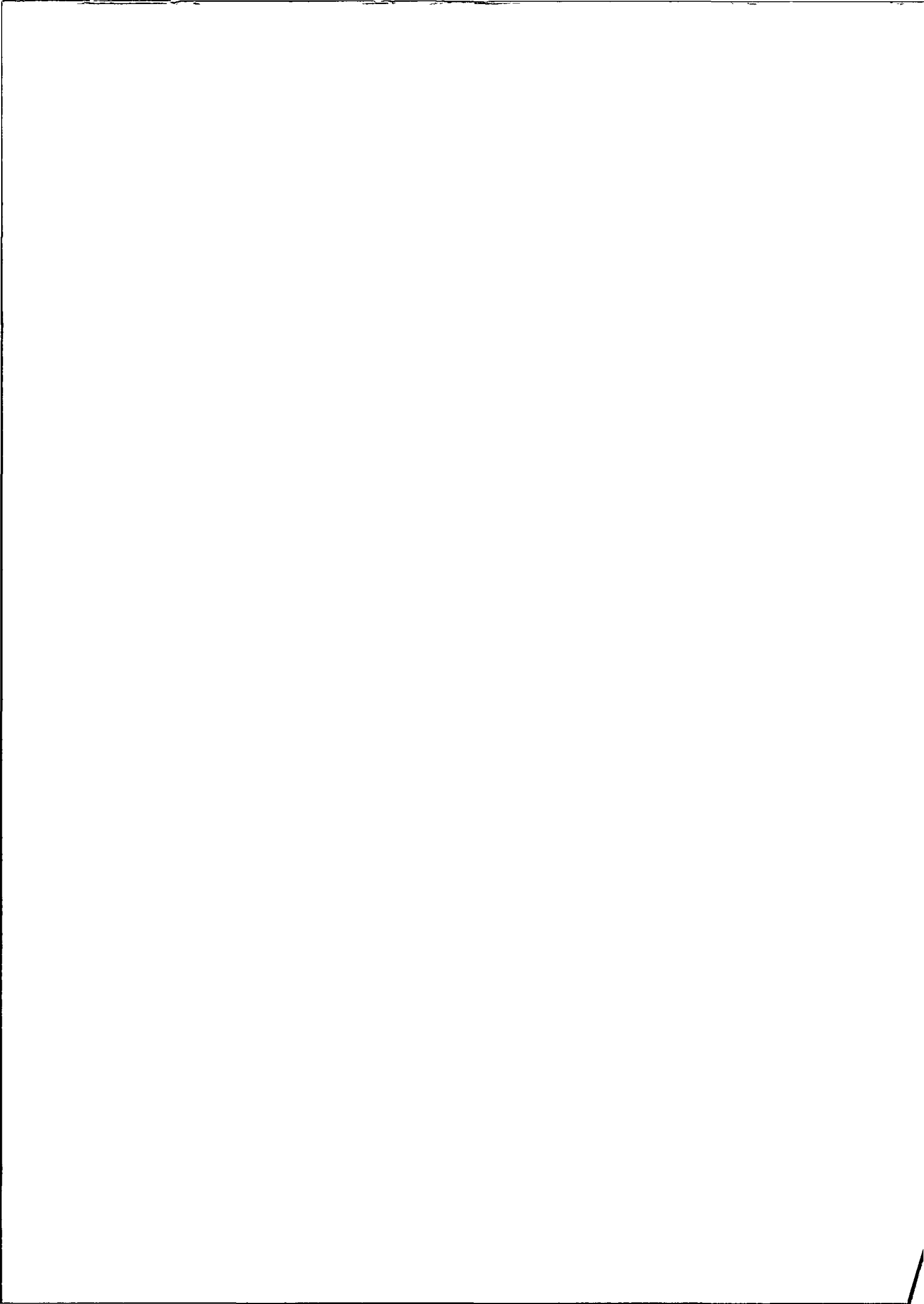
1. **Identifikasi Risiko:** Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, seperti risiko finansial, teknis, sosial, dan lingkungan.
2. **Penilaian Risiko:** Menilai tingkat risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya terhadap tujuan pembangunan.
3. **Mitigasi Risiko:** Merumuskan strategi dan tindakan untuk mengurangi probabilitas dan dampak risiko yang telah diidentifikasi.
4. **Pemantauan Risiko:** Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan efektivitas tindakan mitigasi yang dilakukan.
5. **Tinjauan dan Penyesuaian:** Melakukan tinjauan berkala terhadap manajemen risiko dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui manajemen risiko merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mengatasi berbagai ketidakpastian yang ada. Dengan menerapkan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko yang muncul, memaksimalkan peluang keberhasilan, dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 ini diharapkan menjadi panduan strategis dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. RPJPD ini merupakan hasil kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga legislatif, akademisi, masyarakat, hingga sektor swasta. Melalui sinergi ini, arah pembangunan yang dirumuskan diharapkan dapat menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Badung selama periode 20 tahun mendatang.

Pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Badung mencerminkan komitmen kita bersama untuk menciptakan daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini telah melalui proses kajian yang mendalam dan perumusan yang komprehensif agar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Badung.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah berperan sebagai motor penggerak utama, namun partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari sektor swasta juga menjadi kunci utama dalam merealisasikan seluruh program pembangunan.



Perlunya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menjalankan setiap rencana, serta kesediaan untuk terus belajar dan berinovasi. Di sisi lain, ada harapan besar bahwa melalui implementasi RPJPD ini, Kabupaten Badung dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi, mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan, kita optimis bahwa tujuan-tujuan pembangunan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

